



# INTEGRASI NASIONAL SUATU PENDEKATAN BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



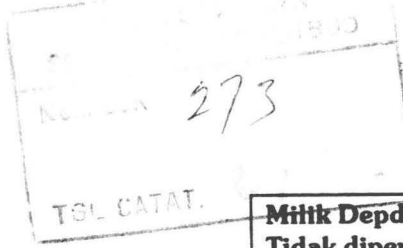
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**INTEGRASI NASIONAL : SUATU PENDEKATAN  
BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**





**Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan**



# **INTEGRASI NASIONAL : SUATU PENDEKATAN BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Tim Penyusun**  
**Dra. Emiliana Sadilah**  
**Dra. Christriyati Ariani**  
**Drs. Sukari**  
**Drs. Sumardi**  
**Drs. Sujarno**

**Konsultan**  
**DR. Hari Poerwanto**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 1997/1998**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY pada tahun anggaran 1997/1998 dapat menerbitkan buku berjudul ***Integrasi Nasional : Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta***. Buku ini merupakan hasil proyek tahun anggaran 1995/1996, penelitiannya dilakukan oleh Drs. Moertjipto dkk, staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Maksud dan tujuan diterbitkannya buku ini selain untuk menambah khasanah dunia pustaka, juga sebagai upaya menggali dan mengembangkan bagaimana proses integrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diakibatkan dari berkembangnya Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota tujuan pariwisata dan pusat budaya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penelitian hingga diterbitkannya buku ini berkat kerja keras dari tim penyusun dan juga adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, sebagai pelaksananya. Untuk itu kepada semua pihak yang telah turut membantu usaha penelitian hingga diterbitkannya buku ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**SAMBUTAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa saya menyambut baik diterbitkannya naskah hasil perekaman **"Integrasi Nasional : Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta"** oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY Tahun Anggaran 1997/1998.

Integrasi Nasional merupakan isu yang selalu dikaitkan dengan pembangunan nasional, karena dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, maka perlu mamupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu perlu dilakukan integrasi yang kuat agar bangsa kita dapat melaksanakan program pembangunan. Dalam kaitan ini kerukunan yang bertujuan mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis merupakan modal utama dalam pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering mendapat julukan kota pendidikan merupakan tempat berkumpulnya pemuda/pemudi dari penjuru tanah air, bahkan banyak pelajar/mahasiswa dari berbagai manca negara untuk menuntut ilmu di Yogyakarta, dengan kondisi sosial budaya yang beraneka ragam, sehingga memerlukan penanganan secara menyeluruh agar terjamin rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan sekaligus proses integrasi dapat berjalan lancar.

Penelitian ini mencoba menggali dan mengembangkan bagaimana proses integrasi yang terjadi di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan budaya, adalah merupakan penelitian yang penting dan mempunyai nilai strategis demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.



Saya menghargai karya dan kreativitas Bagian proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY Tahun Anggaran 1997/1998 dalam upaya menggali, meneliti dan menerbitkan naskah berjudul "Integrasi Nasional : Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta", semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
SAMBUTAN KA KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI DIY .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR PETA .....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
 BAB II KAJIAN KONSEP-KONSEP .....	 9
A. Suku Bangsa .....	9
B. Sistem Nilai Budaya Nasional .....	14
C. Kebudayaan Daerah .....	18
D. Integrasi Nasional .....	24
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	 31
A. Suku Bangsa Asal .....	31
B. Suku Bangsa Pendetang .....	36
C. Hubungan Antar Suku Bangsa .....	40
 BAB IV METODE PENELITIAN .....	 47
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	 53
A. Hasil Penelitian .....	53
1. Kelompok Sosial .....	53
2. Nilai Budaya .....	63
3. Integrasi .....	79
4. Hubungan Dengan Kelompok Lain .....	97
5. Pengetahuan Tentang Nilai Budaya Nasional .....	113
B. Analisis .....	126
1. Kaitan Nilai Budaya Suku Bangsa dengan Nilai Budaya Nasional .....	 126
2. Potensi Penunjang Kesatuan dan Persatuan .....	132

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	137
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	141
LAMPIRAN .....	149



## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel II.1.	Diskripsi Suku-Bangsa Di Indonesia Pada Tahun 1974.....	13
Tabel IV.1.	Suku-Bangsa Pendatang Yang Paling Dikenal Oleh Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	48
Tabel V.1.	Nilai-Nilai Budaya Yang Dianggap Paling Penting Oleh Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	67
V.2.	Nilai-Nilai Budaya Yang Dianggap Paling Penting Oleh Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	74
V.3.	Nilai-Nilai Budaya yang Dianggap Paling Mengacu Konsep Integrasi Pada Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	80
V.4.	Nilai-Nilai Budaya Yang Dianggap Paling Mengacu Konsep Integrasi Pada Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	86
V.5.	Pandangan Suku-Bangsa Asal Yang Bersifat Positif Terhadap Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 ...	98
V.6.	Suku-Bangsa Pendatang yang Paling Disenangi Oleh Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	99
V.7.	Suku-Bangsa Pendatang yang Kurang Disenangi Oleh Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	100
V.8.	Pandangan Suku-Bangsa yang Bersifat Negatif Terhadap Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	101
V.9.	Suku-Bangsa Pendatang yang Paling Dikenal Oleh Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	102
V.10.	Sumber Pengenalan Suku-Bangsa Asal Terhadap Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	103
V.11.	Lamanya Suku-Bangsa Asal Mengenal Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	104
V.12.	Pandangan Suku-Bangsa Pendatang yang Bersifat Positif Terhadap Suku-Bangsa Lain Di Desa Caturtunggal, 1995.....	105
V.13.	Suku-Bangsa yang Paling Disenangi Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	106
V.14.	Suku-Bangsa yang Kurang Disenangi Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	107

V.15.	Pandangan Suku-Bangsa Pendatang yang Bersifat Negatif Terhadap Suku-Bangsa Lain Di Desa Caturtunggal, 1995 ....	108
V.16.	Suku-Bangsa yang Paling Dikenal Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	109
V.17.	Lamanya Suku-Bangsa Pendatang Tunggal Di Yogyakarta Tahun 1995 .....	110
V.18.	Lamanya Suku-Bangsa Pendatang Mengenal Suku-Bangsa Lain yang Paling Dikenal Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	111
V.19.	Pengenalan Suku-Bangsa Pendatang Terhadap Suku-Bangsa Lain Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	112
V.20.	Nilai-Nilai yang Seharusnya Difahami Menurut Pendapat Suku-Bangsa Asal Di Desa Caturtunggal, 1995 (n=75).....	116
V.21.	Nilai-Nilai yang Seharusnya Difahami Menurut Pendapat Suku-Bangsa Pendatang Di Desa Caturtunggal, 1995 .....	124

## DAFTAR PETA

Nomor	Halaman
1. Peta I : Propinsi DIY .....	159
2. Peta II : Peta Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman .....	161

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Integrasi merupakan suatu isu nasional yang perlu dan terus diperhatikan di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara yang sebelumnya saling bersaing. Begitu pula pemuda Indonesia selama periode pergerakan telah menolak penonjolan isu kesuku-bangsaan, akhirnya memilih bahasa persatuan dan merintis pendidikan nasional. Usaha untuk mengintegrasikan bangsa yang demikian ini telah membantu dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia.

Namun, di balik itu sejarah juga menunjukkan berbagai konflik berlatar-belakang kedaerahan atau suku-bangsa yang terjadi selama periode awal kemerdekaan. Bahkan, dewasa ini berbagai kasus konflik yang menggambarkan disintegrasi antarsuku-bangsa, baik di luar maupun dalam negeri, juga sering muncul. Kasus-kasus yang demikian menunjukkan bahwa masalah integrasi bukan merupakan masalah sementara, tetapi justru merupakan masalah yang harus secara terus menerus dipupuk, diperkuat, dan diupayakan dari waktu ke waktu (Kompas, 1990; 6). Kelalaian terhadap masalah tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk konflik seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Meskipun Indonesia telah memiliki prinsip ideal yang disebut "Bhineka Tunggal Ika" sebagai tali pengikat kemajemukannya, dan telah diatur secara legal dalam UUD 1945 dan Pancasila, namun usaha untuk mengintegrasikan berbagai suku-bangsa di daerah masih terbatas. Hal ini, selain disebabkan oleh keterbatasan dana, juga karena Indonesia memiliki latar belakang yang spesifik, yaitu wilayahnya yang terbentang luas dan tingkat diversifikasi penduduknya sangat tinggi. Diperkirakan wilayahnya terbentang kurang lebih 5000 kilometer dari barat sampai ke timur, dan terdiri lebih dari 6000 pulau yang dihuni penduduk. Penduduknya sangat beraneka ragam dilihat dari aspek suku-bangsa, budaya, latar belakang sejarah, tingkat ekonomi, dan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.

Dewasa ini, isu tentang integrasi nasional di Indonesia selalu dikaitkan dengan pembangunan nasional. Dengan kondisi yang sekian majemuk Indonesia perlu memupuk kesatuan dan persatuan atau memiliki integrasi nasional yang kuat agar dapat merealisasi tujuan pembangunannya. Dalam hal ini, kerukunan yang bertujuan mempertahankan masyarakat dalam keadaan



yang harmonis merupakan prinsip utama. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dengan maksud untuk saling membantu (Suseno, 1993).

Integrasi di Indonesia dapat dipahami dari empat dimensi pokok, yaitu: dimensi sejarah, sosio-kultural, interaksi (transportasi dan komunikasi), dan ekonomi (Drake, 1989). Dari dimensi sejarah, tampak bahwa pengalaman masa lampau sangat membantu membentuk suatu kekuatan kohesif yang tangguh. Penderitaan yang dialami oleh rakyat ketika masa penjajahan telah membentuk ikatan yang kuat di antara rakyat itu sendiri. Pengalaman sejarah dan politik seperti ini telah membuat kohesi sosial menjadi lebih tinggi di antara rakyatnya.

Dimensi sosial-kultural tampak dari nilai-nilai sosial budaya yang dipelihara bersama oleh masyarakat Indonesia, yang membedakannya dari kalangan masyarakat lainnya, di negara-negara lain dan membentuk kesatuan yang kokoh. Perasaan sebagai satu kesatuan negara dapat dilihat dari kesamaan bahasa, ciri-ciri budaya, agama serta peluang-peluang untuk bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi kenegaraan.

Dimensi interaksi dapat dilihat dari berbagai penduduk dalam negara tersebut yang mempromosi integrasi, khususnya di antara semua yang merasa memiliki atribut sosial-budaya yang berlainan. Hal ini terjelma dalam berbagai bentuk mobilitas penduduk dan komunikasi antarpemropinsi, termasuk hubungan atau jaringan laut, darat, udara, radio, televisi, telepon, migrasi, dan perdagangan.

Dimensi keempat mencakup interdependensi ekonomis dan usaha memperkecil perbedaan kesejahteraan antardaerah. Berbagai program pembangunan telah dirancang dan diterapkan di seluruh tanah air dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu negara. Program-program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, bantuan desa, dan sebagainya, telah menunjukkan usaha pemerintah memperkecil perbedaan antardaerah.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai integrasi nasional yang kuat, diperlukan pendekatan, tidak saja dari aspek sosial-budaya, tetapi juga dari berbagai aspek. Namun, dengan tidak mengurangi arti penting dari aspek-aspek yang lain, penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek budaya, dengan tema "hubungan antar suku-bangsa dalam kaitannya dengan pengalaman sistem nilai budaya nasional Indonesia". Diharapkan agar penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam menunjang kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, khususnya menunjang "pembangunan berbudaya" seperti telah ditegaskan dalam GBHN terakhir.

## **B. PERMASALAHAN**

Penelitian ini diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Perlu diketahui, kota Yogyakarta telah lama dikenal sebagai kota pelajar. Di kota ini berkumpul berbagai macam suku- bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka menuntut ilmu sehingga menyerupai "Indonesia kecil". Sebagaimana kota merupakan tempat pertemuan atau tempat terjadinya interaksi antarsuku-bangsa yang dapat menimbulkan konflik (Koentaraningrat, 1976), maka kota Yogyakarta juga dianggap potensial bagi timbulnya konflik. Kecurigaan antarsuku-bangsa atau golongan dapat saja terjadi karena pandangan yang sering tidak wajar terhadap golongan lain. Kecurigaan seperti ini tidak saja terjadi antara orang-orang pribumi dengan orang asing (Bachtiar, 1976), antara kelompok mayoritas dengan minoritas (Tan, 1976) atau antara agama yang satu dengan yang lainnya (Garang, 1976), tetapi juga antara etnik-etnik yang ada, yang dapat dilihat dari adanya konsentrasi pemukiman etnik-etnik tertentu, organisasi kekeluargaan atau kekerabatan, asrama pelajar dan mahasiswa (Liliweri, 1994).

Berdasarkan potensi kota Yogyakarta tersebut maka penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok, yaitu bagaimana pengaruh kontak budaya dalam hubungan antarsuku-bangsa di kota Yogyakarta terhadap pemahaman masyarakatnya mengenai sistem nilai budaya nasional?. Atau secara lebih operasional dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Sampai seberapa jauh tingkat integrasi atau disintegrasi antaretnik terjadi di kota Yogyakarta?
2. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat integrasi atau disintegrasi antaretnik di kota Yogyakarta?
3. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan selama ini baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah untuk meningkatkan integrasi antar etnik di kota Yogyakarta?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kondisi hubungan antaretnik dan pengaruhnya terhadap rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Untuk itu, ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:

1. Hubungan inter dan antaretnik
2. Tingkat etnosentrisme
3. Kesadaran terhadap kesatuan bangsa
4. Pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945

5. Keterkaitan antara pemahaman dan kesadaran tersebut terhadap usaha meningkatkan integrasi.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui kondisi kontak-kontak budaya yang terjadi melalui hubungan antarsuku-bangsa di kota Yogyakarta, khususnya di permukiman yang merupakan tempat pertemuan dan interaksi banyak suku-bangsa dan budaya.
2. Mengkaji pengaruh bentuk-bentuk hubungan antarsuku-bangsa terhadap rasa persatuan dan kesatuan.
3. Menemukan faktor-faktor penunjang dan penghambat integrasi nasional, baik berupa pembauran maupun kesetiakawanan sosial nasional.
4. Memberi masukan mengenai langkah-langkah peningkatan jati diri dan kualitas kebangsaan di daerah-daerah.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Untuk menjawab secara teoritis permasalahan di atas maka beberapa kerangka pemikiran yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong/pendukung dan penghambat integrasi nasional atau integrasi antarkelompok akan disajikan secara ringkas. Namun, sebelumnya perlu diperjelas terlebih dahulu konsep integrasi itu sendiri.

Berbagai literatur yang ada melihat konsep integrasi dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Ada yang melihat integrasi merupakan salah satu proses dan hasil kehidupan sosial, dan merupakan alat yang bertujuan untuk membentuk suatu kesatuan kebudayaan yang homogen (Susanto, 1977). Ada yang melihatnya sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, dan adanya keteraturan dan saling ketergantungan tingkah laku yang terkoordinasi dalam suatu kelompok sosial (Suryaman, 1990). Atau juga sebagai proses pemeliharaan kesadaran menjaga keseimbangan hubungan antara kelompok-kelompok sosial sehingga eksistensi dan identitas masing-masing kelompok sosial tetap diakui. Sementara itu, integrasi juga diartikan sebagai keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem (bukan penyeragaman tetapi hubungan satuan-satuan yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masing-masing satuan) dimana yang baik saling mendukung dan saling menguntungkan, dan masing-masing masih tetap memiliki identitasnya sendiri (Widjaja, 1986). Menurut Bacthiar (1994) pengertian integrasi dalam kebudayaan adalah proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, konsep integrasi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dari dimensi proses, integrasi merupakan usaha pengendalian antarkelompok agar dapat menghindari konflik antara satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, integrasi merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dilahirkan oleh faktor-faktor teritorial termasuk kultur dengan mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut (Sjamsuddin, 1994). Dan dari dimensi hasil, integrasi merupakan tingkat keserasian antar- kelompok pada suatu waktu tertentu. Atau dengan kata lain integrasi merupakan suatu kondisi dimana konflik antaretnik sangat kecil dan kerja sama antar etnik sangat kuat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional atau antarkelompok telah diidentifikasi oleh beberapa ahli antara lain Hendropuspito (1989), Koentjaraningrat (1993), Susanto (1977), Suryaman (1990), Suseno (1993), Pelly (1989), Poerwanto (1994), Sjamsuddin (1994), dan Catles (1994). Menurut Hendropuspito (1989), faktor-faktor pendorong integrasi adalah pembinaan kesadaran nasional, perwujudan keadilan sosial dan prinsip sub-solidaritas, pengawasan sosial yang intensif, tekanan dari luar, bahasa kesatuan, dan lambang kesatuan. Dan unsur-unsur yang menghambat integrasi terdiri dari perbedaan suku dan ras, kebudayaan, agama serta kepercayaan, daerahisme, dan masalah mayoritas dan minoritas.

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional adalah konflik yang ditimbulkan oleh beberapa sumber antara lain perbedaan sumber penghidupan atau mata pencaharian, adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa lain, adanya fanatisme, adanya dominasi dari salah satu suku bangsa, dan adanya permusuhan antar suku secara adat. Namun demikian, ada faktor yang mendorong integrasi, yaitu bersumber dari kerja sama secara sosial, ekonomi, dan politik serta usaha hidup berdampingan. Bahkan Koentjaraningrat (Kompas, 1987;4) juga pernah menekankan peranan gotong royong dan tenggang rasa untuk mencapai integrasi nasional.

Susanto (1977) melihat bahwa integrasi antarkelompok hanya akan terwujud apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma atau nilai-nilai. Dalam konteks integrasi antarkelompok tersebut, Suryaman (1990) mengemukakan bahwa terwujudnya integrasi antarkelompok sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, solidaritas kelompok, faktor budaya dan agama serta daya tampung sosial.

Sementara itu, (Suseno (1993) mengemukakan bahwa mudah-tidaknya tercapai integrasi nasional ini sangat tergantung dari apa yang disebut sebagai



"rukun", yang artinya berada dalam keadaan selaras, tenang, dan tenteram, tanpa ada perselisihan dan pertentangan, bersatu, saling membantu satu sama lainnya, menghilangkan ketegangan dalam masyarakat atau menyingkirkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan perselisihan dan keresahan. Untuk meningkatkan kohesi antar kelompok yang ada, diperlukan adanya proses belajar antarkelompok yang satu dengan yang lain (Van Peursen, 1976).

Dalam kaitannya dengan kemajemukan suatu masyarakat, Pelly (1989) mengungkapkan bahwa hubungan antaretnik (integrasi antar- etnik) sangat ditentukan oleh pengaruh atau kekuasaan, persepsi, dan tujuan masing-masing etnik. Kelompok minoritas sering kali harus tunduk terhadap kelompok mayoritas, dan dipaksa membaur dalam kelompok mayoritas. Demikian pula, persepsi khusus tentang etnik lain sering kali menuju pada konflik, seperti orang Batak selalu dianggap kasar, orang Jawa cenderung penurut, orang Aceh cenderung penipu, orang Bugis sebagai tukang kelahi (Schweizer, 1979). Stereotip seperti ini, menurut Pelly (1989) akan hilang bila kontak antaretnik banyak dilakukan.

Integrasi nasional juga ditentukan oleh tingkat konformitas untuk menerima norma-norma tertentu dalam proses interaksi sosial. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang bersifat negatif atau positif dari suatu etnik terhadap norma etnik lain, dan juga perbedaan latar belakang kebudayaan (Poerwanto, 1994).

Sjamsuddin (1994) menyatakan bahwa integrasi nasional sangat tergantung dari nilai primordial, yaitu ikatan kesetiaan yang melekat pada diri seseorang dan dimilikinya sejak lahir, seperti daerah kelahiran, suku, ikatan darah, ras, agama, dan bahasa.

Sementara itu, Castles (1994) berteori bahwa integrasi dalam konteks loyalitas nasional dan hidup berdampingan dapat terwujud apabila semua pihak setuju menggunakan bahasa nasional yang sama, dan ketimpangan ekonomi antarkelompok etnik tidak mencolok.

Dari uraian di atas, integrasi sebagai hasil akhir dapat diukur dari apakah anggota dari suatu etnik bersedia menerima etnik lain, toleransi, tenggang rasa terhadap etnik lain, dan memiliki rasa hormat/saling menghormati terhadap budaya dari etnik lain. Gejala ini dapat diamati dari intensitas dan efektivitas kontak antaretnik yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan berbagai kerangka pemikiran para ahli di atas, dilakukan suatu modifikasi kerangka pemikiran penelitian di mana tingkat integrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat etnosentrisme pada setiap etnik dan persepsi suatu etnik tentang etnik lain. Tingkat etnosentrisme serta persepsi tentang etnik lain ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya (kebudayaan daerah)

dan intervensi formal dari pemerintah, baik melalui ajaran-ajaran tentang etika atau moral melalui Pancasila (P4) maupun melalui kebijaksanaan pemerintah yang ada (dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional). Semua hubungan ini dapat terungkap melalui sikap dan tindakan seseorang dari suatu etnik terhadap orang dari etnik lain dalam interaksi sosial sehari-hari.

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEP KONSEP**

#### **A. SUKU BANGSA**

Mahluk manusia yang tersebar di seluruh muka bumi memiliki keanekaragaman fisik yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri tubuh, seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk-bentuk bagian-bagian muka dan sebagainya, tampak dengan sekejap pandangan dan menyebabkan timbulnya pengertian "ras" sebagai suatu golongan yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan suatu frekuensi yang besar (Koentjaraningrat, 1974). Di muka bumi ini ada beberapa macam ras yang dikenal, yaitu: ras Mongoloid, ras Caucasoid, ras Negroid, dan ras Australoid. Ras-ras tersebut berkembang ke seluruh penjuru dunia dan timbullah berbagai macam sub-sub ras. Sub-sub ras ini, karena adanya batas teritorial atau wilayah, dan adanya lembaga pemerintahan maka berkembang dengan apa yang disebut *nation* atau bangsa.

Bangsa Indonesia merupakan keturunan dari salah satu ras tersebut di atas. Ras ini kemudian berkembang di Kepulauan Nusantara menjadi sub-sub ras yang sering dikenal dengan sebutan *suku bangsa*. Sub-sub ras ini sebenarnya merupakan "pecahan-pecahan" kecil dari ras atau bangsa. Oleh karena adanya berbagai kondisi alam maka kelompok-kelompok kecil itu berkembang secara sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok ini mempunyai adat istiadat dan wilayah tersendiri, yang membedakan antara kelompok itu dengan yang lain. Dengan demikian wilayah dan adat istiadat yang dimiliki membedakan atau menyebabkan adanya perbedaan antar kelompok. Oleh karena perbedaan itulah maka setiap kelompok itu menyebut dirinya sebagai suatu suku-bangsa. Jadi, dengan adanya identitas itulah, sebuah kelompok atau suku-bangsa dapat dikenal atau dibedakan dengan suku bangsa lainnya.

Suatu kelompok atau suku-bangsa mempunyai corak yang khas, terutama kalau dilihat oleh orang atau suku-bangsa lain atau bukan warga suku-bangsa yang bersangkutan. Seorang warga dari suatu suku-bangsa yang telah hidup dari hari ke hari di dalam lingkungan kebudayaannya, biasanya tidak lagi melihat corak yang khas tersebut. Sebaliknya, terhadap kebudayaan suku bangsa lain mereka biasanya dapat melihat corak khas tersebut, terutama unsur-unsur kebudayaan yang berbeda mencolok dengan kebudayaannya sendiri.

Setiap suku-bangsa biasanya mempunyai corak khas yang menunjukkan identitasnya masing-masing, misalnya bahasa, pakaian dan lain se-

bagainya. Corak khas dari suatu kebudayaan ini bisa tampil karena menghasilkan suatu unsur yang lebih kecil, yang berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus atau karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus atau dapat juga dikarenakan warga suku bangsa tersebut menganut suatu tema kebudayaan yang khusus. Sebaliknya, corak khusus atau khas tadi dapat pula dikarenakan adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Jadi, di sini corak khusus itulah salah satu yang membedakan suatu kebudayaan suku-bangsa yang satu dengan kebudayaan suku-bangsa lainnya. Corak khas kebudayaan tertentu dalam etnografi disebut dengan istilah *ethnic group* (suku- bangsa). Dengan demikian, istilah suku-bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu. Kesadaran dan identitas yang dituangkan dalam kesatuan kebudayaan itu bukan suatu hal yang ditentukan oleh pihak luar, melainkan oleh warga masyarakat pemangku kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 1981). Namun demikian, pada kenyataannya konsep suku-bangsa itu lebih kompleks. Hal ini dikarenakan batas dari kesatuan manusia yang merasa dirinya terikat oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas atau menyempit, tergantung pada keadaan.

Menurut asal katanya, istilah "*ethnic group*" atau yang diterjemahkan dalam "suku-bangsa", berasal dari kata Yunani *eOvikos* yang artinya *heathen*, yaitu penyembah berhala, yaitu sebutan yang ditujukan bagi orang yang tidak ber-Tuhan menurut konsep orang Eropa yang beragama Nasrani. Dalam bahasa Yunani, istilah itu sendiri berasal dari akar kata *eOvos* ("*ethnos*") yang diterjemahkan sebagai *nation* atau bangsa, yaitu suatu istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dengan kata lain, menurut *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, ada dua pengertian yang terkandung dalam istilah *ethnic*, ialah (a) menunjuk pada bangsa-bangsa yang non Kristen atau non Yahudi dan (b) menunjuk pada bangsa-bangsa yang masih menyembah berhala (Poerwanto, 1996).

Dalam perkembangannya, istilah *ethnic* dikenal luas setelah dipakai secara resmi oleh suatu Ethnological Society, yaitu suatu lembaga yang didirikan di London pada tahun 1843. Lima tahun sebelumnya, di Paris juga terdapat lembaga serupa, yaitu Societe Ethnologique de Paris, dan di New York pada tahun 1942 juga memiliki lembaga sejenis di atas American Ethnological Society.

Schmerhorn (1970) memberikan batasan tentang pengertian *ethnic-group* yang menurutnya merupakan kolektiva dalam suatu masyarakat yang lebih luas, yang memiliki persamaan nenek moyang, baik secara nyata maupun semu, yang mempunyai pengalaman sejarah sama dan suatu kesamaan fokus



budaya yang terpusat pada unsur-unsur simbolik dalam bentuk yang melambangkan sebagai suatu "persamaan bangsa", misalnya persamaan ciri-ciri fenotipe, religi, bahasa, pola kekerabatan, nasionalitas, afiliasi kesukubangsaan, atau gabungan dari semua itu. Dengan demikian dapat difahami jika konsepsi suku-bangsa dapat menyempit, misalnya berdasarkan persamaan bahasa atau dialek; dan sebaliknya dapat pula melebar (Poerwanto, 1996).

Menurut Koentjaraningrat (1993) Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4, yang pada dasarnya dikatakan bahwa penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan suku-bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain, dan terjadi ketika kepulauan Nusantara menjadi bagian yang integral dalam perdagangan Asia. Bangsa Indonesia sudah lama terbentuk, yaitu setelah adanya Sumpah Pemuda dan dikuatkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi lama sebelum bangsa Indonesia itu terbentuk, di kepulauan Nusantara ini telah terdapat berbagai macam suku-bangsa (Koentjaraningrat, 1993).

Sebenarnya nasion-nasion pribumi di Indonesia pada mulanya sebagaian besar satu keturunan ras, yang kemudian berkembang dan menyebar di kepulauan ini menjadi kelompok-kelompok kecil. Oleh karena kondisi alam pada saat itu tidak memungkinkan mereka selalu saling berkomunikasi maka perkembangannya semakin jauh berbeda dan mendatangkan ciri khas tersendiri, baik bahasa maupun kebudayaan lainnya. Kelompok ini mempunyai kesatuan solidaritas tersendiri dan mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri. Kelompok ini juga sering disebut sebagai masyarakat daerah di Indonesia. Seperti tersebut di halaman terdahulu, suku-bangsa atau nasion pribumi mewujudkan ciri-ciri yang dianggap merupakan suatu identitas suku. Identitas seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, perasaan solidaritas antar anggota atau warga masyarakat atau suku-bangsa yang merupakan pembeda antara suku bangsa lainnya. Misalnya suku bangsa Batak mempunyai identitas atau ciri khas dengan sistem marganya, suku bangsa Minangkabau terdiri dari orang-orang yang terikat oleh kesatuan suku (Bachtar, 1976).

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari ratusan suku bangsa, ini merupakan kebanggaan tersendiri. Akan tetapi hal itu sekaligus juga mengandung kerawanan atau potensi konflik. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mendekati 200 juta jiwa memiliki suku-bangsa yang jumlahnya sulit diketahui secara pasti. Disamping itu, di kalangan para pakar juga masih terdapat perbedaan pandangan dalam mengklasifikasikan penduduk di Indonesia ke dalam konsep suku bangsa. Oleh karena ruang lingkup istilah suku-bangsa itu sendiri dapat mengembang atau menyempit, tergantung subyektivitas

(Poerwanto, 1993). Suatu suku-bangsa bisa terdiri dari beberapa sub suku-bangsa, di mana sewaktu-waktu sub suku- bangsa itu juga bisa disebut suku-bangsa tersendiri. Misalnya suku -bangsa Flores. Suku-bangsa ini terdiri dari beberapa sub suku- bangsa seperti orang Manggarai, orang Ngada, Sikka, Riung, Naga Keo, Ende, dan Larantuka. Semua itu disebut suku-bangsa Flores. Akan tetapi sub suku bangsa tersebut bisa berkembang atau disebut suku bangsa tersendiri. Mereka mempunyai solidaritas atau identitas sendiri. Walaupun demikian, kalau di luar wilayah (di luar pulau), mereka semua mengaku sebagai suku bangsa Flores (Koentjaraningrat, 1981). Menurut Sudomo (1976), pembentukan wilayah administrasi berdasarkan kesatuan ekonomi tidak perlu merusak kehidupan dan tata budaya suku-bangsa. Batas-batas wilayah administraf yang mencerminkan batas-batas kesuku-bangsaan merupakan peninggalan jaman Belanda, yang sengaja memisah-misahkan suku-suku-bangsa di Indonesia dan mengembangkan hukum adat untuk keperluan politiknya.

Memang pada masa dahulu di mana kondisi alam Indonesia belum memungkinkan komunikasi antar suku-suku bangsa itu. Hambatan fisik telah mempersulit komunikasi antarsuku-bangsa. Adanya hambatan tersebut itu mempermudah terbentuknya suku-bangsa baru. Konflik antarsuku-suku bangsa di Indonesia pada saat itu mudah terjadi konflik/disintegrasi, di mana suku-bangsa yang satu menyerang suku bangsa lainnya.

Suku-suku bangsa di Indonesia pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit pernah dicoba untuk disatukan/diintegrasikan menjadi satu bangsa. Dengan "Sumpah Palapa"-nya Maha Patih Gajah Mada mencoba menaklukan para raja kecil untuk bersatu menjadi satu bangsa. Ekspedisi seperti itu juga pernah dilakukan oleh Sultan Agung (Prisma, 1976).

Indonesia sebuah negara yang merdeka sejak 50 tahun yang lalu tentunya bukanlah negara Majapahit modern dan bukan pula Mataram masa kini. Memang di dalam kita menggelorakan rasa nasionalisme dengan mengadakan sumpah. Namun, sumpah yang diucapkan oleh para pemuda, anak-anak bangsa atas dasar rasa solidaritas antar berbagai lapisan yang meliputi seluruh rakyat dari berbagai suku-bangsa pada tahun 1928 telah memperkuat kesatuan dan persatuan, sehingga bangsa Indonesia bisa membebaskan diri dari belénggu penjajahan sampai sekarang.

Sebagai gambaran mengenai suku-bangsa yang ada di Indonesia, berikut ini disajikan tabel tentang distribusi dari berbagai macam suku-bangsa di Indonesia berdasarkan penelitian Hari Poerwanto (1996). Dalam tabel tersebut ditunjukkan adanya jumlah yang menonjol perbedaannya.

**Tabel II.1**  
**DISTRIBUSI SUKU-BANGSA DI INDONESIA**  
**PADA TAHUN 1974**

Suku-bangsa	Jumlah (n)	%
Jawa	55.000.000	45,8
Sunda	17.000.000	14,1
Madura	8.600.000	7,1
Minangkabau	4.000.000	3,3
Bugis dan Makasar	3.066.000	2,5
Batak	2.414.000	2,0
Bali	2.222.000	1,8
24 Suku-bangsa lainnya	24.448.000	20,3
Cina	3.250.000	2,7

Sumber: dari disertasi Hari Poerwanto, 1996

Dari tabel II.1 tersebut tampak adanya penyebaran suku-bangsa yang tidak merata. Terlihat adanya suku-bangsa yang memiliki jumlah sangat besar, yakni suku-bangsa Jawa, diikuti suku-bangsa Sunda dan 24 suku-bangsa lain yang ada di Indonesia.

Dewasa ini, sulit diketahui secara pasti distribusi jumlah dari masing-masing suku-bangsa. Sensus penduduk Indonesia yang dilakukan pada tahun 1961 dan dalam dasawarsa berikutnya, tidak mencantumkan items suku-bangsa. Mengingat hal tersebut, ada kesulitan untuk mengetahui secara pasti laju pertumbuhan penduduk berdasarkan suku-bangsa dan distribusi mereka (Poerwanto, 1994). Apalagi di kalangan para pakar masih terdapat perbedaan dalam mengartikan konsep suku-bangsa sehingga berapakah tepatnya masing-masing jumlah suku-bangsa di Indonesia, masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 300 suku-bangsa, dan ada pula yang mengatakan jauh lebih banyak dari jumlah tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku-bangsa dengan latar budaya yang berbeda telah berusaha berintegrasi sejak jaman dulu. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah kerajaan Majapahit, Sultan Agung, dan Sumpah Pemuda 1928. Meskipun demikian, disintegrasi akan mudah terjadi antarsuku-bangsa jika di antara mereka tidak saling mengerti dan memahami budaya lain.

## **B. SISTEM NILAI BUDAYA NASIONAL**

Dalam rangka membicarakan integrasi nasional di suatu negara yang multi-etnik seperti Indonesia, masalah integrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep sistem nilai budaya nasional yang berpangkal kepada sistem nilai budaya daerah. Gambaran tentang konsep sistem nilai budaya nasional sebenarnya merupakan salah satu dari wujud kebudayaan yang berupa wujud idiil dari kebudayaan yang berisi tentang gagasan, ide-ide, nilai-nilai, norma serta adat istiadat yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (1980) sistem nilai budaya merupakan bagian dari aspek gagasan kebudayaan. Dalam hubungannya dengan kebudayaan yang disebut dengan sistem nilai budaya adalah pandangan mengenai masalah paling berharga di dalam hidup. Oleh sebab itu disebut dengan sistem nilai sehingga dengan demikian semua tingkah laku maupun tindak tanduk seseorang tidak dapat terlepas dari sistem nilai budaya yang berlaku di mana ia hidup bermasyarakat.

Sebagai inti dari suatu kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu berupa adat istiadat, sistem norma, etika, aturan norma, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup, ideologi pribadinya, ideologi nasionalnya dan sebagainya. Sistem nilai budaya atau yang sering disebut dengan pandangan hidup atau ideologi itu merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai budaya atau konsep tersebut ada, dan hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang terwujud dalam hal-hal yang dianggapnya sangat berharga dan paling penting dalam hidupnya sehingga berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakatnya.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1987) mengatakan bahwa walaupun nilai-nilai budaya ini dapat berfungsi sebagai pedoman hidup manusia di dalam masyarakat, tetapi sebagai suatu nilai budaya itu bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas serta sulit untuk diterangkan secara rasional dan nyata. Akan tetapi justru karena sifatnya yang umum, luas serta tidak konkret itulah maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada di dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang bersangkutan. Sistem nilai budaya tersebut berada dalam alam pikiran masing-masing individu sehingga tidak dapat dilihat, maupun difoto oleh orang lain.

Di samping itu, individu pendukung suatu kebudayaan sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakatnya sehingga konsep tersebut sejak kecil telah berakar di dalam alam jiwanya. Itulah sebabnya

nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang relatif singkat. Apabila hendak mengubah salah satu nilai budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat maka paling tidak membutuhkan waktu antara satu hingga dua generasi. Hal seperti itu terjadi di dalam masyarakat yang tradisional maupun masyarakat modern. Pada masyarakat tersebut tentu terdapat sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu berfungsi sebagai pedoman serta memberi dorongan yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakatnya.

Berhubung sifatnya yang abstrak tersebut maka bagaimanakah isi sistem nilai budaya tersebut ? Menurut antropolog C. Kluckhohn seperti yang dikutip oleh Koentjaraningrat (1987), pada dasarnya sistem nilai budaya itu berisi nilai-nilai yang dianggap paling penting di dalam hidup manusia, dan secara universal nilai-nilai tersebut selalu ada di dalam setiap kebudayaan yang terdapat di dunia ini. Nilai-nilai yang dianggap paling berharga atau yang paling mendasar itu sedikitnya menyangkut kepada lima hal yaitu:

1. Masalah makna hidup manusia atau hakekat manusia dan hidup (MH).
2. Masalah makna dari pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia atau hakekat manusia dan karya (MK).
3. Pandangan manusia terhadap waktu atau hakekat manusia dengan waktu (MW).
4. Masalah hubungan manusia dengan alam sekitar (MA).
5. Masalah hubungan manusia dengan manusia (MM).

Jika dihubungkan dengan hakekat manusia dan hidup dari sistem nilai budaya daerah yang dimiliki oleh masing-masing suku-bangsa maka setiap suku bangsa cenderung mempunyai suatu nilai yang dijadikan sebagai pedoman atau pandangan hidup. Suatu nilai budaya yang dianggap tinggi oleh suatu suku-bangsa tertentu, belum tentu merupakan nilai yang paling tinggi pula oleh suku-bangsa yang lain. Sebagai contoh, masyarakat Jawa dalam memandang masalah hidup selalu berpegang kepada konsep "eling". Padahal di dalam masyarakat lain beranggapan bahwa hidup ini merupakan sumber kesenangan serta hal-hal yang indah dan bermakna, dan manusia wajib menjalaninya dengan kegairahan yang tinggi. Masyarakat Minangkabau misalnya, punya pedoman hidup "*rancak di urang, ketuju di awak*" yang artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari hendaknya seseorang selalu bertindak laku yang baik-baik agar orang lain menyenangkannya, dan ia pun juga akan menyenangi orang lain. Dengan kata lain, hidup menurut masyarakat Minangkabau harus didasari saling hormat-menghormati. Karena itu, ketika seorang Minangkabau "merantau" ia berusaha berwatak yang tegar, mandiri, dan mudah



menyesuaikan diri. Prinsip hidup di rantainya adalah *"di mana bumi dipijak, air disauk, ranting dipatah, di sana langit dijunjung, adat dipakai, lembaga dituang"* yang berarti bahwa di mana pun orang Minangkabau berada harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan alam dan masyarakat di sekelilingnya, dan hal inilah yang menjadi modal bagi perantau Minang di samping sifatnya yang egois dan ulet menjadikan orang Minangkabau tegar serta mandiri di daerah perantauan (Pariaman, 1984).

Suku-bangsa Bali misalnya, mempunyai falsafah *"Tat Twam Asi"*, artinya Dia adalah Engkau. Falsafah ini mengandung arti bahwa manusia hidup harus saling tolong-menolong dan bukan saling menyakiti. Karena itu, menolong orang lain adalah juga menolong diri sendiri. Segala pengorbanan harus berdasarkan cinta kasih yang ikhlas (Phartiana, 1984). Itulah di antara nilai-nilai yang dianggap paling berharga di dalam hidup suatu suku bangsa tertentu.

Dalam kaitannya antara manusia dengan alam, ada pula suatu kebudayaan yang memandang bahwa alam ini adalah segala sesuatu pemberian Tuhan sehingga manusia wajib mensyukurinya. Namun, ada pula kebudayaan yang mengajarkan kepada warganya bahwa alam ini sifatnya dashyat sehingga masyarakat harus bisa bersaing akhirnya dapat menundukkannya dan memanfaatkannya guna memenuhi keperluannya. Kebudayaan yang mengkonsepsikan seperti itu sangat menghargai perkembangan sains dan teknologi seperti halnya di masyarakat Barat.

Masalah hubungannya manusia dengan manusia sesamanya pada banyak kebudayaan mengajarkannya kepada warganya bahwa dalam hidup itu perlu saling bergotong royong, mengajarkan kepada warganya betapa pentingnya menghargai sesama manusia dan sebagainya. Kebudayaan-kebudayaan yang menerapkan konsensus orientasi budaya seperti itu sangat mementingkan prinsip kerjasama. Namun sebaliknya, ada kebudayaan yang menekankan kepada hak asasi setiap individu yang tidak boleh diganggu gugat sehingga orientasi budaya yang seperti itu sangat menekankan kepada kedudukan manusia didasarkan kepada mutu dari hasil karyanya dan tidak berdasarkan dari senioritas atau pangkat maupun golongan sosial yang tinggi.

Dari uraian di atas, kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah bentuk sistem nilai budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ? Jawabannya adalah sistem nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sistem nilai budaya nasional yang berdasarkan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yaitu suatu pandangan hidup, sistem norma ataupun sistem ideologi yang bersifat nasional yang telah diakui oleh seluruh suku-bangsa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 harus dapat dipahami dan diterima oleh seluruh warga negara Indonesia karena pada

dasarnya nilai-nilai budaya itu pun berasal dari nilai-nilai budaya daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Di samping itu, secara garis besar, sistem nilai budaya nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia didasarkan pula kepada satu kesatuan kebudayaan nasional, dan bukan berdasar kepada sistem nilai budaya daerah. Sistem nilai budaya nasional yang mengacu kepada kebudayaan nasional itu secara konkret terwujud dalam pola tingkah laku masyarakat Indonesia yang bertumpu kepada Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang dijabarkan melalui 36 butir itu, pada dasarnya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan nilai-nilai tersebut juga berasal dari nilai budaya daerah. Diharapkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia beserta perilakunya didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai budaya nasional bagi seluruh warga Indonesia, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila sering pula disebut dengan "nilai-nilai luhur bangsa". Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diketahui, bahkan setiap warga negara Indonesia dari kalangan apa pun dan dari lapisan mana pun insyaf dan sadar bahwa mereka mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan pula nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 selalu menjiwai setiap perilaku bangsa Indonesia.

Akan tetapi, di dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala ada kesulitan untuk dapat mewujudkan perilaku yang khas Indonesia itu. Sebab, bagaimana pun juga sifat-sifat khas kedaerahan lebih sering muncul, dan sistem nilai budaya yang digunakan adalah sistem nilai budaya daerah. Hal seperti itu sebenarnya boleh saja, asalkan mereka dapat menempatkan diri dan mengerti saat-saat kapan ia harus berperilaku kedaerahan, dan saat kapan seseorang harus berperilaku secara nasional yang berdasarkan sistem nilai budaya nasional. Sistem nilai budaya nasional atau yang sering disebut dengan nilai-nilai luhur bangsa itu antara lain terdiri dari nilai taqwa, musyawarah, gotong royong, tertib, disiplin, tenggang rasa, setia kawan, kerja keras dan sebagainya. Kesemua nilai-nilai tersebut sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di Indonesia sejak dahulu. Misalnya, nilai gotong royong, konsep ini pada umumnya merupakan nilai yang dianggap penting dalam setiap kebudayaan suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Bahkan, konsep gotong royong erat kaitannya dengan kebudayaan petani dalam masyarakat agrarian di hampir semua suku di Indonesia, walaupun di masing-masing daerah digunakan istilah yang berlainan. Di dalam perjuangan melawan penjajahan Jepang, konsep gotong royong digunakan oleh para pemimpin pejuang bangsa untuk memperkuat rasa solidaritas dan identitas bangsa. Sesudah kemerdekaan secara nyata tercapai

dalam tahun 1950-an, konsep dan istilah gotong royong menjadi unsur penting dalam ideologi negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan integrasi, sistem nilai budaya nasional yang terdiri dari unsur nilai budaya yang seluruhnya sudah terangkum dalam Pancasila dan UUD 45 merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Nilai budaya nasional ini menjadi pedoman atau kerangka acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun kelompok tertentu.

### **C. KEBUDAYAAN DAERAH**

Menurut Takahashi (1989) kebudayaan merupakan sub kategori peradaban, jadi berbicara tentang keunikan-keunikannya atau model-model bangunan yang berdiri di atasnya fondasi kemanusiaan atau peradaban. Menurut Ruth Benedict, kebudayaan menunjukkan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu yang terungkap dalam aktivitas. Sehingga pada hakekatnya kebudayaan itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ashley Montagu ialah "way of life", yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pula dari suatu bangsa (Hans J. Daeng, 1993).

Menurut Nat J. Colletta dan Umar Kayam (1987) kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat dalam suatu daerah tertentu untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana yang pada intinya adalah proses terus menerus menyimak kadar dinamika dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1974) kebudayaan dalam salah satu artinya (arti sempit) adalah kesenian dalam arti luas, yaitu seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan karena itu hanya dapat dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep ini meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tiap kebudayaan mempunyai paling sedikit 3 wujud, yaitu (Koentjaraningrat, 1974):

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu himpunan gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, dan ide-ide.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai jumlah perilaku yang berpola.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai sekumpulan benda dan artifacts.

Dan menurut Soerjanto Poespowardoyo (1989) kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk kehidupan manusiawi yang lebih baik.

Kalau berbicara tentang kebudayaan, sebenarnya juga bicara tentang pola-pola, cita-cita nilai-nilai, kepercayaan dan lain sebagainya. Kebudayaan itu merupakan milik dan pedoman bagi manusia dalam berpikir, bertindak laku, dan berkarya pada kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan pedoman hidup manusia. Oleh sebab itu, kebudayaan menjadi standar dalam bertindak laku setiap warga suatu masyarakat. Dengan melihat kebudayaan seseorang dapat meramalkan, mengharapkan atau bahkan mengoreksi perbuatan-perbuatannya. Sehubungan dengan hal itu, orang juga dapat menentukan perbuatannya sendiri yang sesuai dengan pranata yang ada.

Kelonggaran-kelonggaran yang umumnya terdapat dalam setiap kebudayaan membuat kebudayaan itu sendiri bersifat lentur atau "luwes". Hal ini tentunya memungkinkan adanya suatu perubahan-perubahan pada kebudayaan itu, baik perubahan itu berjalan secara cepat maupun lambat. Adanya perubahan-perubahan inilah yang membuat kebudayaan tidak dikatakan statis, namun dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat pemangkunya. Perubahan-perubahan dapat terjadi disebabkan oleh adanya faktor-faktor internal maupun eksternal. Oleh karena seringnya mengadakan kontak dan komunikasi dengan kebudayaan lain, maka kebudayaan di suatu masyarakat dapat mengalami perubahan. Sebaliknya bagi masyarakat yang tertutup dan terpencil akan lebih konservatif karena kebudayaannya berkembang dengan relatif lambat. Walaupun demikian, sesungguhnya suatu kebudayaan tanpa adanya pengaruh dari luar pun akan selalu mengalami perubahan (meski jangka waktunya sangat lambat), sebab bagaimana pun suatu kebudayaan itu tetap bersifat dinamis. Hal itu dikarenakan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu ada kelonggaran-kelonggaran bagi warganya untuk bertindak laku di luar pola yang ada atau melakukan variasi-variasi tertentu yang masih berada pada batas toleransi budaya tersebut. Seandainya pola tingkah laku yang ada di luar atau variasi itu akhirnya diterima oleh masyarakat maka dinamika perubahan kebudayaan itu telah mulai terjadi.

Kebudayaan juga dapat berubah karena adanya beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi, dengan derajat adaptasi tertentu (Moertjipto, 1995). Akan tetapi pada perkembangannya tidaklah semua kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu dapat terus bertahan hidup. Oleh karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat sebagai pemangku kebudayaan itu maka nilai-nilai yang ada di dalamnya pun bisa mengalami pergeseran-pergeseran. Apabila suatu kebudayaan dianggap baik oleh masyarakat pemangkunya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, maka akan tetap dipertahankan.

Kebudayaan sebagai suatu proses tentunya tidak akan mengenal titik henti, namun selalu berproses sepanjang masa sejauh dinamika potensi kodrati yang berujud cipta, rasa, dan karsa masih melekat pada diri manusia (Suratman, 1993). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kartodirdjo, bahwa bila suatu kebudayaan ingin tetap bisa bertahan, maka harus dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat pemangkunya, harus dinamis. Kebudayaan tersebut harus berani berkompetisi dengan kebudayaan lain. Dengan demikian, walaupun kebudayaan itu sudah dapat dikatakan sebagai puncak, bukan berarti berhenti berkembang. Oleh karena kebudayaan itu harus selalu berkembang seiring dengan perkembangan atau kemajuan sosial ekonomi masyarakat pendukungnya (Moertjipto, 1995).

Menurut Budhisantoso (1993) kebudayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kategori kebudayaan, yaitu: 1) kebudayaan-kebudayaan suku-bangsa, kebudayaan-kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional. Masing-masing kelompok kebudayaan ini mempunyai fungsi dan lingkungan penggunaannya yang efektif sebagai kerangka acuan yang memperlancar pergaulan sesama anggota kelompok sosial dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial dan menikmati hak-haknya secara tertib dan efektif serta mengembangkan kreativitas mereka.

Berdasarkan 3 kategori tersebut, kebudayaan daerah adalah salah satu dari tiga kategori kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan dalam kaitannya dengan konteks diatas, kebudayaan daerah menjadi kerangka acuan bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu. Contoh kebudayaan daerah: kebudayaan Jawa, kebudayaan Batak, Minangkabau, Flores, Mlnahasa, Dayak, dan lain sebagainya.

Kebudayaan daerah ini diangkat dari kebudayaan suku-bangsa yang paling dominan di suatu daerah. Pada umumnya, daerah tersebut merupakan tempat bermukim berbagai macam suku-bangsa. Dengan kata lain, kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang dominan dari suatu daerah yang masyarakatnya majemuk.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari banyaknya suku-bangsa yang tersebar di wilayah Nusantara ini. Menurut perkiraan terakhir, terdapat kurang lebih 500 suku-bangsa yang mengembangkan kebudayaan masing-masing secara mandiri. Diantara suku-bangsa- suku-bangsa yang tersebar tersebut ada yang memiliki jumlah anggota besar, seperti suku-bangsa Jawa yang paling dominan dari seluruh penduduk Indonesia, dan ada yang jumlah anggotanya hanya beberapa ribu saja (Poerwanto; 1996).

Setiap suku-bangsa mengembangkan kebudayaannya masing-masing sebagai kerangka acuan dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya, dan ini

dikenal dengan nama kebudayaan suku-bangsa. Kebudayaan-kebudayaan suku-bangsa itu hingga kini masih berfungsi sebagai kerangka acuan bagi para pendukungnya dan ditanamkan pada generasi penerus/muda lewat pendidikan dalam keluarga. Oleh karena itu, kebudayaan suku-bangsa pada umumnya masih berfungsi dan terpelihara dalam lingkungan kerabat.

Sementara itu, kebudayaan daerah berasal dari kebudayaan suku-bangsa yang paling dominan. Suku-bangsa yang dikatakan paling dominan ini dapat terbentuk karena: jumlahnya paling banyak, dapat karena kebudayaan tersebut telah mapan, atau dapat karena anggota-anggota dalam suku-bangsa tersebut banyak yang menduduki peran-peran penting baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Biasanya kebudayaan daerah itu berkembang sebagai hasil perpaduan kebudayaan-kebudayaan suku-bangsa dari masyarakat majemuk yang menduduki suatu wilayah pemukiman bersama. Tidak jarang perkembangan kebudayaan suatu daerah itu diwamai atau didominasi oleh salah satu kebudayaan suku-bangsa yang mempunyai jumlah pendukung paling banyak, atau karena kebetulan telah mapan perkembangannya, atau karena telah merupakan kebudayaan dari golongan masyarakat yang menguasai sumber-sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Godlif Sianipin (1993) kebudayaan daerah itu dapat menjadi sumber pembentukan kebudayaan nasional, namun tidak semua.

Hanya kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai budaya yang dapat menjadi kerangka acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan asal-usul daerah maupun suku bangsa yang dapat diangkat dalam kebudayaan nasional.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1987) segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru diangkat sebagai kebudayaan nasional. Dengan kata lain, kebudayaan daerah yang memiliki puncak-puncak budaya daerah diangkat sebagai kebudayaan bangsa/kebudayaan nasional. Dan hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 32 yang diantaranya berbunyi :

"Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya, kebudayaan-kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. ....".

Dari pembahasan tentang konsep-konsep kebudayaan daerah nampak ada semacam keterkaitan antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan suku-

bangsa dan kebudayaan nasional. Dalam kaitannya dengan kebudayaan suku-bangsa, kebudayaan daerah dapat diangkat dari salah satu kebudayaan suku-bangsa yang paling dominan di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan kebudayaan nasional, puncak-puncak kebudayaan daerah dapat diangkat ke dalam kebudayaan nasional. Sehubungan dengan itu, perlu diuraikan sekilas tentang kebudayaan suku-bangsa dan kebudayaan nasional

Kebudayaan suku-bangsa adalah kebudayaan yang terbentuk dan berada dalam lingkup kekerabatan saja. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang multietnik ini memiliki keanekaragaman suku-bangsa dengan anekaragam kebudayaannya.

Pemah dilakukan pengklasifikasian aneka ragam suku-bangsa ini ke dalam 19 sistem lingkaran hukum adat. Hal ini dilakukan oleh C. Van Vollenhoven berdasar konsep pemikiran dari Clark Wissler (1887-1947) yang membagi kebudayaan di Amerika ke dalam culture area, dan juga konsep kebudayaan dari Hindia Belanda yang berdasarkan "geographische provinz atau cultuur propincie", yaitu klasifikasi ke dalam suatu golongan dari berpuluh-puluh kebudayaan yang satu dengan lainnya berbeda berdasarkan atas persamaan dari sejumlah ciri-ciri yang menyolok dalam kebudayaan tersebut (Poerwanto, 1996). Ke 19 lingkaran hukum adat ini adalah:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Aceh                | 10. Toraja                     |
| 2. Gayo-Alas dan Batak | 11. Sulawesi Selatan           |
| 2a. Nias dan Batu      | 12. Temate                     |
| 3. Minangkabau         | 13. Ambon-Maluku               |
| 4. Sumatra Selatan     | 13a. Kepulauan Baratdaya       |
| 4a. Enggano            | 14. Irian                      |
| 5. Melayu              | 15. Timor                      |
| 6. Bangka dan Biliton  | 16. Bali dan Lombok            |
| 7. Kalimantan          | 17. Jawa Tengah dan Jawa Timur |
| 8. Sangir Talaut       | 18. Surakarta dan Yogyakarta   |
| 9. Gorontalo           | 19. Jawa Barat                 |

Ternyata, klasifikasi kebudayaan ke dalam satu daerah hukum adat ini sering kali masih kurang tajam. Sebagai contoh kebudayaan Irian, yang menurut hasil penelitian sebenarnya masih dibagi lagi ke dalam 20 daerah kebudayaan. Selain itu, ada pula yang mengklasifikasikan kebudayaan suku-bangsa kedalam aktivitas matapencaharian, dan berdasar pada keturunan.

Sementara itu, kebudayaan nasional muncul mengingat Indonesia ini merupakan negara yang majemuk dalam hal suku-bangsa. Dan oleh karenanya, pemerintah melalui amanatnya yang tertuang dalam UUD 45 pasal 32 membentuk kebudayaan nasional tersebut. Kehadiran kebudayaan nasional ini



dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai kerangka acuan dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan kelompok tertentu. Disamping itu, karena pengaruh kebudayaan suku-bangsa dan kebudayaan daerah terbatas lingkupnya dimasing-masing di lingkungan kerabat maupun daerah tertentu maka kehadiran kebudayaan nasional dengan mudah memenuhi kekosongan akan kerangka acuan nasional setelah mengusir kebudayaan kolonial yang semula diberlakukan di seluruh daerah jajahan.

Menurut Budhisantoso (1985) sebagai satu masyarakat bangsa yang majemuk, Indonesia memerlukan ciri pengenal yang bersifat nasional yang dapat dibanggakan dan membedakan dirinya dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ciri pengenal ini juga akan dapat membina kepribadian bangsa yang kuat dalam pergaulan antarbangsa dalam kedudukan yang sejajar. Disamping itu, pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah akan mewujudkan kesamaan nilai, perasaan, dan moral yang menjiwai sikap dan pola tingkah laku masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa. Sementara itu, kesatuan sistem lambang yang berwujud bahasa nasional perlu dikembangkan untuk menjamin pergaulan sosial antar sesama anggota masyarakat Indonesia dengan memperkecil ketegangan maupun pertentangan sosial yang mungkin timbul karena kesalahfahaman. Sebaliknya, dengan keseragaman bahasa akan terbina kesetiakawanan yang dilandasi saling pengertian dalam mencapai cita-cita bersama sebagai satu masyarakat majemuk yang mendukung kebudayaan nasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kebudayaan nasional Indonesia harus dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wawasan Nusantara: keberagaman kebudayaan daerah perlu diperhatikan pelestariannya sebagai landasan yang memperkaya dan mewarnai kebudayaan nasional Indonesia. Keberagaman dan keseragaman kebudayaan daerah perlu diperkenalkan dalam mempercepat proses pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada masyarakat pendukungnya. Dalam kaitannya dengan hal ini perlu digali ethos dan konfigurasi budaya daerah untuk ditawarkan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memperkembangkan kebudayaan nasional.
- b. Pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan kebudayaan nasional melalui pendidikan budaya bangsa perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal dengan mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan dalam arti luas.

Dari pendapat Budhisantoso ini tampak bahwa terdapat keterkaitan antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional Indonesia, yang mana kebudayaan daerah memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan kebudayaan nasional.

#### **D. INTEGRASI NASIONAL**

Secara etimologi, integrasi berasal dari kata latin *integrare* yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata kerja itu dibentuk kata benda *integritas* yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata-kata *integritas* dibentuk kata sifat *integer*, artinya utuh. Oleh sebab itu, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (Hendropuspito, 1989). Sama halnya yang terjadi di negara Indonesia yang kaya berbagai suku bangsa dengan ciri khas kebudayaannya masing-masing. Jadi integrasi dapat terwujud apabila masing-masing unsur tertentu dari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (Hendropuspita, 1989).

Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia, tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang dibangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Kodrat keanekaragaman kehidupan itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam satu kesatuan bangsa, dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia (Mattulada, 1985).

Bagi negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Indonesia, konsep integrasi sering digunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan yang disebut dengan wawasan nusantara. Adanya beberapa suku-bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di satu pihak merupakan kebangsaan tersendiri karena memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi harganya. Namun, di sisi lain dengan banyaknya jumlah suku-bangsa yang ada merupakan sumber timbulnya konflik.

Menurut Widjaja (1986) integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem, dan bukan penyeragaman, namun merupakan hubungan satuan-satuan yang sedemikian rupa serta tidak merugikan masing-masing satuan. Yang baik saling mendukung satuan serta masih memiliki identitas masing-masing dan saling menguntungkan. Apabila konsep integrasi yang dikemukakan oleh Widjaja digunakan untuk mewujudkan integrasi nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia maka masing-masing satuan kebudayaan daerah itu harus hidup dan berkembang serta saling mendukung dan mengisi demi terwujudnya kebudayaan nasional.

Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan nasional itu sendiri adalah konfigurasi dari puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga tampak adanya suatu gagasan dan pralambang yang dapat memberi identitas kepada setiap warga negara Indonesia. Di samping itu dengan adanya kebudayaan nasional maka semua warga negara Indonesia dapat saling berkomunikasi dan memperkuat solidaritas (Koentjaraningrat, 1985). Adapun unsur-unsur kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai pralambang yang digunakan oleh semua warga Indonesia harus mempunyai ketentuan yang antara lain harus bercirikan khas Indonesia sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain di dunia.

Sementara itu batasan integrasi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1982) menyebutkan bahwa integrasi mencakup aneka warna kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang antara lain mencakup masalah merubah prasangka etnis atau stereotipe etnik antara warga suku bangsa yang berlainan yang di dalam persaingannya mengejar kesempatan bekerja serta pendidikan yang terbatas sehingga dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Jadi, titik berat masalah integrasi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat adalah penekanan terhadap masalah stereotipe etnik yang negatif yang dirasakan dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional. Prasangka sosial yang bersifat negatif ini akan semakin nyata dan dirasakan apabila masing-masing individu saling berinteraksi.

Secara konsepsional integrasi merupakan pengendalian seseorang terhadap konflik dan penyimpangan dalam tatanan sosial (Soekanto, 1983), di mana sistem tersebut muncul melalui tahap atau proses sosial yaitu adanya keteraturan dan saling ketergantungan tingkah laku yang terkoordinir dalam suatu kelompok sosial.

Tahap-tahap integrasi biasanya terjadi melalui beberapa aktivitas sosial, ekonomi dan budaya sehingga berlangsung kontak-kontak sosial dan integrasi yang akan melahirkan keteraturan-keteraturan tingkah laku dalam suatu hubungan yang dikehendaki bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa integrasi merupakan suatu ikatan yang berdasarkan norma atau aturan yang merupakan faktor pengatur tingkah laku anggota masyarakat dan menuntut seseorang bertingkah laku.

Proses integrasi berawal dari adanya kesempatan seseorang untuk berhubungan atau berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat melakukan kontak dengan pikiran orang lain, dan umumnya diakhiri dengan terbentuknya norma-norma kelompok yang baru. Antara dua titik temu itu sudah pasti terdapat aktivitas- aktivitas sosial-ekonomi dan budaya lewat kegiatan di mana berlangsung kontak sosial atau interaksi.

Seperti yang telah dikemukakan di depan, unsur- unsur yang terdapat di dalam setiap kebudayaan daerah itu terangkum di dalam suatu sistem nilai budaya antara lain berupa nilai moral, religi, sosial, ekonomi, pengetahuan maupun nilai seni. Masing-masing satuan unsur budaya tersebut terdapat di dalam kebudayaan daerah yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Nilai-nilai tersebut termasuk nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimiliki oleh hampir setiap suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, adanya persamaan unsur- unsur budaya tidak menjadikan masalah dalam mewujudkan integrasi nasional. Sekarang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyatukan unsur-unsur yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa tersebut. Untuk itu agar dapat mewujudkan integrasi nasional diperlukan adanya unsur-unsur pendukung yang dapat diterima oleh setiap suku bangsa yang ada. Unsur-unsur pendukung tersebut dapat melalui pembinaan kesadaran nasional, perwujudan keadilan sosial, adanya pengawasan sosial, adanya tekanan dari luar, bahasa kesatuan, lambang kesatuan dan sebagainya (Hendropuspito, 1989).

Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-bangsa sangat beruntung mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928. Hingga kini, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa persatuan oleh seluruh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia asli dengan cirinya tersendiri, dan berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Riau. Tercapainya kesepakatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukan sesuatu yang dipahami dan diinterpretasikan secara sederhana. Kesepakatan itu mempunyai nilai hakiki menuju kesatuan bangsa yang benar-benar utuh dan murni. Kesepakatan tersebut tidak boleh diartikan bahwa bahasa-bahasa daerah harus dihapuskan karena eksistensi dan pemeliharaan bahasa-bahasa daerah tersebut dijamin sepenuhnya di dalam UUD 1945 (Ridwan, 1989).

Oleh sebab itu gagasan ataupun ide yang dikemukakan oleh para pemuda pada saat itu (1928) yang telah memikirkan masalah penyatuan bahasa yang digunakan oleh seluruh suku bangsa harus dihargai dan dihormati. Gambaran integrasi nasional pun secara tidak langsung juga telah dilakukan oleh para pemuda pencetus Sumpah Pemuda 1928. Pemimpin maupun pemuda yang hadir pada saat itu adalah wakil-wakil pemuda dari berbagai suku-bangsa, seperti Jong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon dan sebagainya. Jadi, dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimaksudkan untuk peningkatan rasa solidaritas nasional dalam rangka

pembinaan hubungan yang erat serta untuk mencegah timbulnya konflik yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional.

Konflik-konflik yang sering timbul sehubungan dengan masalah integrasi dapat dihindarkan apabila di dalam masing-masing jiwa individu bangsa Indonesia tertanam adanya suatu "nasion Indonesia". Yaitu adanya rasa kesatuan solidaritas untuk ingin bersatu menjadi bangsa Indonesia yang tidak memandang adanya perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, geografis maupun batas-batas alamiah tertentu (Widjaja, 1985).

Nasion dianggap sebagai suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat oleh sejarah di masa lampau dan yang bersedia dibuat di masa yang akan datang. Nasion dianggap mempunyai suatu masa lampau yang melanjutkan dirinya dalam masa kini oleh suatu kenyataan yang jelas, kesepatan, keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk terus hidup bersama. Jadi, anggota nasion Indonesia adalah orang yang menganggap dirinya sebagai orang Indonesia dalam arti yang sesungguhnya, baik jiwa maupun raganya. Mereka benar-benar meresapi dan menghayati bahwa ia benar-benar manusia Indonesia sehingga segala sesuatu yang ingin menjatuhkan nama bangsa dan negara dengan tulus ikhlas akan membela dan mempertahankannya.

Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa nasion Indonesia telah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk karena solidaritas tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban warga negara seperti yang dinyatakan oleh undang-undang yang berlaku. Orang-orang yang bersama yang merupakan warga negara RI tidak sepenuhnya sama dengan orang-orang yang bersama-sama merupakan anggota nasion Indonesia (Bachtiar, 1976).

Sehubungan dengan hal tersebut yang diinginkan dalam integrasi nasional adalah adanya kekuatan batiniah yang menggerakkan seseorang untuk ingin hidup bersatu serta adanya kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Untuk dapat mewujudkan integrasi nasional yang tangguh seperti yang diinginkan maka di dalam kehidupan sehari-hari harus sering mengadakan interaksi sosial di antara sesama warga yang berlainan suku, agama maupun kebudayaannya. Akan tetapi, sebagai konsekwensinya sering muncul gambaran subyektif mengenai suku bangsa lain.

Dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu, seringkali dijumpai gambaran subyektif mengenai suku bangsa lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Akan tetapi tidak selamanya gambaran subyektif atau stereotipe etnik ini selalu merupakan gambaran yang negatif saja, melainkan ada kalanya berupa stereotipe etnik yang positif. Namun, dalam kenyataannya justru

stereotipe etnik yang negatiflah yang sering muncul dan hal ini yang akan menghambat terwujudnya integrasi nasional.

Problematika masyarakat majemuk seperti Indonesia merupakan konsekuensi dari perkembangan dan interaksi yang timbul. Menurut Mangkubumi (1989), konsekuensi ini dapat direfleksikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Harus ada nilai yang dianut oleh masyarakat yang menginginkan agar integrasi dapat diwujudkan karena konflik yang timbul sering diakibatkan oleh adanya perbedaan pada sistem nilai para penganutnya yang dapat mempengaruhi sikap dan persepsi setiap orang dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah, baik yang sudah lewat maupun yang akan dihadapi.
2. Karena terdiri dari berbagai suku bangsa, maka problematika yang muncul adalah sulitnya untuk menyatukan pendapat karena masing-masing manusia dipengaruhi oleh sistem nilai budaya daerahnya.
3. Sulitnya untuk menumbuhkan solidaritas sehingga akan mempersulit untuk mengembangkan kerjasama.

Menurut Koentjaraningrat (1993) satu-satunya yang dapat membantu memecahkan suatu permasalahan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya, konflik antar suku-bangsa merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti Indonesia ini. Konflik-konflik ini biasanya bersumber pada:

1. Adanya perbedaan sumber penghidupan/matapencaharian.
2. Adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa yang lain.
3. Adanya fanatisme.
4. Adanya salah satu suku-bangsa yang ingin mendominasi.
5. Adanya hubungan antara suku-suku bangsa yang sudah bermusuhan secara adat.

Namun demikian, ada unsur-unsur yang dapat menyatukan, yakni:

1. Jika warga suku-bangsa yang berbeda dapat saling bekerjasama secara sosial, ekonomi, dan politik.
2. Jika warga dari dua suku-bangsa yang berbeda dapat hidup berdampingan, tanpa konflik.

Kedua unsur inilah yang menurut Koentjaraningrat dapat membantu mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Disamping itu, diperlukan unsur pendukung lainnya yang antara lain berupa : pembinaan kesadaran nasional, perwujudan keadilan sosial dan prinsip solidaritas, adanya pengawasan sosial yang intensip, adanya lambang persatuan, bahasa persatuan dan tekanan dari luar.

Sementara itu, Agustin Suryaman (1990) mengatakan bahwa integrasi merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial. Dan menurutnya, integrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni: integrasi sosial dan integrasi interpersonal. Integrasi sosial dapat tercapai melalui aktivitas sosial-ekonomi-budaya dan integrasi interpersonal dapat tercapai melalui komunikasi antar person sehingga titik awal dari proses integrasi adalah terjadi kontak dengan kelompok masyarakat secara individual dan proses inilah yang merupakan jalan menuju tercapainya integrasi sosial dan integrasi budaya.

Lebih lanjut Agustin Suryaman (1990) mengatakan bahwa integrasi interpersonal dimulai dengan adanya komunikasi, sehingga individu-individu antar kelompok dapat mengadakan kontak-kontak langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi secara timbal balik melalui komunikasi dengan kontak langsung atau individual. Di dalam integrasi sosial terkandung makna adanya proses saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat melalui berbagai aktivitas di dalam situasi sosial tertentu. Proses integrasi yang dinamis melalui aktivitas sosial-ekonomi-budaya antar kelompok masyarakat menentukan jalannya proses integrasi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi antarkelompok masyarakat adalah:

1. Komunikasi. Adanya komunikasi akan membuka kontak-kontak sosial yang merupakan proses saling mempengaruhi sehingga salah satu jalan menuju integrasi antara lain berupa faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.
2. Solidaritas kelompok. Faktor ini merupakan bentuk interaksi sosial yang intensip serta membentuk struktur dan norma-norma kelompok, mengatur interaksi dan kegiatan kelompok dalam merealisasikan tujuan bersama serta menumbuhkan solidaritas antarkelompok masyarakat.
3. Budaya dan agama. Melalui nilai-nilai budaya dan norma agama diharapkan dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap masyarakat. Di sini, integrasi dipengaruhi oleh unsur subyektif berupa perasaan dan pikiran terhadap kelompok lain yang wujud idealnya membuat kelompok budaya tertentu tidak suka terhadap kelompok budaya lain karena tingkah laku sosial yang berbeda. Kecuali ditentukan oleh unsur tersebut maka integrasi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan perbedaan bahasa.
4. Daya tampung sosial setiap kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, ketrampilan, kebutuhan, dan aspirasi tidak selalu sama atau mempunyai proses integrasi untuk mewujudkan integrasi sosial-budaya.



## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. SUKU BANGSA “ASAL”**

Gambaran umum tentang keberadaan suku-bangsa "asal" dapat dilihat dari variasi jumlah pendukungnya, atau dari variasi hasil adaptasi budayanya, apakah sebagai kelompok dominan (demografis, politik, dan budaya lokal) atau bukan. Diantara kelompok ini kemungkinan ada yang termasuk kategori "masyarakat terasing" dengan berbagai kategori pula. Yang dinamakan suku-bangsa "asal" di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (termasuk daerah penelitian: Desa Caturtunggal) adalah "suku-bangsa Jawa". Seperti diketahui bahwa masyarakat Yogyakarta (termasuk daerah penelitian: Desa Caturtunggal) adalah masyarakat Jawa. Disamping karena letaknya (secara geografis) di Pulau Jawa, juga karena suku-bangsanya adalah suku Jawa. Dari pengklasifikasian tentang suku-bangsa, suku-bangsa Jawa ini memiliki jumlah yang paling banyak di Indonesia, dan sebagian besar tinggal di Pulau Jawa (Poerwanto, 1996).

Dilihat dari segi demografis, penduduk di Desa Caturtunggal mayoritas suku-bangsa Jawa. Menurut informasi dari pejabat setempat, lebih dari separo penduduk Desa Caturtunggal adalah suku-bangsa Jawa atau lebih dikenal dengan nama "orang Jawa". Adapun jumlah penduduk Desa Caturtunggal secara keseluruhan berjumlah 47.411 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 25.153 jiwa, dan perempuan 22.258 jiwa (monografi Desa Caturtunggal, 1994).

Jika dilihat dari tempat kelahiran/asalnya, penduduk suku-bangsa Jawa yang menetap di Desa Caturtunggal ini tidak seluruhnya kelahiran desa tersebut. Sebagian besar penduduk suku-bangsa Jawa yang mengaku sebagai penduduk setempat tersebut adalah berasal dari luar Desa Caturtunggal, namun masih dalam satu propinsi.

Keberadaan mereka di Desa Caturtunggal disebabkan oleh berbagai macam alasan, antara lain: alasan pekerjaan, pendidikan, ikut keluarga, perkawinan, dan karena sebagai tempat kelahirannya. Bagi mereka yang memiliki alasan bukan karena sebagai tempat kelahirannya, atau karena mengikuti suami; tempat tinggal/rumah yang mereka diami diperoleh dengan cara membeli tanah. Menurut pengakuan mereka, tanah yang mereka diami pada awalnya ada yang berupa tanah sawah, namun ada pula yang berupa tanah pekarangan. Bila diamati dilapangan, terlihat tinggal sebagian kecil saja tanah yang dimanfaatkan sebagai tanah sawah dan ladang/pekarangan; sebagian besar sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan rumah tempat

tinggal. Keberadaan mereka di Desa Caturtunggal ini tentunya didorong pula oleh berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga mereka sampai memutuskan untuk menetap dan mengaku sebagai suku-bangsa asal di daerah tersebut.

Dilihat dari matapencaharian hidupnya, sebagian besar penduduk di Desa Caturtunggal ini memiliki pekerjaan sebagai pegawai dan wiraswasta/dagang, hanya sebagian kecil saja mereka yang memiliki matapencaharian sebagai petani (567 kepala keluarga). Jika diban-ding dengan jumlah kepala keluarga yang sebesar 10.110 orang maka hanya sekitar 5% yang berstatus sebagai petani.

Desa Caturtunggal merupakan daerah perkotaan, bukan seperti desa-desa lainnya yang ada di wilayah kabupaten Sleman yang sebagian besar masih merupakan daerah pedesaan yang diwarnai oleh sawah-sawah pertanian yang luas. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Kodiran (1979) bahwa pada umumnya masyarakat Jawa yang tinggal di perkotaan memiliki matapencaharian hidup sebagai pegawai atau pedagang, dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan sebagian besar sebagai petani.

Dilihat dari segi pendidikan, cukup banyak penduduk Desa Caturtunggal yang telah mengenyam pendidikan ditingkat perguruan tinggi, terdapat sekitar 25%. Sementara itu, penduduk yang dinyatakan buta aksara tidak ada. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di Desa Caturtunggal ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah maju.

Dari segi politik, suku-bangsa Jawa di Desa Caturtunggal ini dapat dikatakan pula sebagai suku-bangsa yang "dominan". Hal ini dapat dilihat dari orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan Desa Caturtunggal atau yang lebih dikenal sebagai "perangkat desa", semuanya adalah suku-bangsa Jawa/masyarakat Jawa. Bahkan dari pengakuan mereka, semua (32 orang) perangkat desa ini disamping semuanya harus orang Jawa, juga sebagai penduduk asli di Desa Caturtunggal tersebut. Disamping itu, pada umumnya diantara perangkat desa ini sudah saling kenal mengenal, bahkan ada yang masih dalam satu lingkungan kekerabatan.

Suku-bangsa Jawa yang tinggal di Desa Caturtunggal ini dikatakan dominan pula dari segi budaya lokalnya, yaitu "kebudayaan Jawa ". Seperti suku-bangsa Jawa lainnya yang tinggal di seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, suku-bangsa Jawa di Desa Caturtunggal ini relatif kuat menjunjung tinggi kebudayaan Jawa. Secara luas, daerah penelitian (Desa Caturtunggal) termasuk salah satu daerah yang secara kolektif dapat dikatakan sebagai daerah kejawen. Di samping itu, daerah ini merupakan bekas kerajaan Mataram yang

sebelum pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta tahun 1755 menjadi pusat dari kebudayaan Jawa (Kodiran, 1993).

Walaupun terdapat variasi dan perbedaan yang bersifat lokal, seperti tampak pada dialek lokal, namun variasi-variasi dan perbedaan itu tidaklah begitu besar, dan secara umum masih memperlihatkan satu pola kebudayaan Jawa. Bahasa Jawa masih merupakan bahasa sehari-hari di desa tersebut. Dalam bertutur kata dengan bahasa Jawa, seseorang dituntut untuk memperhatikan dan membedakan status seseorang yang diajak bicara, misalnya berdasarkan usia ataupun status sosialnya.

Berdasarkan pendapat Geertz (1982), dalam masyarakat Jawa terdapat dua kaidah yang sangat menentukan pergaulan, yaitu dalam setiap keadaan, manusia dituntut bersikap demikian rupa sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik, dan menuntut supaya manusia dalam berkata dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajad dan kedudukannya. Tampaknya hal ini selaras dengan pendapat Magnis Suseno (1984), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Jawa berlaku prinsip kerukunan dan hormat. Dengan demikian, dapat dikatakan kedua prinsip tersebut merupakan norma yang sangat menentukan semua bentuk konkret hubungan atau interaksi. Di samping itu, kedua prinsip yang dimiliki masyarakat Jawa tersebut, membuat orang Jawa lebih fleksibel terhadap semua bentuk interaksi dengan orang lain, khususnya etnik non Jawa.

Sifat rukun masyarakat Jawa, hakekatnya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kemasyarakatan dalam kondisi yang harmonis. Dengan sikap rukun, hati pelaku interaksi akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan bentuk hubungan tanpa perselisihan serta pertentangan. Selain itu, juga memiliki pengertian bersatu sehingga dalam kehidupannya terbentuk keadaan kondusif untuk saling menolong satu sama lain. Keadaan rukun dapat dicapai apabila semua pihak dalam kondisi damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Pada umumnya, masyarakat Jawa dalam hati nuraninya menginginkan kerukunan satu sama lain, dan selalu mengharapkan prinsip tersebut untuk dipertahankan dalam semua bentuk hubungan sosial, baik dalam keluarga maupun dalam kelompok masyarakat.

Pemahaman masyarakat Jawa mengenai rukun diartikan sebagai usaha menghilangkan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga interaksi sosial akan tetap kelihatan selaras dan harmonis. Dengan demikian, rukun mengandung kontinuitas usaha semua pribadi-pribadi untuk memperlihatkan sikap tenang antara satu dengan lainnya, dan merupakan upaya menyingkirkan unsur-unsur yang dapat membangkitkan pertentangan. Prinsip kerukunan dalam masyarakat Jawa merupakan penuntun manusia dalam berinteraksi dengan

manusia lain yang bersifat menyeluruh. Magnis Suseno (1984) mengemukakan bahwa dalam kerukunan terdapat dua segi yang perlu diperhatikan, yaitu rukun diperlukan tidak hanya sekedar untuk memperoleh keselarasan sosial, namun lebih dari itu bertujuan untuk tidak mengganggu keselarasan yang sudah terbina sebelumnya. Kedua, kerukunan tidak diartikan menyangkut sikap batin, namun merupakan usaha penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Dengan kata lain, itu diperlukan pada tingkat permukaan dalam interaksi sosial untuk mencegah timbulnya pertentangan yang terbuka.

Di samping masyarakat Jawa menjunjung nilai rukun, juga memperhatikan suatu sikap yang ditunjukkan oleh tindakan atau berlaku rukun. Hal ini banyak dilakukan karena dapat dijadikan pedoman untuk tidak terjadi pertentangan, yang biasanya timbul apabila ada kepentingan-kepentingan pribadi saling berbenturan. Berlaku rukun dalam masyarakat Jawa diperlihatkan oleh sikap yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan menomorduakan kepentingan pribadi. Tindakan lebih ekstrem dapat dilihat dari pribadi yang secara suka rela melepaskan kepentingannya untuk kesepakatan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, suku Jawa khususnya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya atau lebih sempit berusaha maju sendiri tidak mengikutsertakan kelompok dinilai kurang baik.

Berlaku rukun dalam masyarakat Jawa, pada umumnya juga ditunjukkan oleh aktivitas gotong royong di segala bidang, seperti bekerja saling membantu antaranggota masyarakat. Selain itu, kegiatan gotong royong dapat berbentuk melakukan pekerjaan secara masal untuk kepentingan bersama, seperti pelebaran jalan, perbaikan irigasi dan sebagainya. Koentjaraningrat (1969) mengemukakan terdapat tiga nilai yang disadari masyarakat Jawa melakukan aktivitas gotong royong, yaitu setiap pribadi harus sadar bahwa dalam hidupnya selalu tergantung pada orang lain, sehingga menuntut setiap individu untuk berbuat baik terhadap sesamanya; orang harus bersedia menolong sesamanya, dan orang harus bersifat konform, maksudnya harus selalu ingat sebaiknya tidak berusaha untuk menonjol, melebihi yang lain.

Sifat yang menonjol berkaitan dengan kerukunan adalah kebiasaan bermusyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan dengan saling berembuk, dan ini sangat menentukan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Musyawarah dilakukan dalam rangka memperoleh kebulatan pendapat yang dapat diterjemahkan sebagai kebulatan keinginan dan pendapat partisipan di mana kebulatan itu merupakan jaminan kebenaran yang mau diambil. Hal ini disebabkan kebenaran termuat atau mengandung kesatuan dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah. Dengan demikian, sifat

musyawarah merupakan proses pertimbangan, pemberian, penerimaan, dan kompromis terhadap semua pendapat yang harus dihormati. Selain itu, juga menunjukkan sikap masyarakat Jawa relatif terbuka terhadap nilai-nilai dari luar, selama tidak merugikan dan berada dalam kebenaran yang hakiki.

Di samping prinsip kerukunan yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain, tampaknya juga masih kuat berpedoman pada prinsip hormat, yang dirasakan penting dalam berkomunikasi terhadap orang lain. Pada hakekatnya, prinsip ini merupakan norma yang mendasari seseorang bertutur-kata, dan membawa diri harus memperlihatkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan statusnya. Hal ini bagian penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang teratur yang menuntut setiap individu menjaga kesatuan masyarakat. Kesatuan masyarakat hendaknya diakui oleh semua dengan menempatkan diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan norma sosial.

Dengan sikap orang Jawa seperti itu, tampaknya orang Jawa mudah beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang etnik lain dari luar Jawa. Dalam penelitian Damono (1989), kehadiran orang/suku Jawa di daerah Sumatera Utara disukai oleh orang Melayu, karena selain memberikan keuntungan materi, juga disebabkan oleh sikap hidup orang Jawa yang masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Jawa, sekalipun di daerah luar pulau Jawa. Yang lebih penting bagi orang Jawa adalah pandangan hidupnya bersifat menyeluruh, tidak memisahkan pribadi dari lingkungan, golongannya, situasi, dan kondisinya (Mulder, 1981). Oleh karena sikap hidup serta budaya Jawa yang seperti itulah membuat orang Jawa fleksibel mengadakan interaksi dengan penduduk setempat.

Terdorong oleh sifat dan sikap budayanya yang menghendaki suatu keharmonisan dalam lingkungan maka dalam berkomunikasi dengan orang Jawa sendiri digunakan bahasa daerah yang sudah lain dengan di daerah asalnya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kebahasaan, masyarakat Jawa di daerah rantau mudah mengadopsi dengan bahasa setempat sehingga terjadilah integrasi dengan budaya setempat. Akibatnya, mereka relatif mudah diterima etnik setempat. Kehadiran orang Jawa di Sumatera Utara yang berlangsung terus-menerus melalui aktivitas ekonomi perkebunan menyebabkan orang Jawa menjadi mayoritas di daerah bersangkutan. Namun, tidak menimbulkan kebencian etnis lain, dan justru menempatkan orang Jawa sebagai figur pemersatu antaretnis yang ada.

Fleksibilitas suku-bangsa Jawa dalam berintegrasi dengan etnik lainnya juga tampak dari hasil penelitian yang dilakukan Harahap (1986), yang menunjukkan bahwa suku-bangsa Jawa cenderung lebih baik keadaan integrasinya dibandingkan dengan suku Sunda dan Bali. Hal ini disebabkan sistem sosial

budaya suku Jawa cenderung lebih bisa berakomodatif dalam menerima norma dan budaya lain.

Selain itu, ditemukan juga bahwa tingkat integrasi penduduk, baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang menunjukkan berhubungan secara positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan, selalu akan diikuti semakin tingginya tingkat integrasi. Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya seseorang menyelesaikan pendidikan akan membuat seseorang dapat relatif lebih berpikir secara rasional dan obyektif. Faktor-faktor lain yang tidak kalah penting perannya dalam menentukan tingkat integrasi adalah peran agama yang dianut seseorang. Hal ini berkaitan dengan adanya kesamaan tujuan sehingga timbul pengakuan dan penghayatan yang sama terhadap suatu agama. Dalam konteks ini integrasi dalam masyarakat terjadi lebih mudah. Penelitian Harahap (1986), menemukan adanya persamaan agama, yaitu Islam mendapatkan tingkat integrasi lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dapat terjadi karena antara penduduk setempat dengan pendatang yang beragama sama (muslim), sedikit-banyak memiliki kesamaan nilai yang akan membuka lebar solidaritas mekanik antara mereka.

## **B. SUKU BANGSA PENDATANG**

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Caturtunggal merupakan daya tarik tersendiri bagi suku non Jawa. Dengan kelebihan itulah, banyak suku-bangsa non Jawa datang, seperti Bali, Batak, Sunda, Flores, Nias, Melayu, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, suku-bangsa pendatang yang tinggal di Yogyakarta khususnya di Desa Caturtunggal cukup beragam dan mereka datang dari seluruh bagian Indonesia yang masing-masing memiliki budaya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berpakaian, berbahasa/ dialek, pandangan hidup dan perilaku sehari-hari.

Beragamnya suku-bangsa pendatang di daerah penelitian akan mempengaruhi tingkat integrasi. Seperti yang dikemukakan Usman Pelly (1989), dalam integrasi ditentukan oleh tiga faktor, yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan. Secara kuantitatif, suku-bangsa pendatang dibandingkan dengan suku-bangsa asal relatif lebih kecil sehingga merupakan kelompok minoritas. Namun, dengan posisinya sebagai minoritas ditengah suku Jawa yang lebih dominan, suku-bangsa pendatang dituntut untuk membaur bersama suku-bangsa pendatang lainnya dengan budaya Jawa yang dominan.

Suku-bangsa pendatang di Desa Caturtunggal ini kebanyakan tidak menetap, hanya sebagian kecil saja yang menetap. Suku-bangsa pendatang yang tidak menetap ini pada umumnya adalah para pelajar dan mahasiswa

yang sedang menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Jadi, kedatangan mereka ini karena tujuan pendidikan. Pada umumnya, mereka akan kembali ke tempat asalnya setelah menyelesaikan studi, namun ada pula yang langsung tinggal di mana mereka mendapatkan pekerjaan.

Mengingat sebagian besar suku-bangsa pendatang ini adalah sebagai migran sementara yang hanya tinggal beberapa tahun saja, banyak diantara mereka yang tidak melapor ke RT atau RW setempat. Padahal sebetulnya ada semacam peraturan tentang masuknya penghuni baru di suatu daerah yang antara lain menetapkan bahwa setiap penghuni baru harus melaporkan diri kepada bapak RT setempat, dan mentaati segala aturan yang berlaku. Karena itu, sangatlah sulit untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jumlah masing-masing suku-bangsa pendatang yang tinggal di Desa Caturtunggal ini. Namun demikian, sebagai gambaran diperoleh informasi dari para pamong setempat bahwa suku-bangsa pendatang yang paling banyak di Desa Caturtunggal adalah pendatang dari Pulau Sumatra. Dalam hal ini tidak ditunjuk suku-bangsa pendatang yang mana yang paling banyak jumlahnya.

Keberadaan suku-bangsa pendatang di Desa Caturtunggal sebagian besar berkaitan erat dengan keberadaan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terbilang cukup terkenal di Indonesia. Perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah: Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanatha Dharma, IKIP Karangmalang, Universitas Atmajaya, STIPER, dan STIE. Menurut pengakuan dari beberapa mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, mereka datang dan tinggal di Desa Caturtunggal karena tempatnya berada di lingkungan kampus. Jadi kedatangan dan keberadaan suku-bangsa pendatang yang berasal dari penjuru wilayah Indonesia ke wilayah Desa Caturtunggal karena daya tarik perguruan tinggi.

Dalam setiap tahunnya, jumlah suku-bangsa pendatang di Desa Caturtunggal ini selalu mengalami peningkatan cukup tinggi. Peningkatan ini menuntut berbagai macam pelayanan dan fasilitas yang semakin banyak pula. Tampak bangunan rumah-rumah, pertokoan, warung-warung makan, restoran, sarana dan prasarana transportasi yang semakin padat sehingga suasanaanya sangat ramai.

Mengingat keberadaan suku-bangsa pendatang yang sebagian besar mahasiswa ini hanya tinggal beberapa tahun saja maka tidak mengherankan kalau di Desa ini selalu tampak wajah-wajah baru. Para pejabat setempat mengatakan desa ini tidak pernah sepi, selalu dipadati dengan para pendatang yang sebagian besar berasal dari luar Jawa. Dan karena sifatnya hanya sementara, justru sering muncul berbagai macam masalah diantara kaum



pendatang dengan penduduk setempat, seperti: masalah tidak bayar uang kost, salah faham, masalah bahasa, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Suasananya berbeda dengan suku-bangsa pendatang yang bertujuan menetap di Desa Caturtunggal. Pada umumnya mereka telah mencatatkan diri sebagai penduduk setempat, dan mentaati segala peraturan yang ada. Mereka ini adalah para migran atau yang lebih dikenal dengan nama "Para Perantau". Kedatangan mereka adalah mengadu nasib dengan sedikit modal dan skill. Suku-bangsa pendatang yang paling banyak menetap dan dianggap sukses dalam usahanya adalah suku-bangsa Padang (Minang). Hampir di setiap deretan jalan yang ada di wilayah Desa Caturtunggal bertengger beberapa bangunan rumah makan/warung makan "Padang". Lewat masakan Padangnyanya ini, suku-bangsa Padang dikenal oleh masyarakat setempat. Akibatnya, usaha mereka makin lama makin berkembang, dan mereka memutuskan untuk menetap sebagai migran tetap. Bahkan karena kesuksesannya itu, mereka mendatangkan saudaranya/kerabatnya untuk membuka usaha sejenis di daerah ini. Sehubungan dengan itu, tidak mengherankan kalau dari tahun ke tahun jumlah suku-bangsa Padang semakin banyak tinggal di Desa Caturtunggal tersebut. Seiring dengan itu, semakin padat pula rumah-rumah makan masakan Padang.

Dalam rangka berinteraksi dengan suku-bangsa asal/suku-bangsa Jawa yang lebih dominan, diperlukan penyesuaian terhadap norma- norma dan budaya setempat, diperlukan waktu relatif lama. Untuk lebih cepat usaha adaptasinya menuntut suku-bangsa pendatang berusaha memahami bahasa Jawa, berperilaku halus seperti orang Jawa, membiasakan dengan makanan khas setempat, yang semuanya diharapkan dapat diterima dalam pergaulan masyarakat di kota Yogyakarta. Sekalipun demikian, kelompok etnis pendatang masih banyak mempertahankan budayanya, seperti bahasa daerah, adat istiadat lainnya yang masih dianggap perlu untuk dipertahankan sebagai identitas mereka.

Suku-bangsa pendatang yang masih banyak mempertahankan budayanya kebanyakan mereka ini adalah "Orang Baru" atau orang yang belum lama tinggal di daerah tersebut. Suku-bangsa pendatang yang sudah lama tinggal, paling tidak 2 atau 3 tahun; mereka ini sedikit demi sedikit baru dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Suku-bangsa pendatang yang berstatus migran tetap, sudah dapat membaaur dengan suku-bangsa asal. Terlihat dari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari yaitu bahasa Jawa. Selain itu, perilaku mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan budaya Jawa.

Mengingat suku-bangsa pendatang di daerah ini sebagian besar hanya tinggal sementara yaitu hanya selama studi saja maka tidak mengherankan kalau mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat setempat (suku-bangsa asal) sering mengalami hambatan bahkan masalah. Lebih-lebih setiap tahun ajaran baru di mana pada saat itu banyak pendatang dari luar Jawa yang sedang sibuk mencari tempat tinggal/pondokan, ada masyarakat yang merasa terganggu, namun ada yang merasa senang. Mereka yang merasa senang ini adalah para induk semang, dan para penjaja makanan/warung-warung makan.

Suku-bangsa pendatang ini tersebar di 20 pedusunan di wilayah Desa Caturtunggal. Penyebarannya dapat dikatakan merata karena hampir semua suku-bangsa yang ada di Indonesia ini ada di masing-masing pedusunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tempat kost/pondokan yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing pedusunan, dimana hampir setiap suku-bangsa pendatang ada disitu. Selain tempat-tempat kost, ada pula asrama- asrama yang sifatnya kesukuan, seperti: asrama Minangkabau, asrama Batak, asrama Flores, asrama Irian, dan lainnya. Kehadiran asrama ini menunjukkan adanya rasa kesukuan, meskipun hanya terbatas pada hal tertentu.

Mereka yang tinggal ditempat-tempat kost, pada umumnya lebih cepat berintegrasi dengan suku bangsa lain, baik dengan suku-bangsa asal/Jawa maupun dengan suku-bangsa pendatang lainnya. Tempat-tempat kost ini menampung pendatang dari berbagai macam suku-bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu.

Ada beberapa faktor yang mendukung penyebaran yang merata dari tempat tinggal suku-bangsa pendatang ini, yakni: faktor lokasi, dan faktor fasilitas. Dari faktor lokasi, letak lokasi Desa Catur-tunggal yang sangat strategis dari segi pendidikan sehingga memungkinkan para pendatang mencari tempat tinggal di daerah tersebut. Dari faktor fasilitas, di wilayah Desa Caturtunggal ini tersedia berbagai macam fasilitas baik fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, dan fasilitas lainnya seperti: pertokoan, mall, pasar, dan warung-warung makan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Caturtunggal ini tinggal berbagai macam suku-bangsa. Suku-bangsa pendatang ini berasal dari hampir semua propinsi di Indonesia, paling banyak berasal dari Pulau Sumatera. Kedatangan mereka, sebagian besar dengan tujuan pendidikan. Tempat tinggalnya bersifat sementara dan menyebar di setiap pedusunan di wilayah desa tersebut.

### C. HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku - bangsanya sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara satu suku-bangsa yang satu dengan suku-bangsa lainnya. Tetapi yang secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suparlan, 1984/1985).

Perbedaan yang ada di antara kebudayaan-kebudayaan suku-suku-bangsa di Indonesia pada hakekatnya adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. Corak kemajemukan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu menjadi lebih kompleks karena adanya sejumlah warga negara (masyarakat Indonesia) yang tergolong sebagai keturunan orang asing yang hidup di dalam dan menjadi sebagian dari masyarakat Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa tersebut akan berpengaruh dalam berinteraksi. Pembahasan mengenai interaksi ini, pada dasarnya membahas dan mengkaji berbagai pola hubungan antar suku bangsa, yaitu pola hubungan antar sesama suku bangsa "asal" dan antara suku bangsa "asal" dengan suku bangsa "pendatang", serta pola hubungan antara sesama suku bangsa "pendatang".

Menurut Royce (Pelly, 1989) ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk yaitu (1) kekuasaan (power); (2) persepsi (perception); (3) tujuan (purpose). Kekuasaan ini merupakan faktor yang utama dalam menentukan situasi hubungan antar etnik (suku bangsa) tersebut. Sedangkan faktor lainnya ditentukan oleh faktor utama ini. Kelompok suku bangsa yang memegang kekuasaan disebut juga dominan group atau kelompok dominan yang banyak menentukan "aturan permainan" dalam masyarakat mejemuk tersebut. Tetapi, kelompok ini sangat jarang merasa sebagai salah satu dari sekian kelompok etnik masyarakat di mana mereka berada.

Mengenai kelompok suku-bangsa yang dominan ini, seperti dikemukakan Bruner (Pelly, 1989) dalam penelitian di Indonesia, ada tiga faktor yang menentukan yaitu (1) faktor demografis; (2) politis; (3) budaya lokal (setempat). Sebagai contoh kelompok suku-bangsa Sunda di Bandung. Kelompok dominan dalam masyarakat majemuk mencoba berfungsi sebagai

"wadah pembauran" (melting pot) kelompok-kelompok suku-bangsa lainnya. Sebagai kelompok-kelompok minoritas (subordinat group), mereka menggunakan budaya kelompok suku-bangsa yang dominan (superordinat group) untuk orientasi akulturasi dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan (pergaulan) sehari-hari, tampak kelompok-kelompok minoritas ini berusaha menggunakan bahasa, etiket, pakaian, sistem budaya, makanan kelompok dominan. Sebab suku-bangsa yang dominan ini berfungsi juga sebagai kelompok budaya yang dominan (dominant culture). Misalnya orang Batak yang tinggal di kota Bandung berusaha mempelajari bahasa Sunda, bertingkah laku lebih halus seperti orang Sunda, membiasakan diri dengan makanan tipikal Sunda, agar dapat diterima dalam pergaulan masyarakat majemuk kota Bandung tersebut.

Hal ini tampak tidak jauh berbeda dengan suku-bangsa "asal" Jawa di Yogyakarta yang menduduki status dominan (unggul), dibandingkan suku-bangsa "pendatang" dari berbagai propinsi di Indonesia. Seperti misalnya suku-bangsa "pendatang" dari Sumatera (Batak, Minang), Sulawesi (Bugis), Irian Jaya dan dari propinsi lainnya, setelah tinggal di Yogyakarta berusaha menyesuaikan diri dengan suku-bangsa "asal" Jawa. Misalnya, mempelajari bahasa Jawa dan membiasakan diri dengan makanan masakan Jawa. Meskipun dalam kehidupan intern kelompok-kelompok suku-bangsa minoritas ini masih banyak yang mempertahankan kesetiaan primordial mereka, seperti penggunaan bahasa daerah masing-masing, adat dan kebiasaan lainnya yang dianggap perlu untuk mempertahankan identitas suku-bangsa mereka. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa di kalangan generasi kedua atau ketiga dari kelompok ini terdapat semacam "erosi" (menipisnya) pengetahuan mereka terhadap "isi" dari kesetiaan primordial tersebut, walaupun keadaan ini bukan otomatis "pengingkaran" terhadap identitas suku-bangsa mereka.

Dalam hubungan antar etnik atau suku-bangsa, faktor kedua yang juga harus diperhatikan adalah faktor persepsi (pengamatan), baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam situasi yang insidental. Kita sangat jarang mengamati sesuatu tanpa bias (kesalahan), karena orang mengamati sesuatu seperti apa yang diinginkannya. Persepsi antar suku bangsa mengambil bentuk konkrit dalam simbol (lambang- lambang) dan stereotipe (prasangka yang subyektif dan tidak tepat). Simbol dan stereotipe terbentuk dalam pergaulan antarsuku-bangsa, jadi bukan hasil dari proses satu arah, dan bukan pula terjadi dalam situasi yang terisolasi. Persepsi suatu kelompok terhadap kelompok lain mungkin cocok pada suatu situasi, tetapi mungkin pula bertentangan pada situasi yang lain, karena kedua manifestasi pengamatan ini (lambang dan stereotipe) dasar operasinya bergerak antara mitos dan realitas.

Selanjutkan, dijelaskan bahwa kelompok suku-bangsa tertentu dapat dikenal dari lambang-lambang yang dipergunakan, seperti bentuk rumah, pakaian, warna yang digemari, dialek, gaya hidup dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Lambang-lambang ini merupakan "cap" (hall mark) suatu kelompok suku-bangsa yang diwariskan berketurunan. Dari sisi lain orang juga memberikan "cap" kepada suatu kelompok suku bangsa dalam bentuk stereotipe, seperti "cap" pencilok kepada orang Minangkabau, kasar kepada orang Bugis, lamban kepada orang Melayu, penipu kepada orang Aceh, tukang berkelahi kepada orang Bugis, penurut kepada orang Jawa dan lain-lain. Stereotipe ini akan berubah secara berangsur-angsur apabila kontak antarsuku-bangsa telah lebih banyak didasarkan pada realita daripada mitos. Tetapi, akan muncul kembali apabila terjadi ketegangan atau konflik.

Mengenai faktor kedua ini, sebagaimana juga dikemukakan Kusumah Hadiningrat (Suparlan dkk, 1984/1985) bahwa setiap golongan suku-bangsa selalu mempunyai pandangan atau penilaian terhadap golongan di luar suku-bangsanya. Pandangan itu dapat bersifat positif dan negatif tergantung pandangan yang diberikan. Pandangan atau persepsi dari masing-masing golongan suku-bangsa tadi pada gilirannya akan berubah menjadi suatu stereotipe atau prasangka. Jika kita kaji memang timbulnya prasangka tadi akibat tidak senangnya antara satu golongan dengan golongan suku-bangsa lain karena sudah ada satu ciri atau karakteristik dari suatu golongan suku-bangsa tersebut. Mungkin saja ciri-ciri tadi tidak seluruhnya benar. Oleh karena itu, prasangka ini hanya bersifat sementara atau dugaan saja.

Persepsi atau pengamatan/pandangan antargolongan suku-bangsa, hasil penelitian Kusumah Hadiningrat (Suparlan, 1984/1985) di Kotamadya Pekanbaru, menyatakan bahwa orang Indonesia keturunan Cina memandang orang asli sebagai suku-bangsa yang sangat ulet dan tekun di bidang perekonomian, dan nampaknya sulit untuk diajak kerjasama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu menurut orang Cina satu-satunya suku-bangsa yang mungkin dapat mengalahkan mereka adalah orang Minang itu. Pandangan lain dari orang Cina terhadap orang Minang yang bemedakan negatif tidak ada. Mungkin karena orang Cina hanya mempunyai kepentingan ekonomi saja, maka pandangan lain di luar masalah tadi tidak ada. Sementara itu, tanggapan dari golongan Cina terhadap golongan/kelompok suku bangsa Jawa tidak negatif. Mungkin mereka menganggap bahwa golongan ini bukan merupakan saingan bagi mereka dalam bidang ekonomi. Justru orang Jawa sangat membantu mereka, seperti memberikan pengetahuan tentang masalah-masalah yang berkenaan masyarakat sekelilingnya. Dengan pengetahuan ini sedikit banyak mereka dapat mengekang diri sehingga tidak menimbulkan ketegangan

dalam hubungan atau interaksi sosial. Masalah stereotipe dan prasangka antargolongan suku-bangsa ini juga terjadi di Sumenep seperti penelitian yang dilakukan Ferrosta. Bentuk-bentuk stereotipe dan prasangka tersebut banyak berkaitan dengan perebutan sumberdaya ekonomi. Masalah persepsi atau pandangan antar suku-bangsa ini juga mungkin terjadi di Yogyakarta, karena terdapat berbagai suku-bangsa dari propinsi di Indonesia. Terutama banyaknya pendatang yang belajar atau kuliah dan bertempat tinggal di lingkungan suku bangsa "asal". Dengan berbagai karakteristik atau latar belakang yang berbeda maka sangat mungkin dalam pergaulan (kehidupan) sehari-hari mereka mempunyai persepsi yang berbeda pula. Mungkin suku-bangsa "asal" (Jawa) dalam hal-hal memiliki persepsi yang negatif tertentu ada terhadap suku-bangsa "pendatang", dan sebaliknya.

Selain kekuasaan dan persepsi, hubungan antarsuku-bangsa ditentukan pula oleh tujuan dan interest (kepentingan-kepentingan) tertentu dari masing-masing kelompok suku-bangsa. Usaha untuk meraih kepentingan kelompok suku bangsa ini dalam masyarakat majemuk banyak dilakukan karena kepentingan tertentu, seperti kepentingan agama, pembangunan daerah, golongan ekonomi tertentu, dan lain-lain. Usaha untuk menutupi kepentingan etnik atau suku-bangsa dalam masyarakat majemuk diperlukan agar tidak kelihatan atau dituduh "exclusive", "extrem", "daerahisme" dan lain-lain atau juga agar tidak terjadi bentrokan langsung dengan kelompok suku-bangsa lainnya atau dengan kepentingan nasional (Pelly, 1989). Sebagai contoh dikemukakan kepentingan Muhammadiyah di tahun 1930-1940-an banyak yang identik dengan kepentingan kaum perantau Minangkabau di kota Medan. Melalui kelompok-kelompok pengajian yang diberikan dalam bahasa Minang, pengajaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membicarakan disamping masalah agama juga masalah perantauan, menyampaikan pesan ninik dan mamak dari tanah Minang, atau memungut derma untuk pembangunan kampung halaman.

Dari beberapa faktor yang menentukan corak hubungan antarsuku-bangsa tersebut, maka ada tiga pola interaksi atau hubungan antarsuku-bangsa, baik sesama suku-bangsa "asal", antara suku-bangsa "asal" dengan suku-bangsa "pendatang" maupun sesama suku-bangsa "pendatang" yaitu : kerjasama, persaingan dan konflik. Ketiga pola hubungan antar suku bangsa itu pernah dikemukakan Anto Achdiat (Suparlan, 1984/1985). Ketiga wujud tersebut dilandasi oleh beberapa faktor antara lain (1) adanya perebutan sumberdaya yang terbatas dan berharga diantara golongan etnik (suku-bangsa) yang ada, menyebabkan antar suku-bangsa tersebut bekerjasama, berkompetisi atau bersengketa; (2) peranan orang-orang tertentu ada dalam masyarakat tersebut yang menciptakan hubungan yang bersifat kerjasama, kompetisi atau bahkan

sengketa; dan (3) model-model pengetahuan kebudayaan masing-masing warga masyarakat golongan etnik tertentu digunakan untuk memahami dan melakukan tindakan berkenaan dengan interaksinya warga masyarakat golongan etnik lain. Ketiga faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terwujudnya stereotipe dan etnocentrisme dari masing-masing warga masyarakat golongan etnik yang ada, dan secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi terwujudnya ketiga corak interaksi tersebut di atas.

Pola hubungan antarsuku-bangsa tersebut pada umumnya tercermin dalam ekonomi, agama, tetangga, pendidikan, kesenian dan pemerintahan. Sebagai gambaran mengenai pola hubungan ini dikemukakan hasil penelitian Kusumah Hadiningrat di Pekanbaru (Suparlan, 1984/1985) dengan suku-bangsa "asal" Minangkabau. Hubungan kerjasama yang terlihat biasanya berkaitan dengan masalah ekonomi, misalnya di suatu toko atau warung makan orang Minang, pada umumnya pegawai/pekerja/karyawannya diangkat dari golongan mereka dan jarang menggunakan tenaga di luar golongannya. Tentunya hal ini mempunyai maksud-maksud tertentu baik dilihat dari segi kepentingan golongannya atau mungkin juga ada mempermudah dalam hal interaksi dan cara-cara atau kebiasaan yang mereka miliki diantara sesama golongannya. Karena adanya kesamaan kebudayaan kemungkinan adanya konflik dapat dihindari. Meskipun demikian ada juga beberapa toko atau warung makan yang menggunakan tenaga kerja "pendatang" suku- bangsa Jawa.

Selanjutnya, dalam kerjasama ini dicontohkan pada suatu percetakan milik orang Minang, yang menggunakan tenaga orang Jawa dan Sunda yang sudah mempunyai pengalaman di bidang percetakan. Hubungan antara pemilik dengan pekerja cukup baik dan bahkan ada yang telah mempercayakan sepenuhnya kepada mereka dalam menangani pekerjaan percetakan. Kasus tersebut, menunjukkan adanya hubungan antar suku bangsa yaitu sesama suku bangsa "asal" Minang, antarsuku-bangsa "asal" dengan suku-bangsa "pendatang" (Minang dengan Jawa dan Sunda), dan sesama suku-bangsa "pendatang" (Jawa dengan Sunda). Karena penduduk di Kotamadya Pekanbaru umumnya orang Minang dan nampak adanya dominasi kebudayaan Minang maka penggunaan bahasa sehari-hari sebagai alat komunikasi adalah bahasa Minangkabau. Oleh karena itu bagi suku-bangsa "pendatang" atau yang bukan dari Minang harus belajar bahasa Minang.

Selain pola hubungan yang berbentuk kerjasama, hubungan antar suku-bangsa ini dapat terjadi dalam bentuk persaingan dan konflik. Persaingan di dalam kehidupan bermasyarakat baik disadari atau tidak akan selalu ada dan tidak dapat diingkari lagi kehadirannya. Persaingan ini biasanya disebabkan adanya perebutan suatu sumberdaya, apakah itu menyangkut bidang tenaga



kerja, sumberdaya alam, pendidikan atau ekonomi. Hal ini terjadi terutama di perkotaan atau di kota-kota besar. Persaingan umumnya terjadi di bidang perekonomian, seperti antara suku- bangsa "asal" Minang dengan suku-bangsa "pendatang" atau orang Indonesia keturunan Cina di kota Pekan Baru. Misalnya persaingan dalam menarik konsumen untuk membeli barang dengan bersaing harga jual. Hal lain yang menjadi persaingan, meskipun bukan merupakan hal yang prinsip, adalah di bidang pendidikan, seperti antara beberapa sekolah swasta anak orang mampu atau pejabat/pegawai pemerintah, dan anak-anak orang Indonesia keturunan Cina. Pola hubungan yang sifatnya terjadi perselisihan atau konflik terutama orang Indonesia asli dengan keturunan Cina boleh dikatakan tidak ada. Kalaupun pernah ada hanyalah perselisihan kecil yang dapat diselesaikan.

Uraian di atas menunjukkan proses terjadinya integrasi. Menurut Djoko Suryo (1989) terutama di perkotaan, ada beberapa kelompok kota yang mendukung terwujudnya proses integrasi sosio-kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk antara lain (1) kota bandar atau perdagangan; (2) kota administrasi; dan (3) kota pendidikan (intelektual). Dari ketiga tipe kota tersebut, kota Yogyakarta dapat dikatakan termasuk kota pendidikan. Di Yogyakarta terdapat penyelenggaraan pendidikan baik dari tingkat pendidikan rendah, menengah dan pendidikan tinggi. Kota ini menjadi pusat berkumpulnya pelajar/mahasiswa dari berbagai daerah/propinsi, yang tinggal baik di rumah penduduk maupun asrama. Seperti antara lain dari Sumatera (Aceh, Riau, Lampung), Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan Timor Timur. Hubungan pergaulan antar kelompok sosial dan etnik ini memberikan peluang bagi terwujudnya proses integrasi sosial budaya bagi golongan yang terlibat di dalamnya.

Selain dikenal sebagai pusat pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat kebudayaan dan pariwisata. Predikat ini potensi menonjol yang menarik bagi penduduk dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk berkunjung atau mencari pekerjaan. Kemungkinan tersebut ditentukan pula dengan berbagai hasil pembangunan daerah seperti angka harapan hidup tertinggi di Indonesia, angka kematian bayi yang kecil, pertumbuhan penduduk yang rendah, dan tingkat kesejahteraan, kesehatan dan kesadaran tinggi. Keadaan yang demikian, dapat menarik penduduk dari berbagai suku-bangsa di Indonesia untuk menetap, termasuk dari mancanegara. Meskipun adat-istiadat, kebiasaan, perilaku, sifat dan karakter yang berbeda dengan penduduk DIY, namun barangkali kebesaran jiwa, sistem budaya yang terbuka (menerima budaya asing yang sesuai), dengan rasa kekeluargaan dan kesadaran yang tinggi suku-bangsa asal (Jawa) dapat menerima penduduk dari luar tanpa adanya konflik dan pertentangan (Suroso, 1994).

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survai. Menurut Masri Singarimbun (1987) penelitian dengan metode survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pada umumnya, unit analisis dalam penelitian survai ini adalah individu. Sementara itu, Ida Bagus Mantra dan Kasto (1987) mengatakan bahwa agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan sifat populasi maka cara-cara pengambilan sebuah sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan adalah:

#### **1. Sampel Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kelompok etnis suku-bangsa asal dan kelompok etnis suku -bangsa pendatang. Kelompok etnis suku-bangsa asal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah "suku-bangsa Jawa", sedang kelompok etnis suku-bangsa pendatang adalah "di luar suku-bangsa Jawa". Mengapa demikian, alasan sebagai berikut:

- a. Kelompok etnis suku-bangsa asal yang terdapat di daerah penelitian (Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah suku-bangsa Jawa. Suku-bangsa Jawa ini merupakan suku-bangsa asal yang secara turun temurun merasa sebagai penduduk setempat, bukan sebagai pendatang yang wilayah asalnya di luar propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara kuantitas suku-bangsa asal ini adalah suku-bangsa yang dominan karena memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Disamping itu, suku-bangsa asal ini dominan pula dalam bidang politik dan budaya lokal.
- b. Suku-bangsa pendatang yang terdapat/tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Caturtunggal ini adalah berasal dari berbagai macam propinsi di Indonesia. Berhubung data mengenai jumlah masing-masing suku-bangsa pendatang ini tidak ada di kantor wilayah setempat maka terdapat kesulitan untuk memilih suku-bangsa mana yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, alternatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku-bangsa pendatang "di luar suku-

bangsa asal/ di luar suku-bangsa Jawa". Suku-bangsa pendatang di luar suku-bangsa Jawa ini terdiri dari: suku-bangsa dari Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Maluku, Timor Timur, dan Irian Jaya. Suku-bangsa pendatang dari luar DIY khususnya yang berasal dari propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tidak dimasukkan dalam kelompok suku-bangsa pendatang karena memiliki kelompok etnis serupa dengan kelompok etnis Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhubung dengan hal tersebut maka kelompok etnis suku-bangsa pendatang yang dimaksudkan adalah "selain suku Jawa". Pada umumnya, sebagian besar kedatangan mereka ke kota Yogyakarta ini adalah dengan tujuan pendidikan. Sehubungan dengan hal ini maka sebagian besar para pendatang ini adalah para mahasiswa.

Mengingat begitu banyaknya suku pendatang yang ada di Desa Caturtunggal maka dalam penelitian ini suku-bangsa pendatang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni: kelompok pendatang dari Sumatra, Nusa Tenggara, dan lain-lain (suku-bangsa dari Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya, dan Timor Timur). Dasar pengelompokan ini berdasarkan jawaban dari responden suku-bangsa asal tentang suku bangsa pendatang yang paling dikenal. Jadi sebelum menentukan kelompok etnis mana yang akan diambil sebagai sampel maka terlebih dahulu mencari tahu lewat responden suku-bangsa asal.

Berdasarkan jawaban responden suku-bangsa asal, suku bangsa pendatang yang paling mereka kenal adalah seperti pada tabel IV.1 berikut.

**Tabel IV.1**  
**SUKU BANGSA PENDATANG YANG PALING DIKENAL**  
**OLEH SUKU BANGSA ASAL DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No.	Suku Bangsa Pendatang	Jumlah (n)	Persentas (%)
1.	Sumatra	32	42,66
2.	Nusa Tenggara	14	18,66
3.	Kalimantan	2	2,67
4.	Sulawesi	3	4,00
5.	Irian	1	1,34
6.	Timor Timur	1	1,34
7.	Jawa	16	21,33
8.	Sunda	6	8,00
Jumlah		75	100,00

Sumber: Data Primer Desa Caturtunggal, 1995

Berdasarkan data pada tabel IV.1 tersebut terlihat bahwa suku -bangsa pendatang yang paling banyak dikenal oleh suku-bangsa asal/suku Jawa adalah suku-bangsa dari Sumatra, kemudian disusul suku-bangsa dari Jawa, lalu dari Nusa Tenggara, Sunda, Sulawesi, Kalimantan,Irian, dan Timor Timur.

Bagi suku-bangsa asal yang paling mengenal suku-bangsa Jawa walaupun jumlahnya cukup banyak (21,33%) tidak dimasukkan dalam kategori suku-bangsa yang perlu diambil sebagai sampel. Hal ini karena mereka sama-sama suku Jawa yang memiliki latar belakang budaya serupa. Sehubungan dengan itu maka dalam pengklasifikasian suku-bangsa pendatang tidak termasuk suku-bangsa Jawa.

Terlihat dalam tabel IV.1 suku-bangsa pendatang yang dikenal oleh suku-bangsa asal, dikenal berdasarkan pulau. Memang ada beberapa responden suku-bangsa asal yang mengenal nama suku-bangsa pendatang tersebut, namun jumlahnya relatif kecil. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengambilan suku-bangsa pendatang sebagai sampel berdasarkan pulau asal mereka, bukan berdasarkan suku-bangsa mereka.

## **2. Lokasi Dari Sampel Kelompok Sasaran**

Lokasi sampel kelompok sasaran dipilih daerah yang banyak terjadi kontak budaya antarsuku-bangsa. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan beberapa informasi dari pejabat setempat diperoleh keterangan bahwa para pendatang dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak tinggal di suatu desa/kelurahan adalah di desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat peta 1 dan peta 2). Sehubungan dengan hal itu maka Desa Caturtunggal diambil sebagai lokasi penelitian. Adapun alasan pengambilan Desa Caturtunggal sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- a. Caturtunggal merupakan salah satu desa di wilayah DIY yang memiliki cukup banyak pendatang yang berasal dari berbagai macam suku-bangsa yang ada di Indonesia. Menurut informasi dari pejabat desa setempat, sampai saat ini (sampai tahun 1995) terdapat kurang lebih 30.000 orang pendatang dari berbagai macam suku-bangsa di Indonesia yang tinggal/kost di Desa Caturtunggal. Kedatangan mereka ini sebagian besar adalah tujuan pendidikan
- b. Dalam kaitannya no.a tersebut Caturtunggal memang merupakan satu-satunya desa di wilayah DIY yang memiliki cukup banyak fasilitas pendidikan, terutama untuk tingkat perguruan tinggi, baik negeri (UGM, IKIP Karangmalang, dan IAIN) maupun swasta (UII, Atmajaya, UPN, IKIP Veteran, STIPER, Sanata Dharma, STIE "GAMA", API, dan AKPN). Sehubungan dengan ini cenderung para pendatang mencari tempat tinggal

sementara/ kost di daerah yang relatif dekat dengan kampus. Desa yang paling dekat dengan kampus ini adalah desa Caturtunggal. Dengan kata lain, Desa Caturtunggal merupakan pusat pendidikan dan sekaligus tempat pemondokan/kost para mahasiswa.

Berdasarkan dua alasan tersebut diperkirakan desa Caturtunggal merupakan tempat/wadah terjadinya hubungan atau interaksi budaya antar suku-bangsa, sehingga dipilih sebagai daerah penelitian.

### **3. Teknik Pengambilan Responden Sebagai Sampel**

Pengambilan/penentuan responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik/metode "snow bowl" maksudnya dengan cara "*getok tular*". Jumlah responden sebanyak 232 orang, terdiri dari 75 orang diambil dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 157 orang responden diambil dari suku-bangsa pendatang yang berasal dari berbagai macam suku-bangsa. Khususnya dari suku-bangsa pendatang ini diambil dari semua suku-bangsa/etnis dengan jumlah yang tidak sama. Suku-bangsa pendatang ada tiga kelompok, yakni kelompok pendatang dari Sumatra dengan jumlah responden 52 orang, dari Nusa Tenggara 42 orang, dan dari kelompok suku dari pulau yang lain berjumlah 63 orang. Pengambilan jumlah ini erat kaitannya dengan waktu, tenaga, dan beaya.

Responden yang diambil sebagai sampel adalah orang-orang yang ada kontak langsung dalam interaksi budaya antarsuku-bangsa. Mereka ini dapat berstatus sebagai kepala keluarga ataupun bujangan, dan berasal dari para mahasiswa, para induk semang, para penjual makanan yang menjadi langganan makan para mahasiswa.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yang dituntun dengan kuesioner yang telah dipersiapkan. Untuk melengkapi data tersebut diadakan teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa informan kunci. Informan kunci tersebut dipilih dari mereka yang telah tinggal terus-menerus di Desa Caturtunggal lebih dari satu tahun bagi etnis pendatang, beberapa pejabat setempat seperti : RW, RT, pamong desa yang diperkirakan tahu banyak dan sering berkomunikasi dengan para pendatang.

Selain itu, digunakan pula data sekunder dan pengamatan dilapangan. Pengamatan di lapangan dititik beratkan pada wujud dari kontak budaya antarsuku-bangsa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku pelakunya, dapat lewat berbagai macam perkumpulan-perkumpulan, konflik sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial-budaya lainnya, yang semuanya itu menunjuk adanya integrasi/desintegrasi nasional.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari lapangan akan diolah berdasarkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil wawancara mendalam (depth interview) akan disajikan secara kualitatif, yaitu meliputi berbagai pengalaman, persepsi, sikap, dan harapan-harapan para informan kunci. Hasil wawancara tersebut kemudian diinterpretasi secara kualitatif oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner akan ditabulasikan dan disajikan secara kuantitatif dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Hasil kecenderungan yang diperoleh dari tabel-tabel tersebut dikombinasikan dengan analisis kualitatif akan disajikan dalam laporan akhir.

## **6. Pengalaman Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada beberapa pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan berkaitan dengan kemudahan-kemudahan dalam mengurus perijinan dan pelayanan dari para pamong setempat yang begitu baik. Pengalaman yang kurang menyenangkan adalah kesulitan untuk menentukan suku-bangsa pendatang mana yang akan dijadikan responden. Hal ini disebabkan karena peneliti mengalami kesulitan untuk melihat bagaimana kondisi dan penyebaran masing-masing suku bangsa pendatang yang ada di daerah penelitian. Dari jawaban yang dilontarkan oleh beberapa pamong setempat, dikatakan bahwa di daerah penelitian, yaitu Desa Caturtunggal terdapat hampir semua suku-bangsa yang ada di Indonesia ini. Mereka tidak dapat memberikan gambaran secara jelas, walaupun hanya kecenderungan, suku pendatang mana yang paling dominan atau yang paling menonjol di desa tersebut. Mereka selalu menjawab : "hampir semua suku bangsa ada disini, namun berapa banyaknya kami tidak tahu". Sehubungan dengan hal tersebut satu-satunya cara yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah harus dengan cara "sensus", namun hal ini tidak mungkin dilakukan mengingat waktu, tenaga, dan biaya yang sangat terbatas. Karena hal itu tidak mungkin untuk dilaksanakan maka peneliti mengambil keputusan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap suku-bangsa asal yang diambil sebagai responden yang ada di Desa Caturtunggal tersebut. Kesulitan lain yang dihadapi peneliti adalah sulit menemui responden dan beberapa informan kunci. Peneliti terpaksa datang ke rumah mereka lebih dari satu/dua kali. Selain itu, ada kalanya mereka tertutup memberikan jawaban yang berkaitan dengan masalah stereotip. Mereka merasa kurang enak untuk menilai sifat suku-bangsa lain, akibatnya sulit memperoleh gambaran tentang stereotip dari masing-masing suku bangsa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Kelompok Sosial**

J. Van Ball (1988) mengatakan bahwa manusia tidak pernah tinggal secara sendirian, bertempat tinggal bersama dalam suatu kelompok-kelompok di suatu tempat dan membentuk kelompok-kelompok sosial. Mattulada (1985) mengatakan bahwa dalam kelompok-kelompok sosial (individu dalam kelompok, dan kelompok dalam masyarakat) dapat dipadukan atau dipersatukan sebagai satu kesatuan fungsional, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Setiap kelompok sosial dalam masyarakat mempunyai tatanan-tatanan tertentu, ini selalu ada walaupun tidak langsung kelihatan. Tatanan-tatanan tersebut menunjukkan perbedaan antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Perbedaan ini dapat didasarkan atas: spesialisasi jabatan, stratifikasi sosial, dan agama. Perbedaan yang umum maksudnya yang sering terjadi pada masyarakat didasarkan atas: perbedaan jenis kelamin, umur, tempat tinggal, dan kekerabatan akibat pertalian darah dan akibat perkawinan.

Desa Caturtunggal yang dikenal sebagai tempat pertemuan suku-bangsa dari berbagai pelosok Indonesia terdapat berbagai jenis kelompok sosial. Jenis dari kelompok sosial ini tentunya sedikit banyak dipengaruhi oleh identitas penduduknya. Dan dalam kaitannya dengan integrasi, kehadiran kelompok sosial ini dapat mendukung integrasi nasional namun dapat pula menghambat bahkan menimbulkan desintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok sosial yang ada di Desa Caturtunggal adalah berdasarkan: umur dan jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan kekerabatan akibat pertalian darah dan perkawinan. Dasar pengelompokannya tentunya sesuai dengan misi dari masing-masing kelompok sosial tersebut.

Setiap jenis kelompok sosial dengan misinya memiliki tujuan yang sama/searah yaitu bersatu/berintegrasi membentuk satu kesatuan dalam kelompoknya. Namun demikian, perbedaan pendapat bahkan konflik sering muncul pula dalam satu wadah kelompok sosial tersebut.



Bagaimana dengan jenis kelompok sosial yang ada pada suku-bangsa "asal" dan suku-bangsa "pendatang" di Desa Caturtunggal? Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Caturtunggal, diperoleh berbagai bentuk/jenis kelompok sosial sebagai berikut:

#### **a. Kelompok Sosial Berdasarkan Kekerabatan.**

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok sosial berdasarkan kekerabatan ini dapat dilihat pada suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Pengelompokannya dapat akibat pertalian darah atau akibat perkawinan.

Pada suku-bangsa asal, jenis kelompok sosial ini dikenal dengan nama "Paguyuban Trah....", sedang untuk suku-bangsa pendatang dikenal dengan nama "Persatuan Keluarga....". Kedua jenis kelompok sosial kalau dilihat sepintas sepertinya ingin menonjolkan sukuismenya atau sifat kesukuannya, dan ini tentunya dapat menghambat terbentuknya integrasi nasional. Namun bagaimana kenyataan di lapangan, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

#### **1). Paguyuban Trah.**

Paguyuban trah ini dibentuk berdasarkan kekerabatan akibat pertalian darah dan akibat perkawinan. Kelompok sosial berdasarkan atas kekerabatan ini hanya dilakukan oleh suku-bangsa asal yaitu "suku Jawa", tidak dilakukan oleh suku-bangsa pendatang. Kelompok sosial ini dikenal dengan nama "trah" atau "paguyuban trah".

Di Desa Caturtunggal (daerah penelitian) paguyuban trah banyak dimiliki oleh masyarakat, baik dari masyarakat golongan atas maupun golongan bawah. Sebagian besar responden mengatakan mereka terlibat dalam kegiatan trah tersebut. Responden sangat setuju dengan paguyuban trah ini. Bagi responden, trah merupakan salah satu bentuk alat pemersatu dalam suatu keluarga.

Penggunaan nama dalam trah berdasarkan persetujuan bersama antara anggota trah tersebut. Leluhur yang dijadikan tonggak perkumpulan ini berada pada satu generasi di atasnya. Nama yang pada umumnya mereka gunakan adalah nama dari ayahnya, seperti trah Pawirorejo, trah Harjonawiro, Paguyuban Trah Mangunwijayan, dan lainnya.

Tujuan trah bagi responden Caturtunggal adalah agar tidak terjadi kerenggangan antar keluarga dan dapat saling bertemu sehingga tidak lupa. Beberapa informan mengatakan bahwa kita orang Jawa memiliki sistem kekerabatan yang sangat lemah, karena tidak ada klen. Dan oleh karenanya perlu dibuat suatu bentuk kegiatan dalam satu wadah untuk mempersatukan

kaum kerabat dalam keluarga tersebut. Sebab banyak ditemui dalam pertemuan-pertemuan keluarga, saudara yang satu dengan yang lain tidak saling kenal padahal mereka ini masih satu darah dalam keluarga tersebut (senenek/sekakek). Hal ini disebabkan karena frekuensi bertemu sangat minim/jarang. Kadang kalanya pertemuan-pertemuan keluarga hanya dapat dijumpai pada waktu ada hajad, ada kesusahan, dan pada hari besar Idul Fitri. Untuk menjaga agar mereka dapat saling kenal dan tidak melupakannya, maka dibuatlah apa yang disebut "trah" tersebut.

Menurut Syairi (REPUBLIKA, 29 Maret 1993) di Yogyakarta ini ada 4 bentuk trah, yaitu:

1. Bangsawan trah, contoh: Paguyupan Trah Hamengku Buwono I, Trah Sinuwun Kaping VII, Trah Mangkunegaran.
2. Priyayi Trah, contoh: Rekso Rukun Trah, Trah Suroharjan, Trah Pringgogigdo
3. Santri Trah, contoh: Bani Ilham, Bani Wahab, Bani Mu'min
4. Trah Wong Cilik, contoh: Trah Surodimejan, Trah Cokrodirjan, Trah Mukadir.

Dari keempat bentuk trah tersebut, bentuk yang kedua dan keempat yang banyak ditemui di daerah penelitian.

Menurut responden dan beberapa informan kunci kehadiran trah/munculnya trah ini terdorong oleh adanya rasa ingin bersatu dengan sanak saudaranya. Rasanya sangat senang dan merasa tenteram serta merasa mengingatkan kembali sewaktu mereka kanak-kanak. Bersamaan dengan adanya rasa ingin bersatu, ada rasa ingin berbagi rasa duka maupun suka. Hal ini terlihat sewaktu mereka berkumpul, mereka menggunakan waktu bahkan menghabiskannya untuk membicarakan masalah-masalah dalam keluarga dan berceritera pengalaman-pengalaman mereka masing-masing. Kelihatan mereka asyik sekali dengan muka yang cerah dan berapi-api dalam berceritera. Ini menunjukkan adanya rasa rindu dan rasa ingin meluapkan segala penderitaan dan permasalahan yang selama ini mereka simpan.

Tempat pertemuan trah ini diputuskan berdasarkan persetujuan bersama antar anggota trah tersebut. Ada yang tempatnya bergantian, namun ada pula yang hanya menetap disatu tempat. Pada umumnya mereka yang menghendaki tempat bergilir, mereka ini memiliki tingkat ekonomi hampir seimbang. Sementara itu, bila diantara warga trah itu tingkat ekonominya kurang seimbang, biasanya tempat pertemuannya diadakan dirumah ketua trah. Dalam hal ini orang yang dipilih sebagai ketua trah adalah orang yang dianggap paling mampu diantara mereka.

Ketua trah dapat dipilih dari orang yang paling tua, namun dapat pula dipilih dari orang yang paling muda; yang penting mampu/kaya. Keanggotaannya adalah semua orang yang masuk dalam keluarga mereka, termasuk isteri/suami mereka. Karena isteri/suami dapat masuk dalam suatu paguyuban mereka maka disini dapat terjadi seseorang memiliki/menjadi anggota dari dua jenis paguyuban, yaitu paguyuban keluarganya sendiri dan paguyuban dari suami/isterinya. Mereka ini tetap dapat mengikuti dua paguyuban selama masih menjadi isteri/suam, atau selama tidak cerai.

Waktu pertemuan diadakan setiap sebulan atau selapan (35 hari) sekali, bahkan ada yang tidak tetap waktunya. Pada umumnya bagi paguyuban trah yang anggotanya sebagian besar pegawai waktu pertemuan anggota mengambil hari-hari libur, seperti Minggu atau Malam Minggu. Bagi kalangan bukan pegawai, hari pertemuan tidak tetap berdasarkan waktu senggangnya.

Dalam perkembangannya, paguyuban trah ini ada yang terus berjalan lancar dan bertambah jumlahnya, namun ada pula yang tidak menentu (pertemuan tidak tetap). Paguyuban trah yang terdiri /beranggotakan orang-orang yang status sosialnya hampir sejajar, berjalan lancar. Ini dapat ditemui pada mereka-mereka yang aktif dalam pertemuan trah. Mereka-mereka ini termasuk orang-orang yang cukup, tidak mengalami tekanan ekonomi.

Berbeda dengan paguyuban trah yang beranggotakan dari orang-orang dari berbagai lapisan sosial, ini memiliki perkembangan kurang lancar. Hal ini adalah wajar sebab diantara mereka ada yang ekonominya kuat tetapi ada pula yang ekonominya lemah; namun mereka ini adalah satu keluarga/kerabat. Bagi mereka yang ekonominya lemah, mereka ini yang susah diatur. Ada rasa pekewuh/enggan datang terus menerus tanpa membawa apa-apa. Sementara mereka yang ekonominya kuat, mereka terus menerus menyiapkan makan minum, walaupun hanya seadanya.

Dalam paguyuban trah wong cilik memang memiliki perkembangan yang sangat lamban bahkan ada yang macet. Pertemuan mereka tidak dapat dijadwalkan secara rutin, hanya paling tidak setahun sekali terutama pada waktu hari lebaran mereka dapat berkumpul. Pada saat lebaran ini mereka saling ketemu dan saling maaf-maafan. Nampak adanya rasa senang, tenteram dan damai dalam kegiatan ini. Hal ini sebetulnya telah membudaya/menjadi tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, hanya bedanya dalam pertemuan ini diadakan semacam acara tertentu. Acara tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga, terutama usaha menjaga hubungan baik dalam keluarga. Sebab tidak jarang diantara keluarga terjadi konflik, entah karena utang piutang yang tidak dibayar atau karena kesalah fahaman sehingga menimbulkan tidak saling menyapa. Selain itu, pertemuan trah ditujukan agar

mereka tetap saling mengenal kerabat satu dengan yang lain. Tidak jarang diantara mereka tidak saling kenal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi, atau karena memang tidak mau kenal karena perbedaan status sosial yang menyolok. Untuk menetralkan hal-hal tersebut maka dibentuk paguyuban trah ini. Jadi fungsi utama dalam paguyuban trah wong cilik ini adalah menetralkan kesenjangan ekonomi diantara warga/anggota paguyuban, mempererat rasa persaudaraan, dan menjaga kelangsungan hubungan baik diantara anggota trah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paguyuban trah membawa suasana bersatu dan menyatu dalam keluarga/kerabat. Jika hal ini terus didasari oleh rasa kekeluargaan, sedarah, sefamili, sepenanggungan, kebersamaan, dan solidaritas yang tinggi; maka paguyuban trah ini dapat dikatakan sebagai wadah atau alat pemersatu dalam keluarga. Dan jika dalam keluarga telah ditemukan rasa kebersatuan ini, dalam masyarakatpun mereka ingin bersatu pula. Selain itu, paguyuban trah dianggap sebagai tempat/wadah yang sangat pas untuk mewujudkan jati diri pada jaman globalisasi ini. Dan trah dapat pula digunakan untuk mengantisipasi kebingungan-kebingungan pada masyarakat akibat adanya perubahan yang terjadi di saat ini.

Dalam kaitannya dengan integrasi nasional, paguyuban Trah ini tidak mengganggu dalam pengertian walaupun orang Jawa ini membentuk kesatuan pada sukunya sendiri namun mereka tetap menjalin hubungan baik dengan suku-bangsa pendatang. Pada dasarnya paguyuban Trah ini hanya mereka gunakan sebagai ajang "kangen-kangenan" saja bukan sebagai tempat untuk memisahkan diri atau penonjolan sukuisme terhadap suku-bangsa lain.

## **2). Persatuan Keluarga.....**

Kelompok sosial yang menggunakan nama Persatuan Keluarga... banyak dilakukan oleh suku-bangsa pendatang. Mengingat pendatang yang tinggal di Desa Caturtunggal ini berasal hampir dari semua propinsi yang ada di wilayah Indonesia maka nama kelompoknya ditambah dengan nama asal propinsi, atau nama klen. Contohnya: Persatuan Keluarga Irian Jaya, Persatuan Keluarga Sumatra Utara, Persatuan Keluarga Batak, Persatuan Keluarga Minangkabau, Persatuan Keluarga Bali, dan lainnya.

Keanggotaannya terdiri dari semua orang se daerah asal, atau dari satu suku/klen, biasanya mereka ini adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kelompok ini beranggotakan para kaum remaja. Bagi mereka yang sudah berkeluarga dan telah disebut dengan nama "Orang Tua" diminta sebagai "Sesepuh" dalam kelompok sosial tersebut.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah: mempererat hubungan kekerabatan atau ke daerahan, mengingatkan kembali suasana daerah asalnya walaupun berada di tanah orang/ di perantauan, kangen-kangenan dengan dialeg bahasa daerahnya. Selain itu, bertujuan pula menampung dan memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi, saling bantu membantu, dan saling bagi rasa senasib sepenanggungan.

Kepengurusannya terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, dan dilengkapi dengan bapak penasehat/sesepuh. Pemilihan orang dalam kepengurusan ini berdasarkan musyawarah bersama yang dihadiri oleh seluruh anggota dalam kelompok tersebut.

Adapun tempat pertemuannya ditunjuk berdasarkan persetujuan bersama, biasanya berpindah-pindah dari tempat anggota yang satu ke tempat anggota yang lain. Mengingat mereka ini hampir semuanya pendatang yang hanya kost maka rumah yang digunakan untuk pertemuan tersebut diambil yang relatif luas.

Waktu pertemuan diputuskan berdasarkan musyawarah pula. Menurut pengakuan responden, waktu pertemuan dijadwal sebulan sekali, namun dalam prakteknya tidak demikian. Jika kebetulan ada suatu masalah yang harus segera diatasi maka pertemuan segera diadakan walaupun waktunya belum sampai satu bulan. Sebaliknya, jika tidak ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan maka dapat terjadi antara 3 sampai 6 bulan baru diadakan pertemuan.

Untuk menunjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka sering diadakan semacam pentas kesenian daerah. Lewat pentas ini mereka dapat mengumpulkan dana dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatannya. Selain itu, mereka mencari dana lewat donatur dari para orang tua yang mereka anggap sesepuh.

Dalam kegiatan kelompok sosial ini kadangkala terjadi pula masalah yang ditimbulkan dari dalam/intergroupnya. Biasanya hal ini dikarenakan adanya kesalahfahaman antaranggota/antarpengurus kelompok yang tidak segera ditangani dan diatasi. Untuk mengatasinya dibutuhkan campur tangan dari para sesepuh mereka. Bila ada masalah yang datang dari luar/antargroup, mereka selesaikan dengan jalan bermusyawarah dan juga melibatkan para sesepuh masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok sosial yang terbentuk karena kekerabatan/klen ini dalam misinya tidak mengganggu kelompok sosial yang lain. Mereka tetap saling menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok lain. Dengan kata lain, kehadiran kelompok sosial berdasarkan kekerabatan yang dilakukan oleh suku-bangsa pendatang adalah

sebagai ujud rasa sesuku/se daerah, dan rasa senasib sepenanggungan sebagai perantau; tidak mengganggu terwujudnya integrasi nasional Indonesia.

#### **b. Kelompok Sosial Berdasarkan Tempat Tinggal.**

Kelompok sosial ini terbentuk atas dasar persetujuan bersama antarwarga masyarakat baik itu penduduk asli/suku-bangsa asal maupun penduduk pendatang/suku-bangsa pendatang. Awal mula ide untuk membentuk kelompok sosial ini berasal dari adanya suatu gagasan dari beberapa penduduk setempat khususnya dari para pendatang yang ingin menyatu dengan penduduk asli di daerah yang mereka diami. Gagasan ini muncul akibat sering terjadinya kesalahfahaman antara penduduk asli/suku-bangsa asal dengan suku-bangsa pendatang yang sempat membuat hubungan antar mereka renggang.

Tampaknya ada semacam perbedaan persepsi antar mereka sehingga kesalahfahaman tersebut sering terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka timbullah ide untuk membentuk suatu perkumpulan antar warga masyarakat tanpa memandang itu penduduk asli setempat ataupun pendatang.

Berdasarkan persetujuan bersama, perkumpulan ini diberi nama "Paguyuban", yang artinya guyub atau rukun/bersatu tanpa konflik. Lebih lanjut nama paguyuban ini ditambah dengan nama hari dan pasarannya yang digunakan untuk waktu pertemuan. Contohnya: Paguyuban Sabtu Pahingan, Jumat Kliwonan, Minggu Legi dan lain-lain yang semuanya itu menggunakan nama hari dan pasaran. Dari dua puluh pedukuhan yang berada di wilayah Desa Caturtunggal ini, masing-masing pedukuhan ada paling tidak satu paguyuban.

Menurut informasi pejabat setempat, paguyuban ini diadakan sudah lama, merupakan suatu kelompok sosial dari berbagai macam etnis dalam suatu lingkungan tertentu, yakni lingkungan padusunan. Jadi paguyuban ini dibentuk berdasarkan lingkungan tempat tinggal.

Paguyuban ini muncul sewaktu ada semacam kles antar warga masyarakat yang kebetulan antar suku bangsa asal dengan suku bangsa pendatang. Melihat kejadian itu muncul/timbul suatu ide untuk membentuk suatu perkumpulan yang beranggotakan semua warga dusun tanpa pandang bulu, baik itu penduduk asli maupun pendatang. Melalui proses musyawarah antar warga masyarakat terbentuklah apa yang disebut dengan "Paguyuban". Agar ada perbedaan antar dusun satu dengan dusun yang lain maka nama paguyuban ditambah nama hari dan pasaran hari. Contoh: Paguyuban Selasa Kliwonan dan Minggu Pahingan ada di dusun Kledokan, Paguyuban Saptu Pahingan ada di dusun Santren, Paguyuban Jumat Kliwonan, Paguyuban

Minggu Legi, dan lainnya yang kesemuanya menggunakan nama hari dan pasaran yang berbeda-beda di setiap dusun.

Tujuan diadakannya paguyuban ini adalah untuk saling mempersatukan atau mengakrabkan antarwarga masyarakat agar tidak ada perbedaan antara penduduk lama (penduduk suku-bangsa asal) dengan penduduk baru (suku-bangsa pendatang). Sehingga dengan demikian terjalin hubungan baik antar warga masyarakat. Mereka dapat saling akrab lewat pertemuan kelompok tersebut. Kecurigaan yang semula timbul berubah menjadi persaudaraan.

Paguyuban ini beranggotakan seluruh warga masyarakat yang berstatus sebagai kepala keluarga (KK), tanpa memandang itu penduduk asli ataupun pendatang. Adapun jumlah keanggotaannya berbeda-beda tergantung dari jumlah kepala keluarga/KK yang ada di setiap dusun, ada yang jumlah anggotanya 50 KK, 70 KK, 80 KK. Jika ada dua kelompok paguyuban dalam satu dusun disebabkan karena dusun/pedukuhan tersebut memiliki jumlah kepala keluarga lebih dari 100 orang KK, contohnya: dusun Kledokan. Dusun ini memiliki dua kelompok paguyuban yaitu: Paguyuban Selasa Kliwonan dengan jumlah anggota 70 orang KK, dan Paguyuban Minggu Pahingan dengan jumlah anggota 80 orang KK.

Terdapat 79,7% responden yang terlibat dalam kegiatan paguyuban ini. Ada beberapa diantara responden yang menjadi pengurus. Bagi responden yang tidak terlibat disebabkan karena: responden sudah tua, dan karena tidak ada waktu.

Kepengurusan ditunjuk berdasarkan musyawarah bersama. Mereka yang duduk dalam kepengurusan ini diambil dari penduduk asli dan pendatang, dibuat seimbang sehingga merasa saling dipercayai dan dibutuhkan. Orang yang dipilih sebagai pengurus berdasarkan kemampuan berorganisasi, memiliki rasa tanggung jawab dan toleransi yang tinggi, mau kerja keras, dapat ngemong/sabar, jujur, disiplin, dan tidak membedakan golongan atau suku satu dengan yang lain, serta berwibawa. Jadi orang yang duduk dalam kepengurusan betul-betul diseleksi, bukan berdasarkan kekayaan namun lebih didasarkan atas jati diri seseorang. Dengan demikian kelompok paguyuban tersebut dapat berjalan lancar.

Waktu pertemuan dari paguyuban ini diadakan setiap 35 hari atau selapan sekali sesuai dengan nama paguyuban tersebut. Contoh: Paguyuban Selasa Kliwonan, pertemuannya diadakan setiap hari/malam Selasa Kliwon, Paguyuban Minggu Pahingan diadakan pertemuan kelompoknya setiap malam Minggu Pahing, dan seterusnya terjadi pada kelompok paguyuban yang lain.

Tempat pertemuan atau penyelenggaraannya tidaklah sama untuk setiap paguyuban tersebut, ada yang tempatnya di Bapak ketua paguyuban,



ada yang ditempatnya salah satu dari anggota paguyuban tersebut. Pada dasarnya pemilihan tempat untuk pertemuan dari paguyuban ini adalah tempat yang relatif luas yang dapat menampung seluruh anggota paguyuban tersebut.

Jangkauan kerja dari masing-masing paguyuban berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dusun. Ada dusun yang paguyubannya maju dibidang simpan pinjam dan arisan, ada yang maju dibidang sosial terutama dalam usaha mengumpulkan dana untuk membantu diantara warganya yang terkena musibah, ada yang maju dibidang pembangunan fisik dusun seperti: membuat pagar dusun, memasang konblok jalan dusun, membuat gorong-gorong air, dan membangun balai dusun. Dana yang digunakan tersebut berasal dari warga masyarakat dusun setempat dengan cara iuran setiap ada pertemuan. Ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi, yang berarti ikut membantu mensukseskan pembangunan bangsa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paguyuban yang muncul di setiap padusunan mampu membantu mengentaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat dan mampu memajukan dusunnya lewat program-programnya. Selain itu, kehadiran paguyuban ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi antarwarga masyarakat untuk saling menghormati, menerima dan mengakui sama-sama bangsa Indonesia. Mau saling membina untuk mewujudkan kerukunan, kegotong-royongan, kebersamaan, kerja sama diantara warga masyarakat tanpa memandang perbedaan golongan atau etnis.

Keberadaan "paguyuban" ini merupakan ujud nyata dari ungkapan rasa kesatuan dan persatuan antarsuku-bangsa. Semua tindakan yang dilakukan lewat kegiatan kelompok sosial ini merupakan salah satu ujud terbentuknya integrasi nasional Indonesia. Dengan kata lain, kelompok sosial yang menamakan diri "Paguyuban" ini merupakan salah satu wadah terbentuknya integrasi nasional Indonesia.

### **c. Kelompok Sosial Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.**

Selain kelompok sosial yang terdiri dari para kepala keluarga terdapat pula kelompok sosial yang terdiri dari kaum remaja yang dikenal dengan nama "Kelompok Pemuda". Kelompok pemuda ini merupakan kelompok sosial yang beranggotakan kaum remaja. Kelompok Pemuda ini hampir sama dengan Karang Taruna,

perbedaannya: kegiatan Karang Taruna dibawah naungan pemerintah dan selalu berpedoman pada pasal 5 dan SK MENSOS RI No.11/HUK/1988 yang menandakan bahwa tugas pokok Karang Taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial baik secara

preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dalam wilayah Desa Caturtunggal. Sementara itu Kelompok Pemuda ini merupakan suatu perkumpulan yang terbentuk oleh adanya satu keinginan, satu tujuan, berdasarkan musyawarah bersama antar kaum pemuda dilingkungan setempat.

Responden yang terlibat dalam kegiatan kelompok pemuda ini hanya sedikit yakni 18,9%, separonya terlibat dalam kepengurusan. Responden yang terlibat dalam kegiatan kelompok pemuda ini adalah responden yang berstatus belum kawin.

Tujuan utama dari kelompok pemuda ini adalah mempererat dan menjaga hubungan baik antar pemuda di wilayah setempat, ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di dusunnya.

Kelompok pemuda ini mengadakan pertemuan tidak rutin/tidak tetap, tergantung kebutuhan. Contoh: jika akan ada perayaan HUT RI sebulan atau dua bulan sebelumnya mereka baru mengadakan rapat bersama. Contoh lain: jika ada orang yang akan punya pesta/gawe, biasanya pemuda dilibatkan dalam berbagai bantuan seperti :sinoman, dekorasi, seksi keamanan. Mereka mengadakan rapat hanya beberapa hari sebelumnya. Dalam satu bulan dapat terjadi dua atau tiga kali mengadakan pertemuan, tergantung kebutuhan saat itu. Namun ada kalanya beberapa bulan mereka tidak mengadakan pertemuan karena tidak ada kegiatan yang harus dilakukan.

Tempat pertemuan pada umumnya ditempat ketua pengurus, namun jika tempatnya sempit dapat menggunakan tempat lain: di balai dusun atau di tempat dari salah satu anggotanya.

Kepengurusannya dibentuk berdasarkan musyawarah bersama dan mereka yang duduk dalam kepengurusan ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa pembentukan kepengurusan itu tidak boleh ada unsur subyektifnya.

Jangkauan kerjanya: ikut menjaga keamanan dusun dengan ikut siskamling, memperhatikan tamu-tamu yang masuk dusun diluar jam malam, mendata para pendatang baru, membantu orang punya hajad, berkiprah di tempat orang yang kena kesusahan, melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan, ikut dalam kegiatan olah raga dan kesenian, dalam kegiatan bersih lingkungan. Kegiatan- kegiatan ini cukup banyak membantu warga masyarakat setempat. Bahkan dalam kaitannya dengan pengumpulan dana sosial, dari kalangan pemuda ini cukup banyak mengumpulkan uang.

Dalam perkembangannya dapat dikatakan cukup baik, karena kelompok pemuda ini dapat memberikan sumbangan baik material maupun spiritual. Sebagai generasi penerus, kelompok pemuda yang ada di Desa Caturtunggal ini mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan yang

terjadi di dusunnya. Mereka mampu membina hubungan baik antar kaum seajamnya tanpa memilah-milahkan agama,ras, suku/etnis lainnya. Tindakan seperti inijuga menunjukkan bahwa para kaum muda di Desa Caturtunggal sudah mampu berintegrasi dengan sesamanya dengan tidak membedakan itu suku-bangsa asal ataupun suku-bangsa pendatang.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, semua jenis kelompok sosial yang ada di Desa Caturtunggal tidak menunjuk ke unsur disintegrasi namun ke arah integrasi. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah identitas dari para pendukungnya, di mana mereka ini sebagian besar adalah para pelajar dan mahasiswa yang relatif berpendidikan tinggi. Selain itu, keberadaan semua jenis kelompok-sosial ini oleh pendukungnya dianggap sebagai wadah pertemuan sekaligus sebagai wahana komunikasi untuk memperkuat solidaritas bangsa dengan didasari oleh rasa kebersamaan, ke satu paduan, kerukunan, senasib sepenanggungan, dan rasa sebangsa.

## **2. Nilai Budaya**

Nilai budaya adalah seperangkat aturan yang terorganisasikan untuk membuat pilihan-pilihan dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat (Richard E. Porter dan Larry A. Samovar, 1993). Menurut Koentjaraningrat (1987) nilai budaya dapat berfungsi sebagai pedoman hidup manusia di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu berupa: adat istiadat, sistem norma, etika, moral, sopan santun, pandangan hidup, ideologi pribadi, ideologi nasional, dan lainnya. Sistem nilai budaya sering disebut dengan pandangan hidup atau ideologi yang merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini karena nilai-nilai budaya ada dan hidup di alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat itu sendiri, dari hal-hal yang dianggapnya sangat berharga dan paling penting dalam hidupnya sehingga berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakatnya. Nilai-nilai budaya pada suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang relatif singkat. Jika ingin mengubah paling tidak membutuhkan waktu satu atau dua generasi penerusnya. Hal ini disebabkan karena nilai budaya tersebut telah ada sejak kecil melalui proses sosialisasi, sehingga nilai tersebut telah terkonsep /berakar dalam dalam hati sanubari masyarakat pendukungnya.

Nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta/ daerah penelitian adalah sangat kompleks, maksudnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh Desa Caturtunggal memiliki penduduk/masyarakat yang berasal

dari berbagai propinsi yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di Desa Caturtunggal ini sebagian besar adalah para pendatang dari luar propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu banyaknya pendatang di daerah ini sangat sulit membedakan mana pendatang dan mana penduduk asli daerah tersebut. Kebanyakan mereka yang merupakan penduduk asli daerah tersebut tidak mesti lahir di desa tersebut, mereka ini banyak yang lahir di luar desa namun masih dalam satu propinsi DIY. Penduduk asli yang tinggal di desa Caturtunggal adalah suku-bangsa Jawa, sedang pendatang terdiri dari berbagai suku-bangsa dari semua propinsi yang ada di Indonesia.

Khususnya untuk suku-bangsa pendatang, mengingat adanya berbagai macam suku-bangsa di daerah penelitian ini maka tidaklah mungkin untuk diuraikan satu persatu. Sehubungan dengan hal itu nilai-nilai budaya yang akan diuraikan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yakni: kelompok suku bangsa dari Sumatra, kelompok suku bangsa dari Nusa Tenggara, dan kelompok lain-lain yang meliputi kelompok suku bangsa dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Diharapkan dari tiga pengelompokkan ini dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka nilai-nilai budaya yang akan diuraikan adalah mencakup :

#### **a. Nilai-Nilai Budaya Suku Bangsa Asal "Suku-Bangsa Jawa".**

Sebelum melangkah akan diuraikan lebih dulu tentang siapa itu orang Jawa/ masyarakat Jawa. Yang disebut orang Jawa adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa yang sebenarnya, maksudnya orang Jawa yang bukan berbahasa Melayu-Betawi, atau bahasa Sunda ,atau bahasa Madura. Menurut sejarahnya (Suseno,1984) semula di Jawa dipergunakan empat bahasa yang berbeda. Penduduk asli ibukota Jakarta bicara dalam dialek Bahasa Melayu yang disebut Melayu-Betawi. Di bagian tengah dan selatan Jawa Barat dipakai bahasa Sunda, sedang Jawa Timur di bagian utara dan timur sudah lama dihuni oleh migran dari Madura yang tetap mempertahankan bahasa mereka. Orang-orang yang tinggal di daerah dataran-dataran rendah pesisir utara Jawa Barat, dari Banten Barat sampai Cirebon, mereka ini menggunakan bahasa Jawa, namun cukup berbeda dari bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya. Bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya dijumpai di Jawa Tengah, termasuk DIY dan Jawa Timur. Jadi, orang Jawa yang asli adalah orang Jawa yang terdapat di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada saat itu (tahun 1984) jumlah orang Jawa kurang lebih 68 juta jiwa( Kodiran, 1993).

Dalam kebudayaan Jawa itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian ialah:

1. Kebudayaan Pesisir yang merupakan kebudayaan yang khas dari para penduduk pesisir utara yang memiliki hubungan perdagangan, pekerjaan nelayan, dan pengaruh Islam yang kuat.
2. Kebudayaan Kejawaen, kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah Jawa pedalaman. Kebudayaan ini mempunyai pusat budaya dalam kota-kota Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dan termasuk pula Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, Kediri, dan Malang.

Kebanyakan orang Jawa hidup sebagai petani atau buruh tani. Hal ini berkaitan dengan keadaan geografis pulau Jawa yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur dan cocok untuk daerah pertanian sehingga dikenal sebagai pulau yang bersifat agraris.

Penduduknya tinggal di desa-desa dekat dengan sawah pertaniannya. Baginya desa merupakan tempat tinggal yang tetap. Secara administratif desa langsung di bawah kekuasaan pemerintah kecamatan dan terdiri dari pedukuhan-pedukuhan. Tiap-tiap desa/kelurahan dikepalai oleh seorang kades, dan setiap dusun/desa dikepalai oleh seorang dukuh. Antara pedukuhan yang satu dengan pedukuhan yang lain selalu ada jalan yang menghubungkan.

Perumahan mereka ada di antaranya dilengkapi dengan lumbung-lumbung padi, kandang temak, dan perigi. Rumah-rumah mereka tampak berkelompok-kelompok.

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan pada prinsip keturunan bilateral, baik ditinjau dari nilai-nilai umum maupun adat istiadat khusus yang telah melembagakan nilai-nilai ini (Geertz, 1982). Penekanan asas bilateral ini keturunan dihitung secara sama baik melalui ayah maupun ibu. Harta warisan dibagi secara sama baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, memiliki sistem terminologi yang bersifat turun-temurun (generasional) yang simetris terhadap sanak saudara paternal dan maternal.

Sistem kemasyarakatan pada orang Jawa terlihat masih adanya perbedaan antara golongan "priyayi" dan golongan "*Wong cilik*". Golongan priyayi ini terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar, sedang golongan wong cilik terdiri dari kaum petani, tukang-tukang, dan pekerja-pekerja kasar lainnya. Disamping itu masih ada golongan bangsawan yang terdiri dari keluarga kraton dan keturunan bangsawan. Dalam status sosialnya, golongan priyayi dan golongan bangsawan ini termasuk golongan lapisan masyarakat kelas atas, sedang golongan wong cilik termasuk golongan lapisan masyarakat kelas bawah.

Berdasarkan semua uraian di atas, ternyata tidak semua orang Jawa memiliki karakteristik demikian. Hal ini dapat dilihat dari orang Jawa yang tinggal di daerah (Desa Caturtunggal), mereka adalah orang-orang Jawa yang tinggal di daerah perkotaan, dikelilingi oleh jalur lalu lintas yang sangat ramai dan media komunikasi yang relatif lancar.

Penduduk Desa Caturtunggal berjumlah 47.411 orang, namun dalam kenyataannya terdapat 74.671 orang (menurut sensus penduduk 1990). Hal tersebut terjadi karena banyak para pendatang yang tidak mau melapor atau mencari KTP sementara di Desa tersebut. Para pamong setempat membenarkan hal tersebut dan lebih lanjut dikatakan bahwa di Desa Caturtunggal ini sebetulnya terdapat kurang lebih 30.000 orang pendatang yang tidak tercatat pada monografi desa setempat.

Kepadatan penduduknya 5.502 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan tersebut bila dibandingkan dengan desa-desa lain (kepadatannya rata-rata masih dibawah 1000 orang/km<sup>2</sup>) yang ada di wilayah propinsi DIY, Desa Caturtunggal merupakan desa yang terpadat penduduknya. Kepadatan DIY saja hanya 980 orang per km<sup>2</sup>.

Kehidupan masyarakat di Desa Caturtunggal ini sebagian besar menggantungkan diri pada bidang non pertanian, hanya sebagian kecil (5,5%) yang bekerja di bidang pertanian. Tanah pertaniannya relatif sempit sebab sebagian besar (71,57%) tanahnya sudah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal/pemukiman penduduk.

Penduduknya sebagian besar berpendidikan, tidak ada yang buta huruf. Hal ini sangatlah mungkin karena daerah ini memang merupakan daerah tempat tinggal para pelajar dan mahasiswa dari segala penjuru tanah air. Selain itu, kalau dilihat dari jenis pekerjaannya yang mayoritas bekerja di bidang non pertanian menunjukkan kalau mereka ini paling tidak memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, kebudayaan Jawa khususnya yang ada di Desa Caturtunggal memiliki ciri-ciri tersendiri, tidak seperti kebudayaan Jawa pada umumnya. Pengaruh kehidupan di kota tampaknya yang membuat coraknya tersendiri. Namun demikian, dalam tindakannya/perilakunya mereka tetap orang Jawa. Dalam hidupnya, mereka tetap diatur oleh nilai-nilai/norma-norma budaya Jawa.

Ada dua kaidah dasar dalam kehidupan masyarakat Jawa, yaitu: "prinsip kerukunan" dan "prinsip hormat". Kedua prinsip ini merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi. Prinsip rukun bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis, yaitu dalam keadaan selaras, tenang, dan tentera, tanpa perselisihan

atau pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu. Sementara itu, prinsip hormat memainkan peranan yang besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa. Prinsip ini menunjuk pada sikap hormat terhadap orang lain baik dalam wujud bahasa maupun tindakannya. Yang jelas, masyarakat Jawa sangat mementingkan keselarasan.

Berdasarkan dua prinsip utama yang merupakan kaidah dasar dalam kehidupan masyarakat Jawa ini maka sudah sewajarnya bahwa dalam diri orang Jawa tersimpan nilai-nilai budaya yang memacu pada kehidupan yang rukun dan bersikap hormat/selalu menghargai terhadap sesama. Maka tampak dalam diri orang Jawa sifat-sifat: taqwa, nrimo, rukun, tenggang rasa/kebersamaan, gotong royong/bantu membantu, musyawarah, halus/sabar, ramah, toleransi, setia kawan, jujur, dan homat.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai budaya yang di anggap paling penting oleh suku-bangsa asal/suku-bangsa Jawa dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut.

**Tabel V.1**  
**NILAI-NILAI BUDAYA YANG DIANGGAP PALING**  
**PENTING OLEH SUKU-BANGSA ASAL**  
**DI DESA CATURTUNGGAL,1995**

No.	Nilai-Nilai Budaya	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Taqwa	2	2,6
2.	Nrimo	11	14,7
3.	Rukun	11	14,7
4.	Gotong Royong	26	34,7
5.	Musyawarah	1	1,3
6.	Tenggang Rasa	3	3,9
7.	Kebersamaan	1	1,3
8.	Halus	10	13,3
9.	Sabar	4	5,4
10.	Pemberani	1	1,3
11.	Terus Terang	1	1,3
12.	Keras	1	1,3
13.	Kerja keras	3	3,9
14.	Ulet	1	1,3
Jumlah		75	100,0

Sumber : Data Primer, 1995



Berdasarkan tabel V.1 tersebut, terlihat adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai budaya yang dianggap paling penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada masyarakat Jawa memang banyak nilai-nilai budaya yang dianggap penting, namun di antara nilai-nilai yang penting itu ada satu nilai yang dianggap paling penting.

Dalam tabel V.1 tampak adanya jawaban responden yang berbeda-beda tentang nilai budaya yang dianggap paling penting dalam kehidupannya. Paling banyak terdapat 34,7% responden mengatakan "gotong royong" merupakan nilai budaya yang dianggap paling penting dalam hidupnya. Mereka beranggapan demikian dengan alasan yang berbeda-beda antara responden yang satu dengan yang lain. Ada responden yang mengatakan gotong royong ini penting karena menurutnya dengan memiliki nilai gotong royong yang tinggi, mereka merasa sudah dapat menjalankan tugas hidupnya dengan baik dalam masyarakat. Responden yang lain mengatakan bahwa hidup ini tidak sendirian, selalu bersama dengan orang lain maka perlu adanya rasa gotong royong. Sementara responden lainnya mengatakan hidupnya terasa tidak berat jika kita ini dapat saling gotong royong dengan saling bantu membantu.

Dalam mengaktualisasi atau mewujudkan tindakan konkret, mereka tidak membedakan sukunya sendiri atau suku-bangsa lain. Selama mereka ini sebagai warga masyarakat di lingkungan desanya, wajib melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari senangnya membantu orang lain, baik dalam hal suka maupun duka. Gotong royong ini dapat dilihat pula pada waktu adanya kegiatan kampung seperti: bersih lingkungan, menyongsong HUT RI. Terlihat orang berbondong-bondong membersihkan rumput, menyapu/mengumpulkan sampah, hingga lingkungan mereka kelihatan bersih. Demikian pula waktu menjelang HUT RI, mereka bersama-sama menghias lingkungannya dengan berbagai lampu hias dan hiasan-hiasan lainnya sehingga kelihatan indah dan menyenangkan. Ada ungkapan yang menunjukkan sifat kegotong royongan ini, yakni: "sepi ing pamrih, rame ing gawe", yang maksudnya mau bekerja tanpa pamrih. Makna yang terkandung adalah menunjukkan rasa kegotong royongan tanpa memikirkan balasan. Nilai gotong royong ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena wujud konkretnya ada rasa kepedulian terhadap sesama.

Dalam tabel V.1 terdapat cukup banyak (14,7%) responden yang beranggapan bahwa nilai rukun adalah paling penting dalam hidup bermasyarakat. Mereka beranggapan demikian karena dengan kerukunan terhadap sesamanya, hidup ini akan terasa tenang, tenteram, dan damai. Hal ini sesuai dengan kaidah hidup orang Jawa yang selalu menekankan pada prinsip rukun dengan sesamanya tanpa memandang itu orang Jawa atau bukan.

Sebagai contoh: nilai rukun ini dapat dilihat dari sifat orang Jawa yang tidak senang kelahi, mereka senang rukun bersama siapa saja. Mereka berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik sehingga jarang terjadi konflik. Menurut masyarakat yang rukun adalah masyarakat yang terhindar dari konflik. Wujud konkritnya: ada salah satu warga yang senang bikin onar sehingga mengganggu ketenteraman desa. Warga ini didatangi, diberi saran-saran dengan menunjukkan sikap yang halus dan dengan rasa hormat. Akhirnya warga yang bikin onar tadi malu hati dan tidak bikin onar lagi. Ada ungkapan yang menunjukkan nilai kerukunan ini, yakni: "Rukun agawe santosa", maksudnya rukun membuat sentosa. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa kerukunan itu perlu dijaga agar dapat membuat kita kokoh. Nilai rukun ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Nilai nrimo tampaknya dianggap salah satu nilai yang paling penting oleh 14,7% responden orang Jawa. Nilai nrimo ini dapat dilihat dari sikapnya yang selalu menerima apa adanya. Mereka selalu mensyukuri kepada apa yang telah diperoleh. Jika terjadi sesuatu halangan, mereka nrimo/ pasrah kepada Tuhan bahwa itu sudah menjadi kehendakNya. Ungkapan yang menunjukkan sifat nrimo ialah "Alon-alon waton kelakon", maksudnya pelan-pelan asal selamat. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah menunjukkan adanya sifat narimo, dan pasrah dalam mencapai sesuatu tujuan, tidak harus berjuang mati-matian. Nilai ini tidak mendukung terwujudnya integrasi nasional karena tidak ada unsur pemersatu.

Sifat halus tampaknya dianggap pula sebagai salah satu nilai yang paling penting oleh 13,3% responden orang Jawa. Mereka beranggapan demikian karena menurut pendapatnya kehalusan sifat ini menunjuk pada pribadi seseorang. Orang yang halus biasanya hatinya baik. Menurutnya, hati yang baik merupakan unsur utama dalam membina hubungan baik dengan sesamanya, dapat pula digunakan untuk memerangi suatu tindak kekerasan sehingga suasana menyenangkan. Ada ungkapan yang menunjukan sifat halus, yakni: "Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti", maksudnya berani kokoh kemenangan di dunia hancur oleh pangastuti. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa menghadapi suatu kekerasan seharusnya dihadapi dengan cara halus sehingga kondisi hubungan tetap baik. Nilai halus ini sangat membantu terwujudnya integrasi nasional karena ada unsur pemersatu dengan menjaga hubungan baik dengan sesamanya.

Sifat sabar tampaknya juga dianggap salah satu sifat yang paling penting dalam hidup bermasyarakat. Terdapat 5,4% responden yang mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat perlu ditamamkan rasa sabar.

Menurut anggapan mereka, rasa sabar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Sebagai contoh : dalam kehidupan sehari-hari. orang Jawa terlihat dalam mengatasi suatu permasalahan tidak mau tergesa-gesa mengambil tindakan sebelum jelas permasalahannya. Ungkapan yang berkaitan dengan nilai sabar, yakni: "Sing sabar subur", maksudnya orang yang berhati sabar akan mendapat keselamatan. Ungkapan ini mengandung arti bahwa orang yang sabar/tahan penderitaan akan memperoleh keselamatan. Nilai ini sangat berguna dalam mendukung terwujudnya integrasi nasional karena merupakan alat pemersatu dalam mengambil tindakan.

Sementara itu, responden yang lain (2,6 %) mengatakan bahwa taqwa merupakan nilai yang paling penting dalam hidup ini. Mereka beranggapan demikian karena mereka merasa bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, oleh karenanya taqwa adalah urutan pertama yang harus dihayati dalam hidup ini. Nilai taqwa ini dapat dilihat dari ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ketaqwaan ini dapat dilihat pula dari hubungannya terhadap orang lain. Orang yang betul-betul taqwa biasanya orang itu berhati mulia, suci/bersih dan memiliki iman yang kuat. Mereka ini dalam perilakunya sehari-hari selalu kelihatan saleh dan berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk konflik. Dan seandainya terjadi konflik, diselesaikan secara damai. Ada ungkapan yang menggambarkan ketaqwaan seseorang, yakni: "Cagak amben cemethi tali", maksudnya tiang balai-balai cambuk tali. Makna yang terkandung didalam ungkapan ini ialah untuk menggambarkan seseorang yang kokoh lagi kuat dalam keyakinan /kepercayaan yang dianutnya. Ungkapan ini memberikan saran agar setiap orang bertaqwa dan taat kepada agama yang dianutnya. Nilai taqwa ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat digunakan sebagai alat pemersatu hubungan antar agama.

Di antara responden ada yang mengatakan bahwa dalam hidup ini musyawarah merupakan nilai budaya yang paling penting. Responden beranggapan demikian karena menurutnya dapat membawa kedamaian dalam hidupnya. Nilai musyawarah dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan sosial yang terbentuk dengan berdasarkan musyawarah bersama lebih dahulu sehingga memperoleh hasil yang baik. Dalam pertemuan-pertemuan selalu diadakan musyawarah baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun masalah yang berkaitan dengan lingkungan setempat. Musyawarah yang oleh orang Jawa dikenal dengan nama "*rembug bareng*" merupakan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang. Dengan dasar itu rasanya hidup itu sangat tenang, aman dan tenteram. Pernah ada suatu masalah yang melanda salah satu dusun di Desa Caturtunggal ini yaitu masalah

kenakalan remaja. Untuk mengatasi masalah ini pejabat setempat tidak gegabah mengambil sikap sendiri untuk mengatasinya, namun membicarakannya/ bermusyawarah lebih dahulu dengan pejabat-pejabat yang lain. Hasil musyawarah itu lalu digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat digunakan sebagai alat pemersatu pendapat yang berbeda sehingga suasana menjadi aman dan tentram.

Nilai tenggang rasa dimiliki pula oleh orang Jawa. Terdapat 3,9% responden yang mengatakan sifat tenggang rasa sangat penting dalam hidup, karena dengan adanya rasa tenggang rasa ini berarti mengurangi konflik karena mau memahami orang/budaya lain. Ungkapan yang ada kaitannya dengan rasa tenggang rasa adalah "Ora gampang wong urip neng alam donya", maksudnya tidak mudah orang hidup di dunia. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah orang hidup itu harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, sehingga harus mampu mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional, dapat digunakan sebagai alat pemersatu dalam memahami budaya lain.

Nilai kebersamaan orang Jawa dapat dilihat dari adanya rasa peduli terhadap orang lain. Menurut responden, wujud dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kegiatan dalam mengantisipasi suatu kejadian di daerahnya. Contoh: ada salah satu warga masyarakat yang tertimpa musibah yang membutuhkan banyak dana. Diam-diam para warga bersama-sama mengumpulkan dana dengan jalan minta sumbangan suka rela ke setiap warganya. Jika uang sudah terkumpul lantas diberikan/ disumbangkan kepada warga yang tertimpa tadi. Ada ungkapan yang menunjukkan sifat kesetia kawan ini, ialah: "Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan", maksudnya bukan sanak bukan saudara jika mati ikut kehilangan. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah adanya rasa turut bertanggung jawab/turut peduli atau turut menanggung risiko jika ada teman/masyarakatnya terkena musibah. Nilai kebersamaan ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional, dapat digunakan sebagai alat pemersatu yang diwujudkan dalam sikap peduli terhadap sesamanya.

Sementara itu, ada responden yang beranggapan bahwa sifat pemberani merupakan nilai yang paling penting dalam hidup ini. Hal ini dapat dilihat pada tindakan dalam mempertahankan dan membela kebenaran terhadap sesama. Dikatakan oleh responden, dia tidak takut menghadapi siapa saja bila ia berada dipihak yang benar. Nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat digunakan sebagai alat pemersatu dalam membela kebenaran.

Ternyata ada pula responden yang beranggapan bahwa sifat terus terang paling penting dalam hidupnya. Responden beranggapan demikian karena dapat membawa rasa kedamaian. Hal ini dapat dilihat dari pengakuannya/keterus terangnya yang lugu dihadapan orang lain. Ada ungkapan yang mengandung sifat keterus terangan ini, yakni: "Ora tedeng aling-aling", maksudnya tidak bertutup sekat (penutup). Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah berkata dengan terus terang/jujur, tanpa ada perbuatan atau tindakan yang ditutupi sedikitpun, jadi terus terang. Tindakan ini membuat hidup ini terasa enak, tidak ada kekawatiran. Nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat membawa kedamaian.

Dalam diri orang Jawa dijumpai pula adanya sifat "keras". Sifat keras olehnya dianggap paling penting dengan alasan hidupnya akan kokoh. Menurut responden, keras diartikan sebagai orang yang memiliki pendirian/berpendirian tetap. Nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat ikut memperkuat kehidupan bangsa.

Dalam hidup ini tampaknya diperlukan pula adanya kerja keras. Responden yang beranggapan demikian ini memiliki persepsi hidupnya akan bahagia. Dalam pengakuannya, mereka mengatakan bahwa dengan kerja keras hidupnya lumayan. Semboyannya: seseorang jika ingin cukup hidupnya, harus kerja keras. Ada ungkapan yang menyarankan/ memberikan nasehat agar orang itu suka bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Contoh ungkapan tersebut: "Aja dhemen thenguk-thenguk nemu kethuk", maksudnya jangan senang duduk berpangku tangan tetapi mengharapkan penghasilan yang banyak. Ungkapan ini mengandung makna suatu nasehat/dorongan untuk suka kerja keras, tidak bermalas-malasan. Ungkapan lain yang hampir sama maknanya ialah: "Aja njagakake endhoke si blorok", maksudnya jangan terlampau mengharapkan telornya si blorok. Makna yang terkandung didalamnya adalah orang tidak boleh mengharapkan suatu rejeki yang belum pasti, melainkan harus ditempuh dengan kesediaan bekerja keras. Kerja keras ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sosial.

Nilai lain yang ada pada diri orang Jawa yang dianggap paling penting adalah sifat yang ulet. Menurut responden, dengan modal ulet ini kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Memang ada orang Jawa yang memiliki sifat ulet ini namun jumlahnya relatif kecil. Biasanya sifat ulet ini muncul dari adanya suatu kegagalan yang pernah melandanya. Nilai ini dapat mendukung terwujudnya integrasi nasional dalam konteks mewujudkan kesejahteraan sosial.

Keempat belas jenis nilai pada tabel V.1 adalah dianggap penting oleh responden suku-bangsa Jawa, namun di antaranya ada nilai yang dianggap

paling penting oleh masing-masing pendukungnya. Perbedaan persepsi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti: faktor pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan, dan lainnya, yang kesemuanya itu membuat setiap orang memiliki anggapan sendiri-sendiri tentang nilai yang dianggap paling penting dalam hidupnya.

Semua nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan responden masyarakat Jawa. Semua nilai-nilai ini bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang harmonis, tenang, tenteram bersama orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memiliki dan dilandasi oleh nilai-nilai budaya tersebut, rasa solidaritas, kesatuan, dan kebersamaan terhadap sesama dapat mudah terwujud. Jika nilai-nilai tersebut betul-betul dipahami dan dihayati, sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional bangsa Indonesia.

#### **b. Nilai Budaya Suku-Bangsa Pendatang**

Dalam menguraikan nilai budaya suku-bangsa pendatang akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni: Kelompok suku dari Sumatra, kelompok suku dari Nusa Tenggara, dan kelompok suku pendatang dari pulau yang lainnya. Dari uraian masing-masing kelompok ini diharapkan paling tidak dapat memberikan gambaran tentang nilai budaya yang ada dan yang dianggap paling penting dalam kehidupan suku-bangsa pendatang di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai budaya yang terdapat pada tiga kelompok suku-bangsa pendatang diukur/dilihat dari nilai-nilai yang dianggap paling penting oleh suku-bangsa pendatang tersebut. Anggapan tersebut berbeda-beda antara responden yang satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut.

**Tabel V.2**  
**NILAI-NILAI BUDAYA YANG DIANGGAP PALING PENTING**  
**OLEH SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No.	Nilai Budaya		Sumatra	Nusa Tegr	Lain-lain	Jumlah
1.	Taqwa	N	9	6	11	26
		%	17,6	14,3	17,7	16,7
2.	Nrimo	N	-	-	2	2
		%	-	-	3,2	1,2
3.	Rukun	N	1	2	6	9
		%	2,0	4,8	9,7	6,0
4.	Gotong Royong	N	5	2	7	14
		%	9,8	4,8	11,3	9,0
5.	Musyawarah	N	2	3	2	7
		%	9	7,1	3,2	4,8
6.	Tenggang rasa	N	1	3	5	9
		%	2,0	7,1	8,1	6,0
7.	Kebersamaan	N	5	7	6	18
		%	9,8	16,7	9,7	12,0
8.	Halus	N	1	1	1	3
		%	2,0	2,4	1,6	1,9
9.	Sabar	N	1	1	1	3
		%	2,0	2,4	1,6	1,9
10.	Pemberani	N	9	2	7	18
		%	17,6	4,8	11,3	12,0
11.	Terus Terang	N	7	3	3	13
		%	13,7	7,1	4,8	8,4
12.	Keras	N	7	4	6	17
		%	13,7	9,5	9,7	11,0
13.	Kerja Keras	N	3	7	4	14
		%	5,9	16,7	6,4	9,0
14.	Ulet	N	1	1	2	4
		%	2,0	2,4	3,2	2,6
Jumlah		N	52	42	63	157
		%	33,1	26,8	40,1	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Keterangan : Lain-lain: suku-bangsa asal Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Irian.



Berdasarkan tabel V.2, ke empat belas nilai budaya yang merupakan nilai yang dianggap paling penting ini memiliki jumlah pendukung yang berbeda-beda, baik yang ada pada suku-bangsa pendatang dari Sumatra, Nusa Tenggara, maupun dari kelompok pulau-pulau yang lain.

Dilihat secara keseluruhan, dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang ini jumlah pendukung yang paling banyak adalah pada nilai: taqwa (16,7%), kemudian kebersamaan (12,0%), pemberani (12,0%), dan keras (11,0%), sedang nilai-nilai lainnya memiliki jumlah pendukung relatif sedikit. Tentunya banyak sedikitnya pendukung masing-masing nilai budaya ini sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap nilai budaya yang dianggap paling penting tersebut.

Nilai-nilai budaya yang ada pada tiga kelompok suku-bangsa pendatang ini merupakan nilai-nilai yang biasa mereka wujudkan dalam tindakan sehari-hari, namun diantara nilai-nilai budaya tersebut ada satu diantaranya yang dianggap paling penting dalam hidupnya.

Dari hasil penelitian (lihat tabel V.2), nilai taqwa tampak memiliki jumlah pendukung paling banyak (16,7%). Penyebaran pendukungnya hampir sama, baik pendukung dari suku-bangsa asal Sumatra, pendukung dari suku-bangsa asal Nusa Tenggara, dan dari pulau-pulau lainnya. Namun demikian, responden selaku pendukung nilai tersebut berbeda dalam memberikan alasan tentang paling pentingnya nilai taqwa tersebut dalam hidupnya. Sebagian responden mengatakan nilai taqwa ini dianggap paling penting dalam hidupnya dengan alasan bahwa mereka sebagai suku-bangsa pendatang yang jauh dari keluarga merasa tidak punya siapa-siapa disini, merasa sendirian. Untuk mengatasi rasa tersebut, mereka meningkatkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan dalam bentuk tindakan rajin menjalankan ibadah. Jadi pengertian taqwa dalam konteks ini adalah rasa ingin menyatu dengan Tuhan. Sebagian responden yang lain mengatakan bahwa taqwa merupakan tugas dan kewajiban bagi orang yang beragama, dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena itu, agama tidak boleh dipaksakan kepada siapa saja. Dalam kehidupan bersama, baik dengan agamanya sendiri maupun agama lain taqwa diwujudkan dalam suatu tindakan untuk berusaha selalu saling menghormati dan bekerja sama dengan agama lain. Menurut responden, semua tindakan tersebut sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional di mana nilai taqwa diangkat sebagai nilai yang dapat mempersatukan umat beragama.

Nilai nrimo dianggap sebagai nilai yang paling penting dalam hidup bagi sebagian kecil (1,2%) responden suku-bangsa pendatang. Tampaknya hanya suku-bangsa pendatang yang termasuk dalam kelompok lain-lain saja yang menganggap nilai nrimo ini paling penting dalam hidupnya. Menurutnnya,

sikap nrimo ini menunjukkan adanya sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan cobaan. Suku-bangsa pendatang yang berasal dari Sumatra dan Nusa Tenggara, yang berpersepsi nilai nrimo dianggap tidak paling penting dalam hidupnya karena mereka beranggapan orang yang nrimo adalah orang yang malas, orang yang hanya menyerah pada keadaan tanpa ada usaha. Berdasarkan persepsi responden dari suku bangsa pendatang asal Sumatra dan Nusa Tenggara ini menganggap nilai nrimo tidak mendukung integrasi nasional bangsa Indonesia.

Sementara itu, terdapat 6,0% responden yang menganggap nilai rukun merupakan nilai yang paling penting dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari jumlah pendukungnya, paling banyak berasal dari suku-bangsa pendatang dalam kelompok lain-lain. Pendukung yang berasal dari Sumatra jumlahnya paling sedikit. Bagi responden yang menganggap nilai rukun ini paling penting dalam hidupnya dengan alasan rukun membawa kedamaian, kesatuan dalam hidupnya. Nilai ini sering tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dan terutama sangat diperlukan dalam usaha menjalin hubungan baik terhadap orang lain. Bagi pendukungnya, nilai ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dalam nilai tersebut terkandung usaha menjalin hubungan baik terhadap orang lain.

Nilai rukun dianggap paling penting pula oleh sebagian (6,0%) dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang. Pada dasarnya semua suku-bangsa pendatang menganggap nilai tersebut penting tapi bukan yang terpenting dalam hidupnya. Menurut persepsi mereka, anggapan tentang penting dan paling pentingnya nilai rukun ini dalam kehidupan bermasyarakat, karena nilai tersebut sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional bangsa Indonesia.

Nilai gotong royong dianggap paling penting pula oleh 9,0% responden suku-bangsa pendatang. Dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang, pendukung paling sedikit dari suku-bangsa asal Nusa Tenggara. Perbedaan jumlah pendukung nilai ini disebabkan karena perbedaan persepsi. Responden yang menganggap nilai gotong royong ini paling penting dalam hidupnya, terdapat pada mereka yang aktif dalam berbagai macam kegiatan di berbagai bidang. Sering terlihat keterlibatan para pendatang dalam kegiatan kampung, dan dalam acara-acara hari besar. Menurut responden tindakan ini dilakukan dalam usaha mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan terhadap sesama manusia, dan sebagai wujud adanya rasa kekeluargaan sebagai satu bangsa Indonesia. Tindakan ini menurut responden sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional bangsa Indonesia karena dapat digunakan sebagai alat persatuan terhadap sesama.

Nilai musyawarah merupakan nilai yang dianggap paling penting oleh 4,8% responden dari ketiga suku-bangsa pendatang. Dari semua pendukungnya, paling banyak dari suku-bangsa asal Nusa Tenggara. Dalam wujud konkretnya, nilai musyawarah ini tampak pada usaha menyelesaikan suatu tugas dalam kelompoknya. Terutama bagi responden yang terlibat dalam suatu organisasi/perkumpulan lainnya, mereka selalu musyawarah dalam melakukan tugas demi kepentingan bersama. Semua keputusan yang diambil adalah merupakan hasil musyawarah dari seluruh anggota kelompoknya. Dan dalam musyawarah ini selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menurut responden mendukung terwujudnya integrasi nasional karena di dalamnya mengandung makna demi kepentingan bersama.

Nilai tenggang rasa dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat 6,0% responden dari ketiga suku-bangsa pendatang yang menganggap nilai tersebut paling penting. Nilai tersebut dianggap paling penting karena mereka merasa sebagai pendatang selalu berusaha untuk menunjukkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Menurutnya, dengan mengembangkan sikap tenggang rasa ini hubungannya dengan orang lain relatif baik. Menurut sebagian responden, tindakan tenggang rasa ini menunjukkan adanya sikap saling mencintai terhadap sesamanya. Responden yang lain berpandangan bahwa sikap tenggang rasa menunjukkan suatu sikap tidak semena-mena dengan orang lain. Semua pandangan ini menurut responden menurut responden menunjuk pada proses terwujudnya integrasi nasional karena di dalam nilai tenggang rasa ini terkandung sikap saling mencintai, tidak semena-mena.

Nilai kebersamaan tampak jelas di dukung oleh 12,0% responden dari ketiga suku-bangsa pendatang. Bagi mereka yang sebagai perantau ini merasa sangat perlu mengembangkan nilai kebersamaan tersebut dengan tujuan agar tidak dikucilkan orang. Responden beranggapan bahwa dengan memiliki nilai kebersamaan ini menunjukkan orang itu suka damai, rela berkorban demi orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berusaha untuk ingin menyatu dengan siapa saja, baik dengan sama-sama pendatang maupun dengan penduduk setempat/suku bangsa asal/suku Jawa. Nilai kebersamaan ini menurut mereka sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena di dalam nilai ini terkandung unsur-unsur yang sifatnya menyatukan.

Nilai halus tampak kurang kelihatan, maksudnya sangat sedikit jumlah pendukungnya. Hanya 1,3% responden yang mengatakan sifat halus dimiliki agar dalam berhubungan dengan orang lain itu kesannya menyenangkan. Menurut persepsi responden, secara tidak langsung nilai ini dapat mendukung

integrasi nasional karena dapat digunakan untuk mewujudkan hubungan yang menyenangkan/harmonis.

Nilai sabar tidak begitu tampak pula dalam ke tiga suku-bangsa pendatang, hanya sedikit (1,9%) pendukungnya. Dikatakan oleh responden, kadang kalanya orang itu perlu menunjukkan sifat sabar terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalah fahaman. Menurut Responden nilai ini sangat penting dalam mendukung integrasi karena dapat digunakan untuk mengurangi kesalah fahaman yang dapat menimbulkan disintegrasi.

Nilai pemberani pada kelompok suku pendatang ini tampak tinggi jumlahnya, yakni 12,0%. Kelompok pendatang dari Sumatra memiliki jumlah yang paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sebagai perantau harus berani menghadapi segala macam rintangan. Dari pengakuan beberapa responden, dikatakan bahwa sikap pemberani dimaksudkan berani membela kebenaran kepada siapapun demi keadilan. Wujud konkret yang dialami oleh responden, mereka pernah merasa tidak bersalah namun mendapat tuduhan maka mereka berani menghadapinya. Pengalaman yang lain, pernah mereka mendapat perlakuan yang tidak adil di tempat kostnya. Oleh semua perlakuan itu membuat dia berani menghadapinya demi kebenaran dan keadilan. Menurut Responden nilai pemberani ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional karena dalam wujud konkretnya dapat digunakan untuk membela kebenaran dan keadilan.

Nilai terus terang banyak didukung oleh suku-bangsa pendatang dari Sumatra. Tampaknya orang Sumatra ini dikenal sifatnya yang terus terang tersebut. Wujud konkretnya dapat dilihat dari pengakuan sebagian responden yang pernah mengalami keterlambatan dalam membayar uang kost, mereka mengatakan terus terang belum dapat membayar pada saatnya karena kiriman belum datang. Sikap keterus-terangan ini ditanggapi baik oleh pemilik kostnya, dan ternyata tidak mengganggu hubungan baik antar mereka. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa nilai tersebut menurut responden dapat mendukung dalam mewujudkan integrasi nasional.

Nilai keras tampak banyak dimiliki juga oleh pendatang dari Sumatra. Keras yang dimaksudkan mereka adalah keras dalam pendirian. Menurutny, pendirian yang keras itu perlu tapi jangan merugikan pihak/orang lain. Pendirian keras ini menurutnya sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional.

Kerja keras tampaknya dianggap salah satu nilai yang paling penting dalam hidup bermasyarakat oleh 9,0% responden suku-bangsa pendatang. Menurut persepsi mereka, kerja keras itu penting dalam hidup setiap manusia. Dikatakan responden bahwa orang yang mau hidup berkecukupan, harus mau dan suka bekerja keras. Disamping itu, perlu dilandasi sifat jujur sehingga tidak

merugikan pihak lain. Tindakan ini bagi responden sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional.

Nilai ulet tampaknya perlu dimiliki oleh setiap orang yang mau berhasil cita-citanya. Menurut persepsi para pendukungnya, sifat ulet ini dilakukan agar apa yang dicita-citakan dapat berhasil. Menurut pengalamannya, usahanya dapat sukses karena keuletannya. Nilai ini dapat mendukung terwujudnya integrasi nasional dalam konteks mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari semua uraian tentang nilai-nilai budaya yang dianggap paling penting oleh ketiga suku-bangsa pendatang ini, hampir semuanya dapat mendukung terwujudnya integrasi nasional. Hanya ada satu nilai yaitu nilai nrimo dianggap tidak dapat mendukung integrasi nasional karena hanya menunjuk pada sifat individu.

### **3. Integrasi.**

Integrasi suku-bangsa yang ada dapat dilihat dari konsep-konsep yang sama atau yang terkait dengan integrasi yang ada pada suku-bangsa tersebut. Suku-bangsa yang bersangkutan mungkin telah memiliki konsep-konsep yang terkait dengan integrasi ini. Konsep-konsep yang terkait dengan integrasi ini adalah yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemungkinan terjadi perbedaan konsep-konsep yang dapat menimbulkan disintegrasi dalam suku-bangsa tersebut.

Dari pengertian di atas, konsep-konsep integrasi yang mau dikaji dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep yang mengandung nilai: rukun, gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, kebersamaan. Semua nilai-nilai ini telah ada dan dimiliki oleh baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Nilai-nilai tersebut akan dideskripsikan dalam konteks perilaku, atau hubungan sosial antar kelompok suku-bangsa. Adapun uraiannya dibedakan antara suku-bangsa asal dengan suku-bangsa pendatang.

#### **a. Suku Bangsa Asal/Suku Jawa.**

Konsep-konsep yang berkaitan dengan integrasi yang terdapat pada suku-bangsa asal mengacu pada konsep-konsep yang dimiliki dan dianggap paling penting dalam hidup bermasyarakat. Konsep-konsep tersebut akan dideskripsikan dalam konteks perilaku atau hubungan sosial antarsuku-bangsa. Nilai-nilai yang mengacu pada konsep tersebut dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini.

**Tabel V.3**  
**NILAI-NILAI BUDAYA YANG DIANGGAP PALING MENGACU**  
**KONSEP INTEGRASI PADA SUKU-BANGSA ASAL**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No.	Nilai-Nilai Budaya	Jumlah (n)	Prosentase (%)
1.	Rukun	27	36,0
2.	Gotong Royong	26	34,7
3.	Musyawarah	10	13,3
4.	Tenggang Rasa	5	6,7
5.	Kebersamaan	7	9,3
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995.

Dalam tabel V.3 hanya terlihat 5 buah nilai budaya saja yang menurut responden suku-bangsa asal dianggap paling mengacu integrasi. Hal ini bukan berarti nilai-nilai budaya yang lain yang ada pada suku-bangsa tersebut tidak mendukung, namun disini dilihat dari nilai-nilai yang paling kelihatan, dalam konteks perilaku atau hubungan sosial antarwarga masyarakat.

Berdasarkan tabel V.3 di atas, konsep integrasi yang banyak didukung oleh responden suku-bangsa asal adalah nilai budaya rukun, yakni 36,0%. Rukun ini oleh responden suku-bangsa asal (suku-bangsa Jawa) dianggap sebagai salah satu konsep yang mendasar dalam kehidupan mereka, sangat menentukan semua bentuk konkret dari perilaku atau hubungan sosial dalam masyarakat. Wujud konkretnya mengacu pada pendapat Franz Magnis Suseno (1993) yang mengatakan nilai tersebut dapat diukur dari sejauh mana mereka dapat hidup berdampingan dengan siapa/suku apa dan apa alasannya, serta apakah mereka pernah terjadi konflik dan dengan suku-bangsa apa, dan apa alasannya, usaha-usaha apa yang dilakukan agar tetap rukun. Menurutnya, prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang, dan tenteram, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Keadaan rukun dilukiskan di mana semua orang, dan semua pihak berkeinginan dan bertindak ke arah suasana damai, saling tolong menolong, saling bekerja sama, memiliki rasa kebersamaan, rasa kesetia kawan, kegotong royongan, saling menerima dengan tenang dan sepakat.

Kerukunan yang terdapat pada responden suku-bangsa asal/suku-Bangsa Jawa dapat dilihat dari: suku-bangsa yang paling disenangi untuk tinggal bersama/berdampingan dengannya, alasan tinggal berdampingan, konflik yang pernah terjadi, dengan suku-bangsa apa, dan usaha-usaha yang dilakukan agar tetap rukun.

Suku-bangsa yang paling disenangi untuk hidup berdampingan oleh responden suku-bangsa Jawa, dapat dari sukunya sendiri ataupun dari suku-bangsa lain. Dari jawaban mereka ternyata sebagian besar suku-bangsa yang paling disenangi untuk hidup berdampingan adalah suku Jawa. Dengan kata lain, sebagian besar responden menyenangi hidup berdampingan dengan sukunya sendiri, yaitu suku-bangsa Jawa. Alasan responden menyenangi sukunya sendiri untuk tinggal bersama /berdampingan karena dianggap memiliki sifat-sifat budaya yang sama yaitu: sifatnya yang halus, nrimo, rukun, dan senang gotong royong. Tindakan seperti ini tidak mendukung integrasi karena mereka hanya mau tinggal berdampingan dengan orang sesuku. Penonjolan sukuisme dalam hubungan sosial ini sangat mengganggu terwujudnya integrasi nasional. Dari sini tampak bahwa konsep rukun tidak selalu dapat mendukung integrasi.

Bagi responden suku-bangsa asal (suku-bangsa Jawa) yang paling senang hidup berdampingan dengan suku-bangsa lain terutama dari Sumatra dengan alasan karena orang Sumatra senang terus terang. Sementara itu, bagi responden yang paling menyenangi hidup berdampingan dengan suku dari Nusa Tenggara dengan alasan mereka ada rasa saling pengertian. Ternyata ada responden suku-bangsa asal yang tidak menjawab suku mana yang paling disenangi untuk tinggal berdampingan dengannya. Hal ini disebabkan karena responden memandang semua suku dianggap sama saja, tidak ada suku yang paling disenangi. Pandangan ini menunjukkan bahwa responden mau tinggal berdampingan dengan suku apa saja. Tindakan ini sangat mendukung terwujudnya integrasi karena tidak mau menonjolkan sukuismenya, atau agamanya.

Dalam kaitannya dengan masalah hidup berdampingan ini ternyata ada hal/unsur yang dianggap penting dalam memilih kelompok tertentu. Hal-hal yang dianggap penting ini adalah menyangkut empat unsur yakni : kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan suku dan agama, dan kecocokan sifat/perilaku.

Bagi responden yang mengatakan senang berdampingan dengan orang yang sesuku atau kesamaan suku dengan alasan dapat mudah berkomunikasi, mereka memandang bahwa bahasanya lebih baik dan merasa lebih senang menggunakan bahasanya sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ada pula yang memberikan alasan merasa dekat, aman dan merasa satu budaya



hidup berdampingan dengan sukunya sendiri, mereka berpandangan bahwa hidup berdampingan dengan suku lain akan menimbulkan berbagai masalah.

Bagi responden yang memilih hidup berdampingan dengan suku yang beragama sama/kesamaan agama ada 26,7%. Alasan responden adalah dapat berdoa bersama-sama, dapat saling mengingatkan, dan merasa tenteram. Mereka yang memberikan alasan agar dapat berdoa bersama-sama ini menunjukkan bahwa mereka ini membutuhkan teman dalam menjalankan ibadahnya, takut pergi sendirian. Jadi menurut mereka, kerukunan dipandang/diartikan jika mereka yang seagama ini dapat berdoa bersama-sama dalam menjalankan ibadahnya. Mereka yang memberikan alasan agar dapat saling mengingatkan menunjukkan bahwa mereka ini memiliki pendirian yang kurang tetap sehingga kemungkinan mudah tergoyahkan. Dalam keadaan seperti ini membutuhkan pertolongan orang lain yang seagama untuk mengingatkan agar tetap pada pendiriannya, demikian sebaliknya jika hal tersebut menimpa pada temannya, harus diingatkan.

Bagi mereka yang memberikan alasan merasa tenteram hidup dengan orang yang seagama menunjukkan adanya kekawatiran jika hidup berdampingan dengan agama lain. Rasa kekawatiran ini membuat hidupnya tidak aman. Namun jika mereka dapat hidup berdampingan dengan orang yang seagama rasanya sangat tenteram, merasa ada teman seiman sehingga misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditangani bersama-sama.

Diantara responden suku bangsa asal/Jawa ada yang mengatakan bahwa mereka memilih hidup berdampingan dengan suku dan agama yang sama. Alasannya adalah kalau dalam lingkungan tempat tinggalnya itu dikelilingi oleh orang-orang yang sesuku dan seagama rasanya betul-betul aman, tidak ada masalah. Pandangan ini menunjukkan bahwa mereka kurang banyak mengenal dan kurang banyak bergaul dengan suku lain yang berlainan agama sehingga pandangan terhadap suku dan agama lain masih relatif sempit. Responden yakin bahwa kalau hidup berdampingan dengan orang-orang yang sesuku dan seagama tidak akan timbul masalah.

Bagi responden yang merasa bahwa kecocokan sifat itu sangat penting dalam hidup berdampingan dengan orang lain, mereka berpandangan bahwa konsep tersebut mampu menjamin mengatasi perbedaan suku dan agama dalam hidup berdampingan dengan suku lain. Terdapat 97,2% responden yang setuju dengan pandangan tentang konsep ini. Bagi responden, kecocokan sifat yang dimaksudkan adalah cocok karena sifat yang dimiliki oleh bangsa /suku lain tersebut menurut pandangannya adalah baik. Menurut responden, sifat baik yang dimiliki suku lain ini dapat menciptakan suasana kehidupan khususnya dalam hidup berdampingan dengan orang lain yang baik pula. Pokoknya sifat

baik membawa kedamaian dalam hidup bersama/berdampingan. Dalam konteks ini, kerukunan dipandang sebagai "sesuatu yang dipandang baik yang dapat membawa kedamaian dalam hidup berdampingan bersama suku lain".

Dari keempat unsur tersebut, unsur kecocokan sifat merupakan unsur yang paling banyak digunakan untuk menentukan dapat tidaknya hidup berdampingan dengan orang lain. Namun biasanya, suku yang dianggap sifatnya paling cocok banyak berasal dari sukunya sendiri. Hanya terdapat sebagian kecil responden yang mengutamakan unsur kecocokan sifat dalam hidup berdampingan tanpa memandang suku dan agama. Tindakan inilah yang dapat mendukung terwujudnya integrasi nasional bangsa Indonesia.

Pada umumnya responden yang senang hidup berdampingan dengan mengutamakan suku atau agama yang sama, mempunyai kondisi hubungan tidak begitu baik, kadang kala timbul kesalah fahaman antar mereka. Terdapat 13,3% responden suku-bangsa asal yang pernah mengalami kesalahfahaman tersebut. Menurut mereka, kesalahfahaman ini terjadi dalam pergaulan sehari-hari, dalam wujud perkataan yang dianggap kurang sopan untuk dilontarkan. Selain itu, karena adanya prasangka yang tidak baik terhadap suku lain yang dianggap kasar, keras, dan pemberani, menimbulkan kesalahfahaman tersebut.

Kesalahfahaman yang terjadi tersebut dapat diatasi atau diselesaikan secara kekeluargaan ataupun lewat aparat pemerintah setempat. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahfahaman ini dengan menunjukkan sikap saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati.

Dalam hidup berdampingan dengan suku-bangsa lain, ada usaha-usaha yang dapat dilakukan agar tetap rukun. Usaha yang paling banyak dilakukan oleh responden suku-bangsa asal adalah dengan cara menjaga hubungan baik, hati-hati dalam tutur kata, dan toleransi. Cara yang lain, dapat ditunjukkan dengan sikap tenggang rasa dan saling pengertian. Semua cara-cara yang dilakukan ini mengacu pada usaha memahami budaya lain.

Pemahaman budaya lain ini dapat dilakukan pula lewat kesenian, pakaian, dan kawin campur (amalgamasi). Terdapat 65,3% responden suku-bangsa asal yang berusaha memahami kesenian, 68,5% berusaha mengenal pakaian adat, dan 85% responden sangat setuju/mendukung perkawinan antarsuku-bangsa.

Dari semua uraian di atas, aktualisasi konsep rukun dalam kehidupan antarsuku-bangsa, dalam hal ini antara suku-bangsa asal dengan suku-bangsa pendatang menunjukkan hubungan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah yang relatif kecil responden yang pernah mengalami kesalahfahaman, dan dari berbagai macam usaha yang dilakukan agar tetap rukun.

Gotong royong dianggap pula sebagai salah satu nilai budaya yang oleh responden paling mengacu pada konsep integrasi. Terdapat cukup banyak (34,7%) responden suku-bangsa Jawa yang mendukung konsep tersebut. Dalam wujud konkret, konsep gotong royong ini ditunjukkan dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat, seperti: gotong royong dalam membuat pagar, dalam membersihkan lingkungan, membuat konblok jalan dusun, dan dalam berbagai macam aktivitas sosial lainnya.

Selain gotong royong, musyawarah merupakan salah satu nilai yang dianggap paling mengacu pada konsep integrasi. Terdapat 13,7% responden suku-bangsa asal yang mendukung konsep tersebut. Dalam wujud konkretnya dapat dilihat dari sikap atau perilaku dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Menurut responden, musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan dengan saling berembung bersama. Tindakan ini sangat menentukan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain baik dengan suku-bangsanya sendiri maupun suku-bangsa lain. Musyawarah ini dilakukan dalam rangka mempersatukan pendapat dari berbagai macam pendapat yang berasal dari para anggota masyarakat. Disini terlihat adanya unsur pemersatu yang hasilnya dapat diterima oleh para pendukungnya. Dari pengakuan responden, musyawarah banyak dilakukan dalam pertemuan-pertemuan, baik dalam pertemuan acara rutin di kampung, dalam acara keagamaan, dalam acara di sekolah atau di fakultas, maupun pertemuan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada.

Tenggang rasa dianggap nilai yang paling mengacu pada konsep integrasi pula terdapat 6,7% responden suku-bangsa asal yang mendukung konsep ini. Sikap tenggang rasa yang sering responden lakukan adalah tidak menyinggung perasaan orang lain, menghormati sesama umat beragama, saling pengertian, memaklumi dan memaafkan tindakan orang lain yang mengganggu ketenangan lingkungan. Dengan adanya sikap seperti ini membikin suasana aman, tenteram, dan damai bersama orang atau suku lain.

Kebersamaan merupakan salah satu nilai yang dianggap paling mengacu atau dapat mendukung konsep integrasi. Terdapat 9,3% responden yang mendukung konsep tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari nilai ini diwujudkan dalam berbagai macam tindakan, seperti: kebersamaan dalam melakukan tugas di sekolahan, dalam melakukan tugas kampung, dan dalam organisasi atau kelompok sosial lainnya. Menurut responden, kebersamaan ini menunjuk pada rasa saling memiliki<sup>7</sup>, saling pengertian, bertanggung jawab, saling kerja sama, dan saling membantu dengan tidak memandang orang atau suku tertentu, atau dalam kegiatan tertentu, namun dalam segala bidang dengan semua orang yang terlibat di dalamnya tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, ataupun kelompok tertentu.

Dari semua uraian di atas, menunjukkan konsep-konsep integrasi yang dimiliki oleh suku-bangsa asal (suku-bangsa jawa) pada dasarnya telah ada dalam nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Terlihat adanya perbedaan konsep terhadap nilai-nilai budaya yang dianggap paling mengacu pada konsep integrasi. Aktualisasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau hubungan sosial antarsuku-bangsa menunjuk pada perbuatan yang kurang dapat mendukung integrasi. Hal ini dikarenakan dalam perilakunya masih didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menonjolkan suku atau agama.

Selain nilai-nilai budaya yang dianggap paling mengacu konsep integrasi, ada semacam pernyataan-pernyataan yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat integrasi. Pernyataan ini meliputi yang mendukung dan yang tidak mendukung integrasi. Pernyataan yang mendukung integrasi meliputi: "Tidak ada suku-bangsa di Indonesia ini yang lebih baik atau lebih buruk, semua sama saja". "Suku-bangsa saya tidak selalu lebih baik dari pada suku-bangsa lain", "Saya sangat rela bila ada salah satu anggota keluarga saya kawin dengan suku-bangsa lain". Semua pernyataan ini sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional dan mendapat dukungan dari sebagian besar responden.

Pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung integrasi, atau yang mengarah ke disintegrasi, yakni: "Hindarilah bergaul dengan suku-bangsa lain, karena anda akan dapat dipengaruhi oleh budaya mereka", "sifat-sifat suku-bangsa saya sangat membuat saya lebih tentram daripada sifat-sifat suku-bangsa lain", "Sifat-sifat suku-bangsa saya lebih baik dari pada sifat-sifat suku-bangsa lain". Pernyataan-pernyataan ini hanya dukungan dari sebagian kecil responden.

## **b. Suku-Bangsa Pendatang**

Suku-Bangsa Pendatang dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga kelompok, yakni: pendatang dari Sumatra, Nusa Tenggara, dan Lain-lain yang meliputi pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya.

Konsep integrasi yang ada pada responden dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang telah ada dan dimiliki oleh responden. Nilai-nilai tersebut akan dideskripsikan dalam perilaku atau hubungan sosial yang terjadi. Adapun konsep-konsep integrasi yang akan dikaji mengacu pada konsep nilai budaya pada suku-bangsa pendatang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut.

**Tabel V.4**  
**NILAI-NILAI BUDAYA YANG DIANGGAP PALING MENGACU**  
**KONSEP INTEGRASI PADA SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Nilai Budaya	Sumatra	NusaTegr	Lain-lain	Jumlah(n)
1	Rukun (n)	10	8	17	5
	(%)	19,6	19,1	27,4	22,7
2	Gotong royong (n)	5	5	9	19
	(%)	9,8	11,9	14,5	12,7
3	Musyawarah (n)	7	6	7	20
	(%)	3,7	14,2	11,3	13,2
4	Tenggang rasa (n)	6	4	11	21
	(%)	11,8	9,5	17,7	13,9
5	Kebersamaan (n)	24	19	19	62
	(%)	45,1	45,3	30,6	37,5
Jumlah (n)		52	42	63	157
(%)		33,1	26,8	40,1	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Dalam tabel V.4 di atas terlihat ada 5 buah nilai budaya yang dianggap paling mengacu konsep integrasi. Hal ini bukan berarti bahwa pada suku-bangsa pendatang ini hanya ada 5 buah nilai yang dapat mengacu konsep integrasi, namun ada nilai-nilai yang lain juga. Pada kajian ini hanya nilai-nilai yang dianggap mengacu pada kesatuan dan persatuan yang paling kelihatan, maksudnya dalam konteks perilaku atau hubungan sosial.

Dari tabel V.4, konsep kebersamaan tampak paling banyak pendukungnya, yakni 37,5%. Mereka mengatakan bahwa konsep ini sangat penting dalam kehidupan sebagai "perantau". Adapun alasannya: karena mereka merasa sebagai suku-bangsa pendatang yang asalnya jauh, tidak memiliki siapa-siapa/hanya sendirian, oleh karenanya berusaha menyatu dengan orang lain yang tinggal di dekatnya baik itu suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Dalam kehidupan sehari-hari konsep kebersamaan ini ditunjukkan pada sikapnya yang ramah, mengalah, dan menghindari bentuk-bentuk yang mengarah ke konflik. Dari tiga kelompok suku-bangsa pendatang yang mendukung konsep ini, paling banyak pendukungnya dari Nusa Tenggara.

Hal ini menunjukkan bahwa suku-bangsa asal Nusa Tenggara ini dalam berinteraksi/melakukan hubungan sosial, relatif lebih menunjukkan sikap yang tidak mengarah ke konflik.

Kebersamaan ini tidak hanya dilakukan terhadap suku-bangsa asal, namun terhadap sama-sama suku-bangsa pendatang pula. Terhadap sama-sama suku-bangsa pendatang, mereka ingin bersatu karena merasa senasib sepenanggungan, sama-sama sebagai pendatang. Dalam tindakannya sering ditunjukkan dalam bentuk saling bantu-membantu diwaktu kehabisan uang karena wesel terlambat datang.

Konsep rukun tampak cukup banyak pula pendukungnya, yakni 22,7%. Pendukung paling banyak berasal dari kelompok lain-lain asal Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya. Dalam tindakan sehari-hari, rukun ini dapat dilihat dari: bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dengan suku lain, dengan suku apa dan apa alasannya, dapat kerja sama dan dengan suku apa dan apa lasannya, terjadi konflik dengan siapa dan apa alasannya, apa ada usaha untuk agar dapat rukun dengan suku bangsa lain, usaha untuk mengenal dan memahami suku bangsa lain, dan sikap terhadap perkawinan dengan suku lain.

Telah dikatakan bahwa tingkat kerukunan dapat dilihat dari bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dengan suku bangsa lain. Dari hasil penelitian, terdapat pandangan yang berbeda-beda terhadap suku bangsa lain yang disenangi untuk hidup bersama atau berdampingan. Temyata responden yang terdiri dari tiga kelompok suku bangsa pendatang ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Suku bangsa dari Sumatra memiliki jumlah paling banyak, yakni 52,1%, 51,3% dari Nusa Tenggara, dan 44,8% dari pulau yang lain. Sebagian besar (52,1%) responden dari Sumatra yang menyatakan senang tinggal/hidup berdampingan dengan suku bangsa Jawa karena mereka sudah lama mengenal suku Jawa.

Terdapat responden yang menyenangi hidup berdampingan dengan suku dari luar Jawa. Dari tiga kelompok suku pendatang, paling banyak (48,3%) responden dari suku bangsa pendatang yang berasal dari pulau lain yang mengatakan senang hidup berdampingan dengan pendatang dari luar Jawa. Suku Pendatang dari luar Jawa yang responden senangi ini dapat berasal dari sukunya sendiri, dapat berasal dari satu pulau, atau dapat berasal dari lain pulau.

Dalam hidup berdampingan dengan suku-bangsa lain, temyata masih ada responden yang mengatakan sama saja, maksudnya dapat hidup berdampingan dengan semua suku. Dari jawaban responden paling banyak (25,6%) terdapat pada suku bangsa pendatang dari Nusa Tenggara. Hal ini

menunjukkan bahwa mereka dimungkinkan telah banyak memiliki wawasan kebangsaan yang relatif luas.

Dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang ternyata terdapat beberapa responden yang tidak mau memberikan jawaban tentang suku bangsa mana yang paling disenangi untuk hidup berdampingan dengannya. Mereka-mereka ini menunjukkan ketidak adanya pendirian dan adanya rasa khawatir kalau-kalau jawabannya tersebut dapat menimbulkan suatu bencana.

Untuk memilih suku-bangsa mana yang paling disenangi untuk hidup berdampingan berkaitan erat dengan unsur suku, agama, dan sifat baik seseorang. Berdasarkan jawaban dari responden tampak jawaban yang berbeda-beda. Jawaban yang paling banyak dikatakan oleh responden adalah 38,2% kesamaan agama, dan 38,2% kecocokan sifat. Menurut responden kesamaan agama, dan kecocokan sifat dipandang sangat penting dalam hidup berdampingan dengan suku lain. Responden yang lebih mementingkan kesamaan suku dalam hidup berdampingan jumlahnya relatif kecil, yakni 5,7%. Terlihat ada 3,2% responden yang tidak memilih, mereka menganggap semua suku bangsa sama saja untuk hidup berdampingan dengannya..

Kalau dilihat secara terperinci tampak bahwa pendatang dari Sumatra sebagian besar (51,9%) mengatakan kesamaan agama paling penting untuk hidup berdampingan dengannya. Jawaban serupa dikatakan pula oleh pendatang dari lain-lain pulau. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok suku pendatang ini memandang sesuatu itu rukun jika responden dapat hidup berdampingan dengan suku lain yang seagama. Dalam konteks ini, kerukunan dipandang sebagai "hidup dalam satu agama".

Berbeda dengan para pendatang dari Nusa Tenggara, mereka sebagian besar (47,6%) mengatakan kecocokan sifat merupakan unsur yang paling penting untuk hidup berdampingan dengan suku lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden memandang kecocokan sifat sebagai alat pemersatu/alat yang menjadikan mereka dapat rukun dalam hidup berdampingan dengan suku bangsa lain. Jadi dalam konteks ini, kecocokan sifat dipandang sebagai alat menuju kerukunan dalam hidup berdampingan dengan suku lain.

Tampak dari ketiga kelompok suku pendatang ini, dua kelompok suku bangsa (dari Sumatra + Lain-lain ) mempunyai pandangan yang sama, sementara itu kelompok suku dari Nusa Tenggara memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya konsep yang berbeda dalam memandang "kerukunan" dalam hidup berdampingan dengan suku bangsa lain.

Terdapat sebagian kecil dari ketiga kelompok suku bangsa pendatang yang mementingkan unsur kesukuan atau sukuisme dalam hidup berdampingan dengan suku bangsa lain. Responden ini masih berpandangan bahwa mereka



akan dapat hidup rukun jika tinggal/hidup berdampingan dengan suku yang sama. Dalam konteks ini, hidup berdampingan dengan orang sesuku sebagai alat yang dapat menyatukan mereka. Dengan kata lain, mereka dapat rukun jika mereka dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang sesuku.

Jawaban lain-lain yang diberikan oleh responden adalah terdiri dari responden yang memberikan jawaban lebih dari satu jawaban dan termasuk responden yang tidak mau memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Terdapat 12,1% responden dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang ini yang memberikan jawaban lebih dari satu, dan terdapat 3,2% responden yang tidak mau memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Adanya perbedaan pandangan terhadap unsur/faktor yang melatarbelakangi responden dalam memilih suku-bangsa yang paling disenangi untuk hidup berdampingan didasarkan pada berbagai macam alasan. Bagi responden yang mengatakan paling senang hidup berdampingan dengan orang yang sesuku untuk mewujudkan kerukunan tersebut memberikan alasan sebagai berikut: 44,5% responden memberikan alasan dapat saling membantu jika dapat hidup berdampingan dengan orang yang sama sukunya. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sukunya. Responden merasa senang jika hidup berdampingan dengan orang sesuku karena mereka dapat saling membantu. Dengan saling membantu, mereka merasa aman dan rukun. Jadi dalam konteks ini, kerukunan dipandang sebagai "adanya saling membantu dalam satu suku yang sama".

Alasan yang lain yang dikemukakan oleh responden adalah jika responden dapat hidup berdampingan dengan sukunya sendiri, mereka dapat mudah berkomunikasi. Dengan mudah berkomunikasi ini, mereka dapat hidup rukun. Dalam konteks ini, kerukunan dipandang sebagai "wujud dari mudahnya komunikasi antar mereka".

Bagi responden yang memberikan alasan mereka akan merasa dekat bila dapat hidup berdampingan dengan orang yang sama sukunya, mereka berpandangan bahwa hanya hidup dengan sukunya sendiri mereka merasa dekat, merasa bersatu. "Rasa dekat dalam hidup berdampingan dengan orang-orang sesukunya" dipandang sebagai alat pemersatu dalam membentuk kerukunan antar bangsa. Jadi kerukunan dalam konteks ini dipandang sebagai "rasa dekat dengan sukunya".

Alasan-alasan tersebut diatas berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden yang menyenangi hidup berdampingan dengan orang yang seagama. Dari 60 orang (38,2%) responden yang mengatakan senang hidup berdampingan dengan orang-orang yang sama agamanya memberikan alasan-alasan yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan

masing-masing suku. Dari jawaban responden, terdapat 48,4% responden yang merasa senang hidup berdampingan dengan orang sesama agama dengan alasan mereka merasa tenteram. Hal ini menunjukkan bahwa ketenteraman dapat terwujud bila mereka dapat hidup dengan sesama agama. Menurut responden, ketenteraman ini menunjukkan adanya kerukunan. Dengan kata lain, kerukunan dipandang sebagai "suasana yang dapat menimbulkan rasa tenteram". Sementara itu, terdapat 20,0% responden yang merasa senang hidup berdampingan dengan orang sesama agama dengan alasan "bisa doa bersama".

Terdapat beberapa alasan tentang mengapa pulau lainnya mengatakan kesamaan agama yang paling penting untuk hidup berdampingan dengan suku lain. Alasannya adalah bermacam-macam, yakni: merasa tenteram, bisa doa bersama, dan saling mengingatkan. Dari alasan-alasan yang mereka kemukakan ini paling banyak adalah adanya rasa tenteram bila dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang se-agama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka/pendatang dari Sumatra dan pulau lainnya selain Nusa agama dinomor satukan dalam hidup berdampingan dengan suku lain terutama yang seagama.

Bagi pendatang dari Nusa Tenggara, mereka lebih menomor satukan kecocokan sifat dalam hidup bersama suku lain. Alasannya adalah mereka merasa tenteram jika orang-orang yang tinggal berdampingan itu memiliki sifat yang dipandang cocok/pas dengan sifat mereka, seperti: sifat saling pengertian, saling memahami. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ini lebih mementingkan sifat pribadi yang baik dengan keyakinan bahwa ini yang dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Diantara pendatang, baik dari Sumatra, Nusa Tenggara maupun dari pulau lainnya ada yang masih menomor satukan kesamaan suku, walaupun jumlahnya relatif kecil (5,7%). Mereka ini merasa dapat saling bantu membantu, saling berkomunikasi dan merasa dekat jika dapat tinggal bersama/berdampingan dengan sukunya sendiri. Bagi mereka yang merasa dapat saling bantu membantu jika hidup berdampingan dengan orang-orang sesuku, menunjukkan bahwa mereka ini memiliki rasa ketergantungan yang tinggi terhadap sukunya sendiri. Mereka yang mengatakan dapat saling berkomunikasi bila tinggal berdampingan dengan sukunya sendiri menunjukkan bahwa mereka ini ada kesulitan bahasa. Dan bagi mereka yang mengatakan merasa dekat bila hidup berdampingan dengan sukunya sendiri menunjukkan bahwa mereka ini masih memiliki rasa kesukumannya yang tinggi dan bisa terjadi karena belum memiliki pengalaman yang banyak atau karena belum lama tinggal di daerah tujuan.

Namun demikian, ada beberapa responden yang memilih lebih dari satu jawaban untuk hidup berdampingan, dan ada responden yang tidak

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Responden dari kelompok suku dari Nusa Tenggara yang paling banyak (23,8%) memberikan lebih dari satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Dua kelompok suku yang lain yaitu dari Sumatra dan lain-lain (dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya) memiliki prosentase lebih rendah dari pada responden dari Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari Nusa Tenggara memiliki wawasan yang lebih luas daripada responden dari kedua kelompok lainnya. Diantara mereka banyak yang memberi jawaban sama saja dengan pengertian bahwa kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Dan mereka yang tidak memberikan jawaban, mereka takut akan kemungkinan terjadi sesuatu/risiko.

Dalam hidup berdampingan dengan suku lain, responden juga ingin meluangkan waktu untuk memahami ajaran agama lain yaitu dengan tujuan menambah wawasan tentang keagamaan sehingga dapat bertoleransi dalam hidup berdampingan dengan agama lain. Ada pula responden yang ingin meluangkan waktunya untuk memahami suku lain dengan tujuan agar dapat memiliki rasa kesetia kawan, rasa kebersamaan dan rasa tenggang rasa terhadap suku-bangsa lain. Dari ketiga kelompok suku pendatang tampak memberikan jawaban yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam hidup berdampingan dengan suku lain, responden berusaha meluangkan waktu untuk memahami budaya kelompok yang lain, namun jumlahnya relatif kecil. Dari ketiga kelompok suku-bangsa pendatang ini mereka yang paling banyak (47,5%) untuk memahami agama suku lain adalah dari pulau lain selain Sumatra dan Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ini telah memiliki wawasan yang luas.

Terlihat sebagian besar responden baik dari Sumatra, Nusa Tenggara maupun Pulau lain-lain mereka tidak bersedia untuk memahami agama lain. Hal ini disebabkan karena mereka tidak berminat untuk memahami agama suku lain tersebut. Ada beberapa responden dari ketiga kelompok suku pendatang ini yang tidak memberikan jawaban. Mereka ini sebetulnya mau memahami agama lain, namun belum ada waktu.

Responden tampaknya lebih tertarik meluangkan waktu untuk memahami suku lain daripada memahami agama lain. Terlihat sebagian besar (91,7%) responden berusaha meluangkan waktu untuk memahami suku lain tersebut. Hanya 5,3% responden yang tidak mau meluangkan waktu untuk memahami suku lain tersebut. Kalau dilihat perkelompok, pendatang dari Sumatra paling banyak (98,0%), dari Nusa Tenggara 92,5%, dan dari pulau lain-lain 93,4%. Namun demikian, jumlah prosentase dari ketiga kelompok suku bangsa pendatang ini diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga

kelompok suku pendatang ini memiliki usaha yang tinggi dalam rangka mengenal suku bangsa lain.

Langkah yang dilakukan responden dalam meluangkan waktunya untuk memahami suku-bangsa lain ini adalah merupakan salah satu usaha agar mereka dapat hidup rukun/bersatu dalam hidup berdampingan dengan suku-bangsa lain tersebut. Jika usaha ini terus dilakukan dengan sering meluangkan waktunya akan menambah hubungan yang semakin baik/erat.

Dalam hidup berdampingan dengan suku lain responden berusaha agar mereka dapat tetap hidup rukun. Usaha-usaha yang dilakukan adalah: dengan cara menjaga hubungan baik (49,4%), hati-hati dalam tutur kata (8,3%), selalu toleransi (14,7%), lainnya 27,6% memberikan jawaban lebih dari satu. Langkah yang paling banyak dipakai oleh responden untuk tetap dapat rukun adalah menjaga hubungan baik dengan suku lain. Berdasarkan pengalaman mereka, dengan selalu menjaga hubungan baik dengan kelompok lain ini mereka tetap rukun. Dalam konteks ini kerukunan dipandang sebagai ujud untuk selalu menjaga hubungan baik dengan suku lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden berusaha untuk selalu rukun dalam hidup berdampingan dengan suku lain.

Terdapat sebagian kecil (14,7%) responden baik dari kelompok suku pendatang dari Sumatra, Nusa Tenggara, maupun dari kelompok suku dari pulau yang lain yang mengatakan bahwa usaha yang harus dilakukan agar tetap rukun dengan suku lain adalah harus selalu toleransi. Dalam konteks ini mereka memandang rukun sebagai wujud dari adanya rasa selalu toleransi. Mereka berpandangan bahwa dengan selalu bertoleransi pasti dapat mewujudkan kerukunan.

Bagi responden yang mengatakan bahwa harus hati-hati dalam tutur kata agar tetap rukun, ini menunjukkan bahwa kerukunan dipandang sebagai wujud dari kehati-hatian dalam tutur kata dengan kelompok suku lain. Menurut responden, sering banyak terjadi ketidak rukunan/konflik karena orang tersebut kurang/tidak hati-hati dalam tutur kata.

Sementara itu, terdapat beberapa responden yang memberikan jawaban lebih dari satu. Dikatakan oleh responden bahwa usaha yang harus dilakukan agar tetap rukun adalah harus selalu menjaga hubungan dan harus selalu bertoleransi dengan suku lain, serta harus memiliki tutur kata yang baik. Hal ini dikatakan oleh responden berdasarkan pengalamannya selama bergaul dengan suku lain tersebut. Jika dilihat dari masing-masing kelompok pendatang, sebagian besar dari ketiga kelompok suku pendatang ini memberikan jawaban yang serupa tentang usaha yang harus dilakukan agar tetap bersatu/rukun dengan suku lain, yakni: "menjaga hubungan baik". Suku dari Sumatra terdapat

61,5%, 50,0% dari Nusa Tenggara, dan 58,7% dari suku lainnya. Dari jawaban yang hampir serupa yang dikatakan oleh ketiga suku bangsa pendatang ini menunjukkan bahwa terdapat kemiripan pandangan/konsep tentang persatuan/kerukunan. Menurut ketiga suku bangsa pendatang ini, kerukunan diartikan sebagai suatu suasana yang harmoni akibat adanya saling menjaga hubungan baik.

Ternyata usaha yang responden lakukan agar tetap rukun tidak selalu mewujudkan kerukunan. Hal ini terlihat hampir separo (48,4%) responden pernah terjadi kesalah fahaman dengan suku lain. Menurut responden kesalah fahaman tersebut sering terjadi pada pergaulan sehari-hari. Dan hal ini sering tidak disadari bahwa mereka ini berhadapan dengan suku lain yang berbeda budaya dan setelah terjadi konflik baru sadar bahwa lain suku lain budaya. Dalam pepatah dikatakan "lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.

Responden yang pernah mengalami kesalah fahaman, mereka (45,1%) berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan budaya. Kejadian seperti ini sering pula dialami oleh teman-teman lain yang berbeda suku-bangsa. Dari adanya perbedaan pandangan budaya ini sering muncul pandangan-pandangan yang bersifat positif maupun negatif. Pandangan yang bersifat negatif inilah yang dapat menimbulkan kesalah fahaman antar mereka. Dan jika hal ini dibiarkan, tanpa ada usaha untuk mengurangi kesalah fahaman tersebut maka dapat dipandang membahayakan. Terdapat 51,7% responden dari mereka yang pernah mengalami kesalah fahaman membenarkan pernyataan tersebut.

Bagi responden yang belum pernah mengalami kesalah fahaman dengan suku lain seandainya terlibat, usaha yang dilakukan sebagian besar (59,8%) dengan cara diselesaikan sendiri, dan responden yang lain mengatakan diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika terpaksa, baru diselesaikan dengan aparat keamanan setempat.

Berdasarkan pengakuan responden, bahasa, kesenian, dan pakaian dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalah fahaman diantara mereka. Menurutny, sering terjadi kesalah fahaman yang disebabkan oleh masalah bahasa. Oleh karena mereka sebagai pendatang berusaha pula untuk memahami bahasa suku bangsa asal yaitu bahasa Jawa. Bagi responden, dengan memahami bahasa Jawa berarti dapat berkomunikasi dengan baik. Responden berusaha memahami bahasa Jawa karena mereka ini tinggal di daerah orang-orang Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 93,6% responden yang berusaha mempelajari bahasa Jawa. Dari ketiga kelompok suku pendatang, paling banyak (96,2%) responden dari Sumatra yang berusaha mempelajari bahasa Jawa

tersebut. Niat yang besar yang dilakukan untuk memahami bahasa Jawa ini merupakan suatu usaha agar mereka dapat berkomunikasi dengan suku bangsa asal. Hal ini sering dilakukan dalam komunikasi antar mereka dalam pergaulan sehari-hari. Responden berusaha menggunakan bahasa Jawa walaupun hanya bahasa "Jawa ngoko" saja. Temyata berdasarkan pengalaman responden, walaupun responden menggunakan bahasa Jawa ngoko, namun selalu diterima dengan senang hati oleh suku bangsa asal. Hal ini yang membuat responden terus maju berbicara dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia hanya digunakan responden dalam forum tertentu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan suku lain dari luar Jawa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Responden juga menggunakan bahasa daerah jika berkomunikasi dengan sukunya sendiri.

Dari 93,6% responden yang berusaha mempelajari bahasa Jawa ini, terdapat 75,5% yang sudah dapat berbicara bahasa Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang walaupun suku pendatang ternyata dapat juga berbahasa Jawa. Dampaknya, jarang terjadi kesalah fahaman yang disebabkan oleh masalah bahasa.

Temyata responden yang sudah dapat berbahasa Jawa ini, mereka mempelajarinya sebagian besar lewat pergaulan sehari-hari baik dengan teman sekostnya, tetangga, kampung maupun lewat teman kuliah. Responden yang belajar bahasa Jawa lewat teman se kostnya ini karena dalam tempat kost tersebut terdiri dari orang-orang dari berbagai macam suku bangsa, yang diantaranya ada yang berasal dari suku Jawa (dari Jawa Tengah, Jawa Tmur, Jawa Barat). Responden yang tinggal di asrama yang sama-sama satu suku bangsa biasanya kurang berhasil dalam mempelajari bahasa Jawa tersebut.

Alasan responden mempelajari bahasa Jawa tersebut adalah 68,7% biar mereka mudah berkomunikasi dengan suku Jawa, sedang lainnya mengatakan biar dapat memahami budaya suku lain dan dapat lebih bertoleransi dengan suku lain. Bagi responden yang belum dapat berbahasa Jawa, mereka merasa sangat susah, disamping belum adanya minat.

Selain bahasa, responden dapat mengenal suku lain lewat kesenian mereka. Temyata sebagian besar (76,4%) responden merasa tertarik dengan jenis kesenian Jawa. Bagi responden yang belum mengenalnya (23,6%), sebagian besar berusaha mengenalnya dimasa mendatang. Bahkan diantara responden ada yang berusaha terlibat dalam kesenian Jawa tersebut.

Temyata terdapat 79,5% responden yang berusaha mengenal suku lain/suku Jawa lewat pakaian tradisional yang mereka miliki. Dan bagi responden yang belum mengenal (20,5%) mereka berusaha mengenalnya

dimasa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa responden ada usaha untuk mengenal pakaian mereka namun menunggu waktu yang tepat.

Dari semua yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa responden yang terdiri dari tiga kelompok pendatang ini selalu ada usaha untuk mengenal bahkan memahami suku lain, baik lewat bahasa, kesenian, pakaian; disamping lewat hubungan langsung dengan mereka. Dengan adanya semacam usaha ini menunjukkan bahwa responden berusaha untuk menyatu dengan suku lain, baik itu dari suku bangsa asal maupun dari suku bangsa pendatang sendiri.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menyatu dengan suku lain, dapat dilakukan dengan cara asimilasi. Menurut Astrid Susanto (1977) asimilasi dapat mendukung integrasi/ kesatuan dan persatuan bangsa. Dari hasil penelitian terdapat 84,1% responden yang setuju dengan menyatakan rela bila salah seorang anggota keluarganya kawin dengan suku lain. Selain itu, responden juga mendukung adanya perkawinan antar suku bangsa.

Untuk menunjukkan dukungan tersebut, sebagian besar (92,9%) responden bersedia kawin dengan suku lain seandainya mereka belum kawin, hanya 7,1% yang tidak bersedia. Bagi responden yang bersedia kawin dengan suku lain ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak membedakan suku satu dengan suku yang lain selama menganggap suku lain itu sama saja. Ada beberapa alasan responden bersedia kawin dengan suku lain, yakni: 14,5% adat suku membolehkan, 10,9% ada contoh keluarga yang berhasil, 13,6% dapat menyesuaikan diri, dan 8,1% karena cinta dan jodohnya. Namun ternyata dalam pengakuannya, ada responden yang bersedia kawin tetapi dengan suku Jawa (39,2%), hanya 40,0% saja responden yang bersedia kawin dengan suku apa saja. Sedang responden yang lain, yakni 20,8% lebih menyenangi kawin dengan suku pendatang namun bukan berarti dari sukunya sendiri.

Dari responden yang bersedia kawin dengan suku bangsa lain seandainya belum kawin ini ternyata hanya 40,0% responden yang mengatakan sama saja. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini berpandangan bahwa semua suku bangsa itu sama saja. Bagi responden yang bersedia kawin namun memilih suku bangsa yang disenangi berarti mereka ini masih memiliki pandangan yang berbeda-beda antara suku satu dengan suku yang lain.

Bagi (7,1%) responden yang tidak bersedia kawin dengan suku lain seandainya mereka belum kawin, sebagian besar (55,6%) memberikan alasan karena repot jika harus menyatu dengan suku lain yang memiliki budaya yang berbeda, dan lainnya mengatakan takut kalau dibawa pergi. Inti dari alasan yang mereka katakan ini adalah adanya rasa kekawatiran responden jika sampai terjadi konflik dalam keluarga mereka.



Berdasarkan semua uraian, rukun yang mengacu ke konsep integrasi yang terdapat pada suku-bangsa pendatang baik asal Sumatra, Nusa Tenggara maupun asal dari pulau lainnya, pada dasarnya mendukung integrasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam usaha yang dilakukan agar tetap rukun.

Gotong royong dianggap sebagai konsep pendukung integrasi oleh 12,7% suku-bangsa pendatang. Dalam perilakunya, gotong royong ini diwujudkan dalam berbagai tindakan, seperti: dalam kegiatan kampung, kegiatan sosial, dan berbagai atraksi dalam memperingati hari-hari besar.

Musyawarah oleh sebagian suku-bangsa pendatang dianggap sebagai nilai budaya yang paling dapat mengacu konsep integrasi sebab menurutnya di dalam konsep tersebut terkandung nilai ingin bersatu. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai tindakan dalam perkumpulan- perkumpulan yang ada, di mana suatu keputusan selalu di musyawarahkan sebelumnya. Jadi keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama. Dengan kata lain, musyawarah merupakan alat pemersatu dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial.

Tenggang rasa dianggap pula sebagai nilai budaya yang paling pengacu konsep integrasi oleh suku-bangsa pendatang. Semua tindakan yang selalu mempertimbangkan rasa tenggang rasa ini hasilnya pasti baik. Hal ini dikatakan oleh 13,9 % responden pendukung konsep tersebut. Dalam wujud konkretnya dapat dilihat dari sikap mereka yang selalu menunjukkan rasa saling pengertian, saling memaklumi, saling menghormati, dan saling memahami.

Dari semua nilai budaya yang dianggap paling dapat mengacu konsep integrasi oleh suku-bangsa pendatang ini, menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka telah memiliki nilai-nilai tersebut namun di dalam penghayatannya dapat dikatakan masih kurang mendukung integrasi. Hal ini disebabkan karena pada tindakannya masih mempertimbangkan adanya perbedaan suku, dan agama.

Selain adanya nilai-nilai yang dianggap paling dapat mengacu konsep integrasi, ada beberapa pernyataan yang dapat mendukung dan tidak mendukung konsep integrasi tersebut. Pernyataan-pernyataan yang dapat mendukung konsep integrasi adalah meliputi: "Suku bangsa saya tidak selalu lebih baik dari suku bangsa lain". Dari jawaban ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang bahwa semua suku yang ada di Indonesia itu sama saja, menyadari sama-sama satu bangsa. Dan hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan yang berbunyi "Tidak ada suku-bangsa di Indonesia yang lebih baik atau yang lebih buruk, semuanya sama saja".

Untuk menunjukkan rasa kesatuannya, responden bersedia tinggal dan bekerja di daerah yang berlainan suku. Terdapat 89,7% responden yang menyatakan bersedia tinggal dan bekerja di tempat lain yang berbeda suku

bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ini merasa berada dalam satu wilayah tanah yang sama, yaitu wilayah Indonesia. Untuk menunjukkan hal yang serupa terdapat 84,1% responden yang setuju atas pernyataan yang berbunyi "Saya sangat rela bila salah satu anggota keluarga saya kawin dengan suku-bangsa lain". Hal ini menunjukkan bahwa sikap kerelaannya itu memberikan kesan bahwa mereka mau bersatu dengan suku-bangsa lain.

Pernyataan-pernyataan yang bersifat disintegrasi atau yang tidak mendukung konsep integrasi adalah meliputi: "Sifat-sifat suku bangsa saya sangat membuat saya lebih tenteram dari pada sifat-sifat suku bangsa lain". Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja responden yang masih memiliki rasa kesukuisme. Kesukuismenya ini dapat terjadi karena adanya rasa ketergantungan dengan sukunya, dapat juga karena wawasannya masih relatif sempit.

Terdapat 33,3% responden yang mengatakan kurang setuju dan 66,7% tidak setuju atas pernyataan "Hindarilah bergaul dengan suku lain, karena anda dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai suku bangsa lain". Dari pernyataan ini ternyata tidak ada satupun responden yang setuju terhadap pernyataan itu. Hal ini membuktikan bahwa responden tidak ada usaha untuk membedakan dalam bergaul, mereka mau bergaul dengan semua suku-bangsa.

Terdapat 13,4% responden yang setuju atas pernyataan "Bila ada kesempatan untuk berkumpul, saya utamakan untuk berkumpul dengan orang yang sesuku dengan saya". Terlihat responden yang setuju atas pernyataan ini hanya relatif kecil, ini menunjukkan sebagian besar responden tidak menginginkan mengutamakan untuk berkumpul dengan sukunya sendiri. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa responden mau berkumpul dengan siapa saja/dengan semua suku bangsa, tanpa membedakan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan sikap tidak setuju atas pernyataan-pernyataan tersebut. Responden tidak menginginkan adanya perbedaan dengan suku bangsa lain dalam hal apa saja.

#### **4. Hubungan Dengan Kelompok Lain**

Hubungan dengan kelompok lain yang dimaksudkan adalah mengenai pandangan-pandangan mereka/suku-bangsa asal yang bersifat positif atau yang bersifat negatif terhadap kelompok lain/suku bangsa lain sesuai dengan pengalaman. Akan diuraikan pula mengenai kemungkinan adanya perubahan tentang pandangan tersebut pada masa kini. Hubungan dengan kelompok lain yang akan diuraikan adalah mencakup:

**a. Hubungan Suku-Bangsa Asal Dengan Kelompok Suku-Bangsa Pendatang.**

Dalam penelitian ini, hubungan suku-bangsa asal dengan suku-bangsa pendatang yang akan dikaji dapat dilihat dari pandangan suku-bangsa asal yang bersifat positif dan negatif terhadap kelompok suku-bangsa pendatang baik dari Sumatra, Nusa Tenggara maupun dari kelompok lain-lain.

Dari hasil penelitian, data yang menunjukkan pada pandangan positif suku-bangsa asal terhadap suku-bangsa pendatang dapat dilihat pada tabel V.5 berikut.

**Tabel V.5.**  
**PANDANGAN SUKU-BANGSA ASAL YANG BERSIFAT POSITIF**  
**TERHADAP SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Pandangan Positif	Jumlah ( n )	Persentase (%)
1.	Taqwa	9	12,0
2.	Disiplin	4	5,3
3.	Halus	9	12,0
4.	Nrimo	4	5,3
5.	Rukun	2	2,7
6.	Terus terang	3	4,0
7.	Pemberani	2	2,7
8.	Ulet	4	5,3
9.	Periang	2	2,7
10.	Kebersamaan	13	17,3
11.	Tenggang rasa	7	9,3
12.	Gotong royong	8	10,7
13.	Tidak menjawab	8	10,7
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.5 tersebut, sifat-sifat tersebut oleh suku bangsa asal dipandang sebagai sifat-sifat yang positif. Dalam tabel terlihat 17,3% dari suku-bangsa asal memandang positif atas sifat kebersamaan yang dimiliki oleh suku-bangsa lain/pendatang. Selain itu, terdapat 12,0% suku-bangsa asal

memandang positif atas sifat ketakwaannya yang dimiliki oleh suku bangsa pendatang. Terdapat 12,0% suku-bangsa asal memandang positif atas sifat halus yang dimiliki oleh suku-bangsa pendatang. Terdapat 10,7% mereka memandang positif atas kegotong royongannya, 9,3% atas ketenggengrasaannya. Sementara itu, dalam tabel tersebut ada suku-bangsa asal yang tidak memberikan jawaban atas pandangan positif terhadap suku-bangsa pendatang.

Dalam tabel V.5 tampak bahwa pandangan positif suku-bangsa asal terhadap suku-bangsa pendatang adalah berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh senang tidaknya terhadap suku-bangsa lain. Jika mereka senang dengan suku-bangsa pendatang, pandangannya pasti positif, namun sebaliknya jika tidak senang akan memberikan pandangan yang bersifat negatif.

Berdasarkan hasil penelitian, suku-bangsa pendatang yang paling disenangi dapat dilihat pada tabel V.6. berikut.

**Tabel V.6.**

**SUKU BANGSA PENDATANG YANG PALING DISENANGI OLEH SUKU-BANGSA ASAL DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Suku paling disenangi	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Jawa	35	46,7
2.	Sunda	7	9,3
3.	Sumatra	14	18,6
4.	Nusa Tenggara	8	10,7
5.	Sama saja	11	14,7
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.6. terlihat bahwa suku-bangsa asal/suku Jawa dalam berhubungan dengan kelompok lain, mereka (46,7%) paling menyenangi pendatang bersuku Jawa, yang berarti tidak ada satu suku-bangsa pendatang lainnya yang paling disenangi. Ini menunjukkan bahwa etnosentrisme mereka sangat tinggi. Mereka merasa suku-bangsa mereka lebih/paling menyenangkan daripada suku-bangsa lain sehingga lebih menyenangi orang-orang yang se-suku-bangsa. Bahkan dalam pernyataannya (49,3%) mereka mengatakan bahwa "sukunya lebih menyenangkan daripada suku-bangsa lain".

Namun demikian, ada sekelompok (18,6%) suku bangsa asal yang paling menyenangi suku pendatang dari Sumatra (18,6%), kemudian 10,7 % paling menyenangi suku dari Nusa Tenggara, dan 9,3% paling menyenangi suku Sunda. Dalam tabel V.6. tersebut terlihat 14,7% suku bangsa asal memandang semua suku bangsa pendatang baik itu suku Jawa, Sumatra, maupun suku lainnya adalah sama saja, tidak ada yang paling disenangi. Hal ini dapat dilihat dalam pendapatnya tentang pernyataan: "Suku bangsa saya tidak selalu lebih baik dari suku bangsa lain di Indonesia". Mereka (73,3%) mengatakan setuju bahwa sukunya tidak selalu baik daripada suku lain. Sehingga dalam memberikan pendapat tentang suku lain, mereka sangat netral, sama saja. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka ini telah memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, merasa sama-sama bangsa Indonesia, se bangsa dan se tanah air.

Terlihat dalam tabel V.6. diatas terdapat 14,7 % yang memiliki pandangan netral/sama saja terhadap kelompok lain, semua suku-bangsa disenangi baik itu suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang.

Dalam berinteraksi dengan kelompok suku-bangsa lain, ada pula pandangan tidak senang karena dipandang ada sifat-sifat yang negatif dari suku-bangsa tersebut. Suku-bangsa lain yang tidak/kurang disenangi tersebut adalah dapat dilihat pada tabel V.7 berikut.

**Tabel V.7.**  
**SUKU BANGSA PENDATANG YANG PALING KURANG DISENANGI**  
**OLEH SUKU BANGSA ASAL DI DESA CATURTUNGGAL,1995**

No	Suku paling kurang disenangi	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Sumatra	37	49,2
2.	Nusa tenggara	5	6,7
3.	Sunda	2	2,7
4.	Jawa	2	2,7
5.	Sulawesi	2	2,7
6.	Sama saja	18	24,0
7.	Tak ada jawaban	9	12,0
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.7. dapat dilihat suku-bangsa lain yang paling kurang disenangi oleh suku-bangsa asal, paling banyak (49,2%) suku bangsa dari Sumatra. Mereka (6,7%) kurang menyenangi pula suku- bangsa dari Nusa Tenggara. Mereka juga kurang menyenangi suku- bangsa Sunda, suku-bangsa Jawa, dan suku dari Sulawesi, namun relatif kecil.

Dalam tabel V.7. terlihat jawaban "sama saja", yakni 24,0%. Ini menunjukkan bahwa mereka/suku-bangsa asal dalam memandang suku bangsa lain sama saja dengan memandang suku-bangsanya sendiri. Dalam pernyataannya "Tidak ada suku bangsa di Indonesia ini yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, semua sama saja". Terdapat 81,3% suku bangsa asal yang "setuju" terhadap pernyataan ini. Terlihat disini suatu perbedaan antara kenyataan dan pernyataan, dimana dalam kenyataanya hanya terdapat 24,0% suku bangsa asal yang mengatakan "semua suku sama saja", namun dalam pernyataannya terdapat 81,3% setuju bahwa "semua suku sama saja". Dengan kata lain terdapat penyimpangan antara konsep/pandangan dengan kenyataan/realita.

Ada beberapa alasan tentang mengapa mereka/suku bangsa asal tersebut kurang menyenangi suku bangsa lain. Alasan yang mereka kemukakan adalah berkaitan dengan sifat-sifatnya yang dipandang negatif oleh suku bangsa asal. Berdasarkan hasil penelitian, sifat-sifat suku bangsa lain yang dipandang negatif dapat dilihat pada tabel V.8. berikut.

**Tabel V.8.**  
**PANDANGAN SUKU BANGSA ASAL YANG BERSIFAT NEGATIF**  
**TERHADAP SUKU BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No	Sifat negatif	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Keras	18	24,0
2.	Kasar	19	25,3
3.	Suka kelahi	4	5,3
4.	Tak mau kalah	2	2,7
5.	Malas	2	2,7
6.	Kurang taqwa	2	2,7
7.	Inovatif	2	2,7
8.	Tidak menjawab	26	34,6
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.8. tersebut, terdapat 24,0% mereka kurang menyenangkan suku lain karena sifat malasnya dan karena sifat kasarnya mereka (25,3%) kurang menyenangkan suku-bangsa lain tersebut. Nampaknya sifat kasar yang ada pada bangsa lain tersebut yang paling banyak kurang disenangi oleh suku-bangsa asal. Sementara itu, sifat suka kelahi, dipandang sebagai sifat yang negatif pula, sedang sifat tak mau kalah, malas, kurang taqwa, dan inovatif; jumlahnya relatif kecil.

Dalam tabel tersebut ada responden yang tidak mau memberikan jawaban tentang sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh suku-bangsa lain. Mereka tidak memberikan jawaban tersebut dimungkinkan karena takut kalau dibenci suku bangsa yang bersangkutan, atau memang mereka berpendapat bahwa menjelekkan orang lain/suku bangsa lain itu tidak etis.

Pada masa kini ternyata ada perubahan pandangan suku-bangsa asal terutama yang bersifat negatif terhadap suku-bangsa lain. Perubahan pandangan ini dipengaruhi oleh faktor: suku-bangsa yang paling dikenal, dan lamanya mengenal. Ternyata setelah mereka telah saling mengenal dan lama mengenal, mereka merubah pandangan yang semula tidak baik menjadi pandangan yang positif.

Suku-bangsa asal setelah lama mengenal suku-bangsa lain, ada diantaranya yang paling dikenal. Antara responden yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan terhadap suku-bangsa yang paling dikenal tersebut. Menurut pengakuan suku bangsa asal, kelompok lain/pendatang yang paling mereka kenal dapat dilihat pada tabel V.9. berikut.

**Tabel V.9.**  
**SUKU BANGSA-PENDATANG YANG PALING DIKENAL**  
**OLEH SUKU-BANGSA ASAL DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Suku-Bangsa yang paling dikenal	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Jawa	16	21,3
2.	Sunda	6	8,0
3.	Sumatra	32	42,7
4.	Nusa Tenggara	14	18,7
5.	Lain-lain	7	9,3
Jumlah		75	100,00

Sumber: Data Primer, 1995



Berdasarkan tabel V.9. pendatang yang paling banyak dikenal oleh suku-bangsa asal berasal dari Sumatra, namun mereka tidak tahu suku apa saja. Bahkan menurut anggapan sebagian diantara mereka, orang luar Jawa adalah orang Sumatra. Sementara itu, bagi mereka yang mengenal orang Nusa Tenggara lebih dikenal dengan istilah "Orang timur", yang maksudnya pendatang dari timur pulau Jawa. Dalam tabel tersebut terlihat pula bahwa suku bangsa asal/orang Jawa mengenal orang Jawa. Jawa yang dimaksudkan dalam tabel ini adalah orang Jawa yang berasal dari luar propinsi DIY, pendatang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedang lain-lain dalam kolom tabel tersebut yang dimaksudkan adalah pendatang yang berasal dari pulau lain (Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya).

Mereka/suku-bangsa asal dalam mengenal suku-bangsa pendatang ini lewat dalam kegiatan/sumber pengenalan yang berbeda-beda, lihat tabel V.10. berikut.

**Tabel V.10.**  
**SUMBER PENGENALAN SUKU BANGSA ASAL**  
**TERHADAP SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Sumber kenal	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Organisasi	8	10,7
2.	Keagamaan	4	5,3
3.	Perkuliahan	4	5,3
4.	Olah raga	3	4,0
5.	Pekerjaan/bisnis	8	10,7
6.	Teman pergaulan	14	18,7
7.	Tetangga kost	11	14,7
8.	Kerja bakti	6	8,0
9.	Kegiatan sosial	7	9,3
10.	Lain-lain	10	13,4
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.10 diatas, suku-bangsa asal dalam mengenal suku-bangsa pendatang lewat jenis kegiatan yang berbeda. Lewat teman pergaulan dan teman kost jumlahnya paling banyak, yakni 33,4%. Lain-lain yang dimaksudkan adalah bahwa dalam mengenal suku -bangsa lain, mereka mengenalnya lewat berbagai sumber/ lebih dari satu sumber, seperti: lewat organisasi dan keagamaan.

Dalam mengenal suku-bangsa lain, ada yang telah mengenal cukup lama namun ada juga yang baru beberapa tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.11. berikut.

**Tabel V.11.**  
**LAMANYA SUKU BANGSA ASAL**  
**MENGENAL SUKU BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Lama Mengenal (Th)	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Kurang dari 5 tahun	26	34,7
2.	5 - < 10 tahun	12	15,9
3.	10 - < 15 tahun	15	20,0
4.	15 - < 20 tahun	11	14,7
5.	20 tahun keatas	11	14,7
Jumlah		75	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.11, lamanya mengenal suku-bangsa lain ada yang belum lama mengenal, ada yang sudah lama. Kebanyakan lamanya suku-bangsa asal dalam mengenal suku-bangsa pendatang antara 1 sampai 5 tahun, yakni 34,7%. Mereka yang paling lama mengenal ada yang sudah 20 tahun lebih, yakni 14,7%. Bagi responden yang sudah lama mengenal inilah yang memiliki perubahan pandangan yang bersifat negatif terhadap suku-bangsa lain tersebut menjadi pandangan yang positif.

#### **b. Hubungan Suku-Bangsa Pendatang dengan Kelompok Lain.**

Hubungan suku-bangsa pendatang dengan kelompok lain yang dimaksudkan adalah hubungan suku-bangsa pendatang dengan suku bangsa

pendatang, dan suku bangsa pendatang dengan suku bangsa asal/suku Jawa. Hubungan ini dapat dilihat dari pandangan suku-bangsa pendatang yang bersifat positif dan negatif terhadap kelompok bangsa lain. Pandangan ini kemungkinan akan berubah di masa kini. Perubahan ini tentunya sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor.

Pandangan suku-bangsa pendatang yang bersifat positif terhadap kelompok lain, dapat dilihat pada tabel V.12 berikut.

**Tabel V.12.**  
**PANDANGAN SUKU-BANGSA PENDATANG YANG BERSIFAT**  
**POSITIF TERHADAP SUKU-BANGSA LAIN**  
**DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No	Pandangan Positif	Jumlah ( n )	Persentase (%)
1.	Taqwa	14	8,9
2.	Kebersamaan	26	16,8
3.	Rukun	18	11,7
4.	Nrimo	10	6,4
5.	Terus Terang	13	8,3
6.	Tenggang Rasa	14	8,9
7.	Gotong Royong	9	5,9
8.	Halus	23	14,8
9.	Disiplin	5	3,2
10.	Kerja Keras	7	4,4
11.	Lain-lain	18	11,7
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan data tersebut pada tabel V.12, tampak sifat-sifat positif dari suku-bangsa lain dan yang paling banyak (16,8%) dikatakan oleh responden adalah sifat kebersamaan yang dimiliki oleh suku/kelompok lain. Terdapat cukup banyak (14,8%) responden yang memiliki pandangan positif terhadap suku lain karena sifatnya yang halus. Berdasarkan pengalamannya, sifat halus ini baru ditemui setelah responden tinggal lama di Desa Caturtunggal ini. Sifat rukun diakui juga sebagai salah satu sifat yang dipandang positif oleh 11,7%

responden pendatang yang tinggal di Desa Caturtunggal ini. Lain-lain yang dimaksudkan dalam tabel ini adalah responden yang memberikan jawaban lebih dari satu tentang sifat-sifat yang dipandang positif yang dimiliki oleh kelompok lain.

Biasanya suku-bangsa yang dipandang memiliki sifat positif ini berkaitan erat dengan suku-bangsa yang paling disenangi. Sebaliknya bagi suku-bangsa yang kurang disenangi karena mereka dianggap memiliki sifat-sifat yang negatif.

Menurut pengakuan responden memang demikian, ada suku bangsa lain yang disenangi, ada pula suku bangsa lain yang kurang berkenan/kurang disenangi. Suku bangsa lain atau kelompok lain yang disenangi dapat dilihat pada tabel V.13 berikut.

**Tabel V.13.**  
**SUKU-BANGSA YANG PALING DISENANGI**  
**SUKU BANGSA PENDATANG DI DESA CATURTUNGAL,1995**

No	Suku Paling Disenangi	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Suku Bangsa asal/Jawa	71	49,0
2.	Suku Pendatang	54	30,7
3.	Sama saja	32	20,3
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan data pada tabel V.13. tersebut terlihat bahwa suku bangsa lain yang paling banyak disenangi oleh suku bangsa pendatang adalah suku bangsa asal yaitu suku Jawa ( 49,0%). Ternyata suku bangsa pendatang ini tidak hanya sekedar mengenalnya, namun juga menyenangkinya. Terhadap 30,7% suku pendatang yang menyenangi sama-sama pendatang . Ada dua kriteria tentang suku pendatang yang menyenangi kelompok pendatang. Kriteria pertama, suku pendatang ini menyenangi pendatang dari sukunya sendiri. Kriteria ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sukuisme yang tinggi, dan dapat juga terjadi pada pendatang yang masih baru. Kriteria kedua, suku bangsa pendatang ini menyenangi suku pendatang namun berbeda suku, dan ini dapat terjadi pada pendatang yang mendapat perlakuan baik dengan pendatang dari

suku lain. Sementara itu, terdapat 20,3% suku pendatang yang memiliki pandangan netral, tidak ada kelompok lain yang paling disenangi tanpa memandang itu dari kelompoknya sendiri maupun dari kelompok suku-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini menyadari bahwa semua suku sama saja, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk.

Responden menyenangi suku-bangsa tertentu karena mereka memiliki sifat-sifat yang dipandang positif oleh suku bangsa pendatang/responden tersebut. Sementara itu, responden yang kurang menyenangi suku-bangsa tertentu karena dianggap memiliki sifat yang dianggap negatif. Suku-bangsa lain yang kurang disenangi responden ini dapat dilihat pada tabel V.14 berikut.

**Tabel V.14.**  
**SUKU BANGSA YANG PALING KURANG DISENANGI**  
**SUKU BANGSA PENDATANG DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No	Suku Paling Kurang Disenangi	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Suku Pendatang	65	42,6
2.	Suku Bangsa Asal	16	10,1
3.	Sama Saja	40	25,0
4.	Tidak Ada jawaban	35	22,3
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.14. terdapat 42,6% responden suku pendatang yang kurang menyenangi suku pendatang. Suku pendatang yang kurang berkenan/kurang disenangi oleh responden pendatang ini dapat dari orang-orang sesuku, dapat pula dari orang lain suku namun sama-sama pendatang. Terdapat 10,1% responden yang kurang menyenangi suku bangsa asal/Jawa. Terdapat 25,0% responden yang tidak menyenangi siapa-siapa, semua sama saja. Responden ini memandang bahwa setiap suku ada kekurangannya. Terdapat 22,3% responden yang tidak memberikan jawaban. Responden ini mempunyai sikap tidak tegas, takut menunjuk suku yang kurang disenangi. Mereka ini juga tidak memandang sama terhadap suku lain. Tidak adanya sikap yang tegas ini menunjukkan bahwa mereka ini takut menanggung risiko.

Sikap responden yang kurang menyenangi suku/kelompok lain ini disebabkan adanya pandangan negatif yang ada pada suku lain tersebut.

Pandangan negatif terhadap kelompok lain ini didasarkan atas pengalamannya selama bergaul dengan mereka. Tabel V.15 berikut ini menunjuk sifat-sifat yang dipandang negatif oleh responden suku-bangsa pendatang.

**Tabel V.15.**  
**PANDANGAN SUKU-BANGSA PENDATANG YANG**  
**BERSIFAT NEGATIF TERHADAP SUKU-BANGSA LAIN**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Pandangan Negatif	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Kasar	21	13,6
2.	Keras	15	9,6
3.	Tak mau mengalah	14	9,0
4.	Nrimo	12	7,7
5.	Suka kelahi	10	6,4
6.	Suka ngrasani	11	7,1
7.	Lain-lain	11	7,1
8.	Tak memberi jawaban	62	39,5
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.15, banyak (39,5%) responden tidak mau memberikan jawaban tentang pandangannya terhadap sifat negatif yang dimiliki oleh suku lain. Responden tidak mau memberikan alasan mengapa mereka tidak memberikan jawaban. Sebagai dugaan dimungkinkan karena responden takut menilai sifat yang kurang baik yang dimiliki orang lain. Untuk responden yang lain (13,6%) memberikan pandangan yang bersifat negatif terhadap suku lain karena sifat kasar yang dimiliki oleh suku lain tersebut. Sifat keras yang dimiliki oleh suku lain dipandang negatif pula oleh 9,6% responden. Demikian juga sifat yang tidak mau mengalah dengan orang lain dipandang sebagai sifat yang kurang baik pula oleh 9,0% responden. Nampaknya sifat nrimo juga dipandang kurang baik oleh 7,7% responden. Sifat suka kelahi dan suka ngrasani/suka ngomong dibelakang dipandang kurang baik pula oleh 6,4% dan 7,1% responden. Sifat-sifat yang lain-lain seperti: bohong, malas, dan sombong dipandang sebagai sifat yang kurang baik oleh 7,1% responden.

Pandangan responden suku-bangsa pendatang baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap kelompok lain itu dapat dipengaruhi oleh hubungannya terhadap suku-bangsa lain yang paling dikenal. Terutama bagi mereka yang menjatuhkan atau memberikan penilaian yang negatif terhadap suku-bangsa lain, dapat disebabkan karena mereka kurang mengenal suku-bangsa tersebut. Dalam wujud interaksi sosial atau hubungan sosial, mereka ini dapat dikata pula masih kurang atau frekuensinya relatif kecil. Sehubungan dengan hal itu sangatlah wajar jika mereka memberikan penilaian yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Atau dapat juga karena mereka kurang memahami budaya lain, mereka memberikan penilaian yang kurang pas/wajar tersebut.

Terhadap suku-bangsa lain yang paling dikenal, terdapat perbedaan antara responden yang satu dengan yang lain. Dari pengakuan responden, kelompok lain yang paling dikenal ini dapat dilihat pada tabel V.16 berikut.

**Tabel V.16**  
**SUKU-BANGSA YANG PALING DIKENAL**  
**SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No	Kelompok Paling Dikenal	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Suku Jawa	100	63,7
2.	Suku luar Jawa	48	30,6
3.	Tidak ada/belum ada	9	5,7
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.16, suku bangsa/kelompok lain yang paling banyak dikenal oleh suku bangsa pendatang adalah suku bangsa Jawa, yakni 63,7%. Hal ini sangatlah wajar karena mereka ini sebagai pendatang tinggal di Desa Caturtunggal yang bersuku Jawa, jadi mereka tinggal diantara orang Jawa. Status rumah tempat tinggal suku bangsa pendatang ini sebagian besar (93,1%) bukan miliknya, milik orang Jawa. Mereka menempati rumah tersebut dengan cara kontrak (21,7%), mondok/cost (51,0%), dan asrama (20,4%). Hanya terdapat 5,0% responden yang tinggal ikut keluarga, dan 1,9% tinggal dalam



rumah sendiri. Khususnya bagi responden yang tinggal dalam pondokan inilah yang paling banyak mengenal suku Jawa.

Terdapat 30,6% responden suku bangsa pendatang yang paling mengenal suku dari luar Jawa. Suku dari luar Jawa yang paling mereka kenal ini dapat berasal dari sukunya sendiri, namun dapat pula berasal dari suku lain. Responden yang paling mengenal hanya dari sukunya sendiri ini, ternyata responden tersebut tinggal dalam satu asrama atau rumah kontrakan yang orang-orangnya berasal dari suku atau propinsi yang sama. Terdapat 20,4% responden yang tinggal dalam asrama, dan terdapat 21,7% responden yang tinggal dalam rumah kontrakan. Demikian pula bagi responden yang paling mengenal dari suku luar Jawa namun bukan dari sukunya sendiri, mereka ini ternyata kebanyakan karena tinggal dalam asrama atau rumah kontrakan. Bagi responden yang tinggal dalam rumah keluarga atau sudah memiliki rumah sendiri, kebanyakan mereka ini lebih banyak mengenal suku Jawa.

Dalam tabel V.16, terlihat 5,7% suku pendatang yang tidak/belum ada kelompok lain yang paling dikenal. Hal ini disebabkan karena mereka ini belum lama datang ke Yogyakarta khususnya ke Desa Caturtunggal, sehingga mereka belum mengenal dengan sungguh-sungguh suku bangsa lain karena belum lama berinteraksi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, lamanya masing-masing suku-bangsa tersebut tinggal berpengaruh terhadap tingkat pengenalan dengan suku bangsa lain. Tabel V.17 berikut menunjukkan lamanya suku bangsa pendatang tinggal di Yogyakarta.

**Tabel V.17.**  
**LAMANYA SUKU-BANGSA PENDATANG TINGGAL**  
**DI YOGYAKARTA TAHUN 1995**

No	Lama Tinggal	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Kurang dari 5 tahun	106	67,5
2.	5 - <10 tahun	39	24,8
3.	10 tahun keatas	12	7,7
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.17 tersebut, paling banyak pendatang tinggal di Yogyakarta kurang dari 5 tahun, yakni 67,5%. Sangat dimungkinkan waktu yang relatif sedikit, suku pendatang ini belum betul-betul mengenal suku bangsa lain. Dan ternyata responden yang mengatakan tidak atau belum ada suku yang paling dikenal, mereka ini lamanya tinggal di Desa Caturtunggal kurang dari 5 tahun.

Terdapat suku bangsa pendatang yang tinggal di Desa Caturtunggal ini yang sebelumnya sudah tinggal di Yogyakarta namun tidak di Desa tersebut. Dari 157 orang responden pendatang terdapat 34,4% pernah berpindah-pindah. Dan mereka yang senang berpindah-pindah inilah biasanya yang paling banyak mengenal suku bangsa lain.

Lamanya mengenal kepada suku bangsa lain yang paling dikenal dapat dilihat dari tabel V.18 berikut.

**Tabel V.18.**  
**LAMANYA SUKU BANGSA PENDATANG**  
**MENGENAL SUKU BANGSA LAIN YANG PALING DIKENAL**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Lama Mengenal	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Kurang dari 5 tahun	90	57,3
2.	5 - < 10 tahun	36	23,0
3.	10 - < 15 tahun	16	10,1
4.	15 - < 20 tahun	6	3,9
5.	20 tahun keatas	9	5,7
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.18. tersebut, sebagian besar (57,3%) suku bangsa pendatang dalam mengenal suku bangsa lain kurang dari 5 tahun. Kebanyakan suku bangsa lain yang paling dikenal oleh pendatang adalah suku bangsa yang tinggal serumah dalam satu cost/satu kontrakan/satu asrama atau berdekatan dengannya. Melalui pergaulan sehari-hari dengan suku lain tersebut mereka saling mengenal. Berdasarkan hasil lapangan diperoleh data terdapat 54,8% pendatang paling mengenal suku bangsa lain lewat pergaulan sehari-hari.

Pendatang lainnya paling mengenal suku bangsa lain lewat pendidikan (8,9%), lewat kegiatan agama (14,6%), lewat kegiatan organisasi (3,8%), lewat olah raga (5,1%), lewat pekerjaan (5,1%), dan lewat berbagai macam kegiatan (8,7%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel V.19 berikut.

**Tabel V.19.**  
**TEMPAT MENGENAL**  
**SUKU-BANGSA PENDATANG TERHADAP SUKU-BANGSA LAIN**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Mengenal Lewat	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Pergaulan sehari-hari	86	54,8
2.	Kegiatan agama	23	14,6
3.	Lewat pendidikan	14	8,9
4.	Kegiatan organisasi	6	3,8
5.	Lewat Olah Raga	8	5,1
6.	Pekerjaan/bisnis	8	5,1
7.	Berbagai kegiatan	12	8,7
Jumlah		157	100,0

Sumber: Data Primer, 1995

Suku bangsa pendatang dalam mengenal suku lain sebagian besar lewat pergaulan sehari-hari. Bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan tersebut ada yang dengan menggunakan bahasa Indonesia, ada pula yang menggunakan bahasa daerah/bahasa Jawa. Mereka akan menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan sukunya yang sama-sama pendatang. Dalam berinteraksi dengan suku bangsa asal mereka/suku pendatang berusaha menggunakan bahasa Jawa. Dikatakan oleh beberapa informan bahwa dengan menggunakan bahasa daerah/ khususnya bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka, dipandang lebih akrab. Hal ini dapat dimengerti karena suku pendatang ini tinggal dikalangan suku Jawa yang berbahasa Jawa. Informasi lebih lanjut dikatakan bahwa banyak suku bangsa pendatang yang mencoba berkomunikasi dengan berbahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawa yang dikatakan itu tidak karuh-karuhan/Jawa ngoko, hubungannya dianggap akrab. Namun tidaklah mudah bagi suku pendatang untuk berbicara dengan bahasa

Jawa. Terlihat banyak (93,0%) suku pendatang yang berusaha belajar bahasa Jawa tersebut, dan terlihat mereka 75,5% telah menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa para pendatang ini telah dapat menyesuaikan diri dan telah dapat berkomunikasi dengan lancar.

Pada masa kini telah terjadi perubahan sudut pandang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sifat-sifat yang semula dipandang baik/positif dan kurang baik/negatif, ternyata ada yang mengalami perubahan pada masa kini. Hal ini dikatakan oleh sebagian responden dan beberapa informan yang telah lama menjalin hubungan baik dengan suku lain. Responden mengatakan bahwa sekalipun orang lain itu memiliki sifat-sifat yang kurang baik, namun jika kita memperlakukan mereka dengan baik sifatnya akan menjadi baik. Dikatakan pula oleh responden bahwa semua orang ada kelemahan/kekurangan dan kelebihan, namun jika kita saling memahami kita dapat menyatu.

Ada beberapa informan terutama para pendatang yang telah lama tinggal di Desa Caturtunggal ini, mereka mengatakan bahwa pada awalnya mereka takut dengan orang Jawa namun setelah bergaul lama kini menjadi teman akrab. Pengalaman lain mengatakan bahwa semula responden merasa senang karena diperlakukan halus namun setelah tahu mereka senang ngomong-ngomong namanya dibelakang, pandangan responden berubah menjadi negatif.

## **5. Pengetahuan Tentang Sistem Nilai Budaya Nasional**

Pengetahuan tentang sistem nilai budaya nasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden baik itu suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang yang menyangkut nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Pembangunan terencana/pembangunan nasional, dan sistem hukum nasional. Pada dasarnya sistem nilai budaya nasional baik yang menyangkut nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan terencana, maupun nilai dalam sistem hukum nasional, adalah suatu pandangan hidup, sistem nilai, yang bersifat nasional yang telah diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini dijadikan pedoman atau kerangka acuan dalam kehidupan masyarakat oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai tersebut telah dijabarkan dalam 36 butir yang ada pada Pancasila. Menurut Alfian (1988) sistem nilai budaya nasional adalah sistem nilai yang berasal dan bersumber dari realita kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut riil hidup didalam masyarakat, sehingga harus betul-betul dapat dirasakan dan dihayati sebagai milik bersama.

Berdasarkan jawaban semua responden pada dasarnya mereka mengetahui tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai

landasan ideal dan struktural dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Namun didalam memahami masing-masing sila beserta butir-butirnya masih ada diantara responden yang kurang faham. Penjabaran dari butir-butir pada Pancasila tersebut dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat..

Pengetahuan responden yang menyangkut nilai-nilai Pancasila ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pemahaman terhadap butir-butir yang ada pada Pancasila tersebut.

Dalam memahami sila pertama yaitu "Sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa", semua responden tahu tentang sila tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sikap taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing, dalam sikapnya yang baik terhadap agama lain. Namun, dalam pemahaman terhadap butir-butirnya masih ada (8,7%) responden yang keliru. Hal ini dapat dilihat dari usahanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti agamanya. Tindakan ini tidak sesuai dengan butir ke empat pada sila pertama yang berbunyi "Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain". Tindakan yang lain, dapat dilihat dari sikap beberapa responden yang tidak mau tinggal berdampingan dengan lain agama, dan hanya mau hidup rukun dengan orang yang se agama.

Sikap ini tidak sesuai dengan butir ke 2 pada sila I yang berbunyi "Membina Kerukunan Umat Beragama".

Dalam memahami sila ke dua pada Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", semua responden tahu tentang sila tersebut. Dalam pemahaman butir-butirnya, hanya terdapat sebagian (14,7%) responden yang tidak mau membedakan agama, suku, agama dan suku dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari jawaban mereka yang mengatakan "Semua suku sama saja untuk hidup berdampingan atau bersama-sama".

Sementara itu, terdapat 26,7% responden yang hanya mau hidup berdampingan dengan orang lain yang se iman/ se agama, dan 17,3% responden hanya mau dengan orang yang se suku saja, responden yang lain hanya mau dengan orang yang se agama dan se suku, bahkan masih ada (14,7%) responden tidak setuju adanya kawin campur. Tindakan ini tidak sesuai dengan butir pertama pada sila ke dua yang berbunyi "Mengakui persamaan derajat, sesama bangsa Indonesia".

Dalam memahami sila ke tiga yaitu "Sila Persatuan Indonesia", semua responden juga tahu sila tersebut. Dalam pemahamannya ditunjukkan dalam sikap setuju dari 76,4% % responden untuk kerjasama dengan siapa saja dan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, dalam pergaulan sehari-hari terdapat 76,8% responden yang meluangkan waktu dan berusaha untuk

memahami suku lain agar dapat berinteraksi dengan baik. Namun demikian, bagi responden yang berkeberatan untuk tinggal di mana saja di pelosok tanah air, dan bagi responden yang memilih-milih dalam pergaulan, menunjukkan adanya sikap yang tidak sesuai dengan butir-butir khususnya pada butir ke tiga dan ke lima pada sila ketiga yang berbunyi "Cinta tanah air dan bangsa", dan "Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia".

Dalam memahami sila ke empat yang berbunyi "Kerakyatan YAng Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, semua responden juga tahu. Dalam pemahaman butir-butirnya masih ada responden yang kurang memahami. Hal ini dapat dilihat dari sikap responden yang dalam bermusyawarah kurang menghargai pendapat orang lain, dalam mengambil suatu keputusan tanpa musyawarah lebih dulu dengan para anggotanya, dalam mencapai mufakat tidak dilandasi oleh rasa kekeluargaan, dan tingakan-tindakan lain yang mengabaikan orang lain. Semua tindakan ini tidak sesuai dengan sila ke empat terutama pada butir ke tiga dan ke empat yang berbunyi "Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama", dan "Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semabgat kekeluargaan".

Dalam memahami sila ke lima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", semua responden mengetahuinya. Dalam pemahaman terhadap butir-butirnya masih ada beberapa responden yang dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari sikap responden dalam memberikan bantuan terhadap orang lain yang kadang kalanya masih menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti karena kesamaan agama, kesamaan suku, bukan karena sebagai sesama bangsa Indonesia. Selain itu, kadang kala dijumpai sifat keras sehingga merugikan pihak lain. Tindakan ini tidak sesuai khususnya dengan butir ke lima dan ke tujuh yang berbunyi " Suka memberi pertolongan kepada orang lain", dan "Tidak bersifat kasar".

Dari semua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua responden mengetahui sistem nilai budaya nasional, mengetahui semua nilai-nilai Pancasila, namun pada tingkat pemahamannya mengalami perbedaan. Ada responden yang sudah paham, dan ada yang belum paham. Bagi responden yang belum paham dapat dilihat dari tindakannya yang masih tidak sesuai dengan makna dari butir-butir yang ada pada setiap sila dari ke lima sila pada Pancasila tersebut.

Tingkat pemahaman responden yang berbeda-beda ini dapat disebabkan oleh karena kurang menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sangat penting dalam berkomunikasi dengan orang lain, dapat juga karena kurang memahami lewat pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan

formal sebetulnya masyarakat telah diperkenalkan lewat pelajaran pendidikan moral Pancasila. Namun kebanyakan orang menganggap pelajaran tersebut sekedar untuk memperoleh nilai saja sehingga tidak begitu dipahami. Padahal menurut pengakuan mereka pendidikan moral Pancasila jika dipahami dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain. Dalam kenyatannya, masih ada diantara mereka yang belum sadar tentang hal itu. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan responden yang sebagian besar masih belum dapat meningkatkan kesadaran untuk senang hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain. Mereka mengatakan perlu adanya semacam penataran, atau mengikuti pelajaran budi pekerti, atau meningkatkan pengetahuan melalui bacaan terkait, cerita-cerita, maupun lewat pengalamannya sendiri.

Telah dikatakan oleh responden bahwa tingkat pemahaman dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai tersebut seperti nilai rukun, hormat, tenggang rasa, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sehubungan dengan itu, responden menganggap perlu nilai-nilai tersebut untuk disadari agar dapat difahami. Menurut pendapat responden, nilai-nilai tersebut adalah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V.20.**  
**NILAI-NILAI YANG SEHARUSNYA DIFAHAMI**  
**MENURUT PENDAPAT SUKU-BANGSA ASAL**  
**DI DESA CATURTUNGGAL, 1995**

No	Nilai Untuk Diamalkan	Jumlah (n = 75)	Persentase (%)
1.	Rukun	71	94,7
2.	Hormat	71	94,7
3.	Tenggang Rasa	67	89,3
4.	Kebersamaan	66	88,0
5.	Gotong Royong	72	96,0
6.	Musyawarah	63	84,0

Sumber: Data Primer, 1995

Berdasarkan tabel V.20 terlihat nilai gotong royong memiliki jumlah paling banyak (96,0%). Menurut pengakuan responden gotong royong merupakan salah satu nilai yang sejak kecil sudah ditanamkan oleh orang



tuanya kepada responden. Kata orang tua, nilai ini harus dilakukan dimana saja agar dapat hidup tentram bersama orang lain. Sehubungan dengan itu, responden berpendapat bahwa gotong royong ini sangat penting untuk hidup bersama/berdampingan dengan orang lain, oleh karenanya seharusnya perlu dikembangkan dan difahami.

Nilai rukun menurut pendapat 94,7% responden sangat penting pula dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain. Menurut pendapatnya, kerukunan membawa/mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain, oleh karenanya perlu difahami.

Nilai hormat, menurut pendapat 94,7% dari responden dibutuhkan pula dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain. Alasannya adalah dengan memiliki sikap hormat, saling menghargai terhadap siapa saja, agama apa saja, suku apa saja; dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain.

Nilai tenggang rasa dibutuhkan pula dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain. Menurut pendapat 89,3% responden, dengan memiliki sifat tenggang rasa ini hidupnya bersama /berdampingan dengan orang lain terasa aman, tidak dibenci, ada rasa kekeluargaan, dan terjalin hubungan yang baik.

Nilai kebersamaan, menurut responden nilai ini penting pula dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain. Menurut pendapat 88,0% responden, dengan memiliki sifat kebersamaan ini hidupnya terasa aman, tidak ada musuh, rukun, dan damai.

Nilai musyawarah dibutuhkan pula dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain. Menurut pendapat 84,0% responden dengan selalu bermusyawarah, mengurangi kesalahfahaman sehingga hidupnya bersama dengan orang lain terasa aman.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya nilai-nilai tersebut menurut pendapat responden seharusnya difahami karena nilai-nilai ini dianggap penting dalam bersama/berdampingan dengan orang lain.

Bentuk pengamalan nilai rukun diwujudkan dari sikap responden di kampungnya. Responden berusaha menjaga hubungan baik dengan siapa saja. Sikap tidak membedakan kepada siapa saja, entah itu orang yang se agama atau tidak se agama, se suku atau tidak se suku, pendatang atau penduduk asli; semua dianggap sama saja. Sikap responden seperti ini menunjukkan bahwa responden telah mengamalkan nilai budaya nasional.

Nilai hormat oleh responden diwujudkan dalam sikapnya yang selalu menghargai terhadap sesamanya tanpa memandang agama atau suku. Sikap

responden ini menunjukkan bahwa responden telah mengamalkan nilai budaya nasional.

Nilai tenggang rasa oleh responden diwujudkan dalam bentuk sikapnya yang selalu mempedulikan orang lain yang tinggal bersama/berdampingan dengannya.

Nilai kebersamaan oleh responden diwujudkan dalam bentuk usahanya untuk selalu rukun, menghindari terjadinya kesalahfahaman, sehingga responden dapat selalu bersama/berdampingan dengan orang lain.

Nilai gotong royong oleh responden diwujudkan dalam bentuk usahanya yang selalu berusaha untuk melibatkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada di kampungnya.

Nilai musyawarah oleh responden diwujudkan dalam sikapnya yang selalu menerima saran/anjuran orang, sehingga disenangi orang lain.

Dari semua uraian diatas, pengetahuan responden tentang sistem nilai budaya nasional pada dasarnya mereka tahu, dan memahaminya. Responden memahami baik lewat pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diajarkan di bangku sekolah melalui pelajaran pendidikan moral Pancasila, sedang pendidikan non formal dapat melalui keluarga atau komunikasinya bersama orang lain.

Responden dalam memahami nilai-nilai tersebut kurang menyadari bahwa nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan atau sangat penting dalam kehidupannya bersama atau berdampingan dengan orang lain.

## **b. Pengetahuan Suku-Bangsa Pendatang Tentang Sistem Nilai Budaya Nasional**

Pengetahuan responden tentang sistem nilai budaya nasional yang dimaksudkan adalah pengetahuan mereka yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Pembangunan terencana, dan sistem hukum nasional.

Dalam penelitian ini, pengetahuan responden tentang sistem nilai budaya nasional dapat dilihat dari pemahaman dan kesadaran mereka tentang nilai-nilai budaya nasional tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, baik melalui nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam 36 butir itu maupun melalui pendidikan yang diperoleh baik secara formal maupun non formal lewat pendidikan moral pancasila Pancasila dan pendidikan dalam keluarga.

Banyak responden yang memahami nilai-nilai tersebut, namun banyak yang tidak menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hidup bersama dengan orang lain. Dalam pemahamanpun mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya.

Pada dasarnya semua responden suku-bangsa pendatang ini mengetahui sila-sila pada Pancasila dan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah mereka ketahui pula. Menurut mereka hal itu telah diajarkan sejak mereka berada di sekolah dasar. Jadi, pada dasarnya semua responden mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal baru melainkan sudah dikenalnya sejak kecil, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Namun didalam pemahaman tentang makna dari masing-masing nilai dalam setiap kehidupan sebagai warga masyarakat Indonesia yang multietnik ini, tampaknya masih ada di antara mereka yang kurang faham. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam memahami sila pertama pada Pancasila yang berbunyi "Ke Tuhanan Yang Maha Esa" oleh responden ditunjukkan dalam taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun pengertian ketaqwaan tersebut menurut responden berbeda-beda, demikian pula cara pemahamannya. Ada responden yang mengatakan taqwa adalah tindakan rajin menjalankan ibadah. Taqwa adalah tugas dan kewajiban bagi orang beragama, harus dijalankan penuh kesadaran. Dalam kehidupan bersama, baik dengan agamanya sendiri maupun dengan agama lain, taqwa diwujudkan dalam suatu tindakan untuk saling selalu menghormati dan bekerjasama dengan agama lain. Namun, masih ada diantara responden (8,3%) menunjukkan sikap menjauhkan diri dengan agama lain dengan alasan takut dan khawatir terkena pengaruh agama lain tersebut. Selain itu, ada beberapa (6,9%) responden yang mau meluangkan waktunya hanya untuk mempengaruhi orang lain agar ikut dalam agamanya. Semua tindakan yang dilakukan oleh beberapa responden ini tidak sesuai dengan makna dari sila pertama butir ke dua yang berbunyi "Membina kerukunan antar umat beragama", dan butir ke empat yang berbunyi "Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain".

Dalam memahami sila ke dua pada Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", oleh responden suku-bangsa pendatang ditunjukkan sikap setuju hidup berdampingan atau tinggal berasama dalam satu kost/satu rumah dengan orang lain, mau bekerja sama dengan orang lain, dan mau bergaul dengan orang lain. Namun tidak semua responden memahami demikian. Dalam pemahamannya, masih ada diantara responden yang membedakan suku, agama, dan kelompok tertentu. Terlihat 5,7% responden hanya mau tinggal berdampingan dengan orang yang se suku saja, 3,2% responden yang hanya mau bekerjasama dengan orang yang se agama atau se suku, dan ada responden yang mau bergaul dengan teman-teman yang

setingkat saja. Tindakan responden yang membeda-bedakan agama, suku dan agama, serta kelompok tertentu ini tidak sesuai dengan butir pertama pada sila ke dua dari Pancasila yang berbunyi "Mengakui persamaan derajat, sesama bangsa Indonesia".

Dalam memahami sila ke tiga pada Pancasila yang berbunyi "Persatuan Indonesia", oleh responden ditunjukkan pada sikapnya yang mau berkorban, mau bekerjasama dengan orang lain, setuju adanya kawin campur (amalgamasi), dan setuju bekerja di mana saja. Namun tidak semua responden memahami demikian. Terdapat beberapa responden yang mau berkorban hanya dengan golongan tertentu saja, mau bekerjasama dengan orang lain yang se agama atau se suku saja, kurang dan tidak setuju terhadap perkawinan yang berbeda suku, dan ada 2,6% responden yang tidak mau bekerja di tempat lain selain di daerahnya sendiri/di tempat kelahirannya. Tindakan-tindakan seperti ini tidak sesuai dengan butir ke dua dan ke tiga pada sila ke tiga dari Pancasila yang berbunyi "Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara", dan "cinta tanah air dan bangsa".

Dalam memahami sila ke empat pada Pancasila yang berbunyi "kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan", oleh responden ditunjukkan pada sikap responden yang mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Namun tidak semua responden memahami demikian. Terdapat beberapa responden yang ingin memaksakan pendapatnya kepada orang lain, ada juga yang melakukan keputusan sendiri tanpa musyawarah lebih dulu. Semua tindakan ini tidak sesuai dengan butir ke dua dan ke tiga pada sila ke empat dari Pancasila yang berbunyi "Tidak memaksakan kehendak orang lain", dan "Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama".

Dalam memahami sila ke lima dari Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", oleh responden ditunjukkan dalam sikapnya yang senang melakukan kegiatan gotong royong, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Namun tidak semua responden berbuat demikian. Masih terdapat sebagian kecil responden yang menunjukkan sikap individualistis, merendahkan orang lain, tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang lemah ekonominya, dan sering melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Semua tindakan ini tidak sesuai dengan butir pertama, ke empat, kelima dan ke enam, yang masing-masing berbunyi "Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan ke gotongroyongan", "Menghormati hak-

hak orang lain", "Suka memberi pertolongan kepada orang lain", dan Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain".

Dari semua uraian diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya semua responden tahu tentang Pancasila, namun di dalam pemahamannya masing-masing responden berbeda-beda bahkan ada di antara responden yang masih rendah tingkat pemahamannya. Perbedaan pemahaman ini dapat disebabkan karena kurangnya\minimnya berkomunikasi dengan orang lain baik dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda status sosialnya. Selain itu, identitas masing-masing orang yang sudah terbentuk sejak kecil tidak dapat dengan mudah untuk berubah.

## 2). Pengetahuan Responden Suku-Bangsa Pendatang Yang Menyangkut Nilai-Nilai pada UUD 45.

UUD 45 digunakan sebagai landasan struktural bagi seluruh bangsa Indonesia adalah merupakan wujud kebudayaan nasional dan merupakan pedoman tertinggi yang harus ditaati oleh para wakil rakyat dan penyelenggara negara. Atas dasar itu, berbagai pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 45 merupakan sumber yang mengilhami dan melandasi segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh negara Indonesia. Pada dasarnya, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh para wakil rakyat dan penyelenggara negara adalah perwujudan nyata atau yang dicita-citakan maupun sebagai landasan kebudayaan nasional yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya, wujud kebudayaan nasional dan gagasan telah hadir melalui perumusan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan (Pourwanto, 1996).

Dalam pasal 32 UUD 45 disebutkan bahwa: "kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat seluruhnya. Kebudayaan.....". Yang intinya: pemerintah memajukan kebudayaan nasional.

Dari hasil penelitian, pada dasarnya semua responden mengetahui tentang UUD 45 lewat pasal-pasalnya. Kebanyakan responden mengenal lewat pendidikan formal melalui pelajaran PMP. Namun di dalam pemahamannya khususnya untuk pasal 32, masih ada diantara responden yang kurang faham. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemahaman yang berbeda-beda diantara responden. Ada beberapa responden yang sangat patuh dengan budaya daerahnya sehingga tidak mau menerima budaya orang lain atau budaya asing yang sebetulnya bersifat positif. Hal ini ditunjukkan dari sikapnya yang selalu berusaha untuk menonjolkan budayanya sendiri tanpa memperhatikan budaya lain.

Dalam memahami nilai-nilai tersebut ternyata tidak semua responden faham, ada yang kurang faham bahkan tidak faham walaupun mereka ini sebetulnya telah mengenalnya melalui pelajaran pendidikan moral Pancasila/PMP yang diperoleh di bangku sekolah.

Walaupun responden telah lama mengenal nilai-nilai budaya nasional tersebut, namun belum pasti dapat memahaminya. Ada responden yang mengatakan dapat memahami nilai-nilai tersebut, ada pula yang mengatakan tidak/belum dapat memahami nilai-nilai tersebut.

Perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari pendapat responden tentang ajaran pendidikan moral Pancasila. Menurut pendapatnya, ada responden yang mengatakan bahwa pendidikan moral Pancasila dapat untuk meningkatkan kesadaran responden dalam hidup bersama dengan orang lain, yakni 77,1% . Jika dilihat dari masing-masing kelompok pendatang, jumlah responden paling banyak (82,6%) yang berpendapat bahwa pendidikan moral Pancasila telah dapat meningkatkan kesadarannya untuk hidup bersama dengan suku lain adalah pendatang asal Sumatra. Sebaliknya pendatang asal Nusa Tenggara jumlahnya paling sedikit (69,0). Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman.

Dari pendapat (77,1%) responden bahwa PMP dapat meningkatkan kesadaran untuk hidup bersama dengan suku lain tersebut, menunjukkan bahwa responden telah mengetahui sistem nilai budaya nasional.

Dari para pendatang ini ternyata masih ada (2,5%) responden yang mengatakan "tidak tahu", dalam pengertian mereka tidak memberikan pendapatnya tentang PMP yang dapat, atau belum dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk hidup berdampingan dengan suku lain. Sikap tidak tahu ini dapat disebabkan oleh karena mereka kurang mengetahui nilai budaya nasional, namun dapat pula karena mereka malas memberikan pendapat tentang hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang mengetahui nilai budaya nasional.

Terdapat (20,4%) responden yang berpendapat bahwa PMP belum dapat meningkatkan kesadarannya untuk hidup bersama dengan suku lain, paling banyak (28,6%) responden berasal dari Nusa Tenggara. Dikatakan oleh responden bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya memahaminya tentang PMP. Oleh sebab itu responden berpendapat harus ada usaha yang harus dilakukan.

Menurut pendapat responden (terutama yang mengatakan belum dapat, dan tidak tahu), usaha meningkatkan kesadaran untuk hidup bersama dengan orang lain dapat dengan cara memahami P4 namun dapat pula dengan cara lain. Terdapat 77,8% responden yang mengatakan setuju dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa pemahamannya terhadap nilai budaya nasional

masih kurang sehingga perlu diberikan penataran P4. Mereka yakin bahwa dengan diberikan penataran P4 ini, mereka dapat meningkatkan kedarannya untuk hidup berdampingan dengan suku lain.

Menurut pendapat responden yang lain, usaha yang harus dilakukan adalah dengan cara melalui pendidikan budi pekerti (8,3%). Menurut pendapat mereka ini, budi pekerti yang baik dapat meningkatkan kesadaran orang untuk hidup berdampingan dengan suku lain. Oleh karenanya, budi pekerti menurut pendapatnya dipandang penting dalam hal ini.

Usaha yang lain menurut pendapat responden adalah dengan melalui pendidikan agama. Terdapat 13,9% responden yang berpendapat demikian dengan alasan bahwa pendidikan agama dapat menuntun orang dalam meningkatkan kesadaran untuk hidup berdampingan dengan suku lain.

Dari beberapa pendapat responden tentang usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran untuk hidup berdampingan ini menunjukkan bahwa responden berusaha untuk memahami dan mengamalkan sistem nilai budaya nasional.

Dalam pendapatnya, responden mengatakan bahwa belum pasti orang yang memahami nilai budaya nasional melalui pelajaran PMP ini memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama orang lain. Hal ini dikatakan responden berdasarkan pengalamannya dalam hidup sehari-hari bersama/berdampingan dengan orang lain.

Menurut pendapat responden, nilai-nilai tersebut seharusnya tidak hanya difahami namun juga harus disadari bahwa nilai-nilai tersebut sangat penting dalam hidup sehari-hari bersama/ berdampingan dengan orang lain. Menurut pendapat responden terdapat beberapa nilai yang seharusnya di fahami dan disadari dan dianggap penting dalam kehidupan bersama orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel V.21.**  
**NILAI-NILAI YANG SEHARUSNYA DIFAHAMI**  
**MENURUT PENDAPAT SUKU-BANGSA PENDATANG**  
**DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No	Nilai Budaya Nasional	Jumlah (n=150)	Persentase (%)
1.	Rukun	121	77,1
2.	Hormat	127	80,9
3.	Tenggang Rasa	122	77,7
4.	Kebersamaan	116	73,9
5.	Gotong Royong	113	72,0
6.	Musyawaharah	111	70,7

Sumber: Data Primer, 1995

Dari tabel V.21 terdapat 6 nilai yang seharusnya difahami dan disadari dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain, karena nilai-nilai tersebut dianggap sangat penting. Dalam memberikan pendapatnya, responden minimal memberikan dua jawaban, maksimal responden menyetujui semua nilai-nilai tersebut.

Menurut pendapat responden yang setuju dengan semua nilai-nilai tersebut untuk difahami dan disadari dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain, menunjukkan bahwa responden betul-betul memahami nilai-nilai budaya nasional tersebut.

Bentuk-bentuk pengamalan nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikatakan oleh responden bahwa mereka berusaha agar tetap rukun dengan orang lain yang tinggal bersamanya/berdampingan dengannya. Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara: saling menjaga hubungan baik, saling toleransi, saling pengertian, hati-hati dalam tutur kata, dan tidak mencampuri urusan orang.

Saling hormat menghormati merupakan nilai yang harus disadari bahwa nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Responden mengatakan bahwa mereka berusaha untuk selalu hormat menghormati/harga menghargai, agar hubungan mereka dengan orang lain selalu baik. Menurut pengalaman dari salah satu responden, ia mengatakan pernah melihat orang berkelahi gara-gara tersinggung oleh perilakunya yang

tidak sopan/tidak menghargai orang lain. Hal ini dibenarkan juga oleh pengalaman yang diungkapkan oleh informan yang kebetulan pernah menangani kasus serupa.

Dikatakan oleh responden bahwa dalam hidup bersama/berdampingan dengan orang lain harus memiliki rasa tenggang rasa agar dapat hidup rukun, bersatu, merasa aman dan tentram. Menurut pengalaman beberapa responden, pernah melihat temannya dalam satu kost dibenci oleh teman yang lain dalam kost yang sama gara-gara tidak adanya tenggang rasa tersebut. Hal ini dibenarkan juga oleh pengalaman yang dikatakan oleh informan yang pernah mendapat laporan dan menangani pernah konflik kecil yang terjadi di RT nya.

Kebersamaan dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain sangat perlu untuk membina persatuan/kerukunan antar mereka. Hal ini dirasakan oleh responden yang hidup dalam kost yang orang-orangnya berasal dari berbagai suku bangsa. Menurut pengakuannya, dalam hidup serumah dengan orang yang berbeda-beda harus memiliki sifat kebersamaan ini. Jika sifat kebersamaan ini tidak ada, kita tidak punya teman. Hal ini dibenarkan oleh informan yang kebetulan dia adalah pemilik rumah yang dikostkan tersebut.

Gotong royong dalam hidup bersama dengan orang lain diperlukan juga dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikatakan oleh responden yang tinggal dalam kost yang kebetulan pernah mengalami masalah ekonomi. Dia mendapat bantuan sedikit uang dari teman-teman se kost. Uang tersebut dikumpulkan secara gotong royong/suka rela. Tindakan ini sangat baik, mereka rela berkorban untuk kepentingan orang lain.

Musyawarah dalam hidup bersama atau berdampingan dengan orang lain sangat penting guna mewujudkan persatuan dan kesatuan antar manusia. Dikatakan oleh responden bahwa mereka sering mengadakan musyawarah dengan teman-teman se kostnya jika punya problem. Bahkan ada responden yang bermusyawarah dengan orang yang tinggal disekitarnya yang dianggap dapat membantunya. Menurut pengalaman responden, pernah terjadi masalah akibat pergaulan bebas. Lantas mereka mengadakan pertemuan yang beranggotakan semua anak-anak kost yang tinggal dalam rumah tersebut. Dalam pertemuan ini mereka berembuk bersama tentang bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut. Dari hasil rembug bersama ini kemudian digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari semua uraian tersebut diatas, pada dasarnya semua responden tahu tentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mengenalnya melalui pelajaran di bangku sekolah atau lewat penataran atau pelajaran-pelajaran lainnya. Mereka banyak yang telah memahaminya, namun masih banyak diantara mereka yang kurang menyadari bahwa nilai-nilai tersebut

sangat penting dalam kehidupan bersama atau berdampingan dengan orang lain.

## **B. ANALISIS**

### **1. Kaitan Sistem Nilai Budaya Suku-Bangsa dengan Sistem Budaya Nasional**

Sistem nilai budaya suku-bangsa dengan sistem nilai budaya nasional memiliki kaitan yang sangat erat karena nilai-nilai yang terkandung dalam sistem nilai budaya nasional ini berasal dari nilai-nilai budaya daerah yang mana nilai-nilai budaya daerah itu sendiri berasal dari nilai-nilai budaya suku-bangsa yang dianggap paling dominan.

Secara garis besar, sistem nilai budaya nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia ini didasarkan pula kepada satu kesatuan kebudayaan nasional, bukan berdasar kepada sistem nilai budaya daerah. Sistem budaya nasional yang mengacu kepada kebudayaan nasional itu secara konkret terwujud dalam pola tingkah laku masyarakat Indonesia yang bertumpu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sila-sila dalam Pancasila adalah sesuatu yang baru karena tidak satu kerajaanpun di Nusantara ini pernah memiliki lima sila sebagai ideologi kerajaan, tetapi gagasan yang tersirat dalam setiap sila adalah bersumber pada kebudayaan suku-suku-bangsa yang ada di Indonesia. Penjabaran Pancasila ke dalam 36 butir pada dasarnya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan nilai-nilai yang ada pada butir-butir tersebut berasal dari nilai budaya suku-bangsa.

Sistem nilai budaya suku-bangsa memang berkaitan erat dengan sistem nilai budaya nasional, namun terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa sistem nilai budaya suku-bangsa digunakan sebagai kerangka acuan pada lingkup suku-bangsa, sedang sistem nilai budaya nasional digunakan pada lingkup nasional yaitu sebagai kerangka acuan seluruh bangsa Indonesia.

Nilai-nilai budaya yang digunakan sebagai kerangka acuan bagi seluruh bangsa Indonesia ini pada dasarnya berasal dari nilai-nilai suku-bangsa sehingga ada keterkaitan antara sistem nilai budaya suku-bangsa dengan sistem nilai budaya nasional.

Dalam penelitian ini, kaitan sistem nilai budaya suku-bangsa dengan sistem budaya nasional dianalisa melalui hubungan antarsuku bangsa berdasarkan kenyataan nilai budaya suku-bangsa dan nilai budaya nasional yang difahami dan diamalkan. Dari hasil penelitian, dari kedua suku-bangsa baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang, mereka memiliki

beberapa nilai budaya yang dianggap paling penting dalam hidupnya (lihat tabel V.1 dan V.2. di depan). Hampir semua nilai-nilai yang mereka anggap penting dalam hidupnya tersebut terdapat pula dalam sistem nilai budaya nasional yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti berikut.

Nilai taqwa, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "ketaatan dalam menjalankan ibadah" sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sedang menurut suku-bangsa pendatang/ suku luar Jawa diartikan sebagai "mendekatkan diri kepada Tuhan". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai taqwa yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun pada dasarnya nilai ini berkaitan dengan nilai budaya nasional pada sila pertama.

Kenyataan dalam hubungan antar suku-bangsa, pemahaman dan pengalaman nilai tersebut dapat dilihat dari usaha suku-bangsa asal/suku Jawa dalam menjauhkan diri dari berbagai macam konflik agama dengan orang lain, dan usaha dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dalam mendekatkan diri dengan orang lain/sesama bangsa. Dari hasil penelitian, terdapat 2,7% responden dari suku bangsa asal/suku Jawa dan 16,7% dari suku-bangsa pendatang/luar Jawa, yang telah memahami dan mengamalkan nilai taqwa ini. Terlihat masih sedikit, bahkan sangat sedikit untuk suku-bangsa asal/suku Jawa yang memahami dan mengamalkan.

Nilai rukun, dapat diartikan hidup dalam suasana tentram dan damai oleh suku-bangsa asal, dan oleh suku-bangsa pendatang diartikan sebagai usaha menjaga hubungan baik dengan tanpa konflik. Terdapat 34,7% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 38,2% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang mengatakan bahwa mereka dapat tinggal berdampingan dengan suku apa saja, agama apa saja, dari kelompok apa saja, namun harus memiliki sifat yang baik. Pandangan dari kedua suku-bangsa yang tidak membedakan suku, agama, dan kelompok ini seperti yang ada pada sila ke dua pada Pancasila itu menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan mengamalkan nilai budaya yang berkaitan dengan nilai budaya nasional.

Selain itu, nilai kerukunan dapat dilihat dari usaha menghindari konflik. Terdapat 86,7% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 52,2% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang belum pernah mengalami konflik. Hal ini disebabkan karena mereka dari kedua suku bangsa tersebut memandang bahwa konflik merupakan tindakan yang tidak baik, merugikan orang, menimbulkan hubungan yang tidak harmonis; sehingga berusaha untuk menghindari konflik tersebut. Tindakan dari kedua suku-bangsa ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan mengamalkan nilai budaya yang berkaitan dengan nilai

budaya nasional. Namun terlihat jumlah yang relatif kecil dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa ini, menunjukkan bahwa khususnya suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan yang masih kurang bila dibandingkan dengan suku-bangsa asal/suku Jawa.

Nilai musyawarah, dapat dilihat dari tindakan dari masing-masing suku bangsa dalam mengatasi suatu kesalahan/fahaman/konflik yang terjadi dalam hubungan antar suku-bangsa. Terlihat 14,7% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 8,9% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah melakukan tindakan ini secara kekeluargaan. Bagi suku-bangsa asal musyawarah ini dimaksudkan rembug bareng, yaitu segala sesuatunya dibicarakan bersama-sama. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan mengamalkan nilai budaya yang berkaitan dengan nilai budaya nasional khususnya berkaitan dengan sila ke empat pada Pancasila. Mengingat pendukung nilai ini jumlahnya masih relatif kurang/masih rendah, hal ini kurang mendukung integrasi nasional.

Gotong royong diartikan sebagai sikap senang membantu orang lain. Nilai gotong royong ini dalam perwujudannya dapat dilihat dari tindakan dalam membantu orang baik dalam suasana suka maupun duka, dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan kampung.

Terlihat 9,8% dari suku bangsa asal/suku Jawa dan 9,0% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang menunjukkan sikap mau bergotong royong dengan siapa saja. Hal ini menunjukkan bahwa dari kedua suku-bangsa ini tampak masih sedikit responden yang memahami dan mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa mereka kurang menyadari pentingnya nilai budaya tersebut dalam kehidupan bersama orang lain, baik berbeda suku, agama, ataupun kelompok tertentu.

Nilai tenggang rasa, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan mengurangi konflik", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "sikap saling mencintai terhadap sesamanya". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai tenggang rasa yang dianut oleh kedua suku bangsa ini, namun pada dasarnya peduli terhadap orang lain. Perwujudannya dapat dilihat dari adanya usaha orang Jawa dalam memahami budaya suku bangsa lain, dan dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dari sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Tindakan tersebut berkaitan dengan sila ke dua butir ke empat. Terdapat 4,0% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 5,7% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah memahami dan mengamalkan

nilai tenggang rasa. Dari kedua suku-bangsa ini tampak masih kurang/sedikit responden yang memahami dan mengamalkannya.

Nilai kebersamaan, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "rasa peduli terhadap orang lain", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "ingin menyatu, tidak dikucilkan orang". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun pada dasarnya sama yaitu ingin bersatu dengan orang lain. Perwujudannya dapat dilihat dari tindakan orang Jawa dalam usaha membantu orang yang terkena musibah. Tindakan dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dilihat dari tindakan rela berkorban demi orang lain. Terdapat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 11,5% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah memahami dan mengamalkan sesuai dengan sistem nilai budaya nasional, berkaitan dengan sila ketiga pada Pancasila.

Kebersamaan, dapat dilihat adanya peduli kepada orang lain. Wujud dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari sering terjadi ramai-ramai karena adanya kesalah fahaman, terlihat hubungan yang kurang menyenangkan, tidak mau tegur menegur walaupun tinggal dalam satu rumah pondokan/asrama/kontrakan. Tindakan seperti ini dinilai oleh responden bahwa mereka belum/kurang tahu tentang sistem nilai budaya nasional.

Penilaian seperti ini juga dibenarkan oleh pengakuan para informan. Para informan yang kebetulan berstatus sebagai pemilik kost, juga yang berstatus sebagai RT setempat, mereka memberikan penilaian hampir serupa tentang perilaku tersebut. Dikatakan oleh para informan ini bahwa sering dijumpai ramai-ramai antar anak kost yang tinggal di rumahnya/disekitarnya. Setelah ditelusuri ternyata kejadian ini bermula dari bercanda lewat omong-omong namun akhirnya menjadi serius karena adanya kesalah fahaman dalam pergaulan tersebut. Tindakan ramai-ramai ini biasa terjadi pada kost anak laki-laki. Dan jika ramai-ramai ini tidak mencapai mufakat terjadilah perkelahian antar mereka /antar anak kost. Dalam suasana seperti ini, bapak kost/ RT setempat ikut campur.

Tindakan bapak kost atau bapak RT setempat menunjukkan bahwa mereka ini ikut bertanggung jawab atas anak kost tersebut. Mereka beranggapan bahwa anak kost merupakan warganya juga, sehingga keamanan dan ketenteraman mereka juga harus dijaga. Tindakan ini bila dikaitkan dengan nilai budaya nasional, menunjukkan bahwa para informan tersebut telah mengamalkan nilai budaya nasional tersebut, yang berarti mereka telah memahami juga. Seding tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang tinggal

nilai tenggang rasa. Dari kedua suku-bangsa ini tampak masih kurang/sedikit responden yang memahami dan mengamalkannya.

Nilai kebersamaan, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "rasa peduli terhadap orang lain", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "ingin menyatu, tidak dikucilkan orang". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun pada dasarnya sama yaitu ingin bersatu dengan orang lain. Perwujudannya dapat dilihat dari tindakan orang Jawa dalam usaha membantu orang yang terkena musibah. Tindakan dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dilihat dari tindakan rela berkorban demi orang lain. Terdapat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 11,5% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah memahami dan mengamalkan sesuai dengan sistem nilai budaya nasional, berkaitan dengan sila ketiga pada Pancasila.

Kebersamaan, dapat dilihat adanya peduli kepada orang lain. Wujud dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari sering terjadi ramai-ramai karena adanya kesalah fahaman, terlihat hubungan yang kurang menyenangkan, tidak mau tegur menegur walaupun tinggal dalam satu rumah pondokan/asrama/kontrakan. Tindakan seperti ini dinilai oleh responden bahwa mereka belum/kurang tahu tentang sistem nilai budaya nasional.

Penilaian seperti ini juga dibenarkan oleh pengakuan para informan. Para informan yang kebetulan berstatus sebagai pemilik kost, juga yang berstatus sebagai RT setempat, mereka memberikan penilaian hampir serupa tentang perilaku tersebut. Dikatakan oleh para informan ini bahwa sering dijumpai ramai-ramai antar anak kost yang tinggal di rumahnya/disekitarnya. Setelah ditelusuri ternyata kejadian ini bermula dari bercanda lewat omong-omong namun akhirnya menjadi serius karena adanya kesalah fahaman dalam pergaulan tersebut. Tindakan ramai-ramai ini biasa terjadi pada kost anak laki-laki. Dan jika ramai-ramai ini tidak mencapai mufakat terjadilah perkelahian antar mereka /antar anak kost. Dalam suasana seperti ini, bapak kost/ RT setempat ikut campur.

Tindakan bapak kost atau bapak RT setempat menunjukkan bahwa mereka ini ikut bertanggung jawab atas anak kost tersebut. Mereka beranggapan bahwa anak kost merupakan warganya juga, sehingga keamanan dan ketenteraman mereka juga harus dijaga. Tindakan ini bila dikaitkan dengan nilai budaya nasional, menunjukkan bahwa para informan tersebut telah mengamalkan nilai budaya nasional tersebut, yang berarti mereka telah memahami juga. Sedang tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang tinggal



bersama/berdampingan yang menimbulkan keramaian ini dinilai masih kurang dalam mengamalkan nilai-nilai budaya nasional.

Sering dijumpai pula oleh informan, hubungan yang kurang baik, tidak mau tegur menegur, bahkan diam-diam/ "*neng-nengan*"; yang menurut penilaian informan terjadi karena adanya kesalah fahaman. Khususnya untuk neng-nengan ini hanya terjadi pada kaum wanita. Mereka biasanya kalau tidak cocok terus diam-diam. Dalam suasana seperti ini biasanya teman yang lain atau Ibu kost yang punya peran untuk mengembalikan hubungan tersebut. Tindakan "mengembalikan hubungan baik" yang dilakukan oleh teman atau oleh Ibu kost tersebut menunjukkan bahwa mereka ini telah mengetahui nilai budaya nasional.

Nilai saling pengertian, dapat dilihat dari sikap kedua suku-bangsa yang selalu menjaga hubungan baik dalam hidup bersama /berdampingan dengan orang/suku lain. Terdapat 1

Nilai halus, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "kelembutan diri", sedang menurut suku-bangsa pendatang /suku luar Jawa diartikan sebagai "kesan yang menyenangkan". Terlihat adanya perbedaan makna dari nilai halus yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun pada dasarnya nilai tersebut dapat digunakan untuk meredakan suasana tegang. Dari suku bangsa asal/suku Jawa perwujudannya dapat dilihat dari tindakan dengan nada halus dalam menyelesaikan suatu masalah, sedang dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dilihat dari hubungan yang membuat orang lain senang/hubungan yang menyenangkan. Terdapat 13,3% dari suku bangsa asal/suku Jawa dan 2,0% dari suku-bangsa pendatang yang memahami dan mengamalkan nilai halus ini sesuai dengan nilai budaya nasional khususnya berkaitan dengan sila ke lima pada Pancasila. Terlihat jumlah yang sangat sedikit dari responden suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang memahami dan mengamalkannya.

Nilai sabar, menurut suku bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan tahan diri", sedang menurut suku-bangsa luar Jawa diartikan sebagai "menunda kenikmatan". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai sabar yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun nilai budaya tersebut tidak memiliki kaitan dengan nilai budaya nasional. Terdapat 5,4% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 2,0% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang memahami dan mengamalkan nilai sabar tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran suku bangsa asal lebih tinggi dari pada suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa, namun walaupun kedua suku ini masih berada ditingkat yang masih rendah.

Nilai pemberani, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan mempertahankan kebenaran", sedang menurut suku-bangsa

pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "berani membela kebenaran". Terlihat adanya persamaan makna/fungsi dari nilai berani yang dianut oleh kedua suku-bangsa tersebut. Nilai ini dapat digunakan sebagai alat membela bangsa dan negara demi kebenaran, dan berkaitan dengan sila ke dua pada Pancasila. Terdapat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 11,5% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang memahami dan mengamalkan nilai pemberani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terlihat tingkat kesadaran suku-bangsa pendatang lebih tinggi dari pada suku-bangsa asal.

Nilai kerja keras, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tidak bermalas-malasan", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "suka bekerja". Terlihat adanya kesamaan makna/fungsi dari nilai yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini. Nilai tersebut berkaitan dengan sistem nilai budaya nasional yang ada pada sila ke lima dari Pancasila. Terdapat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 9,0% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang memahami dan mengamalkannya.

Dari semua uraian tersebut diatas, ditunjukkan bahwa terdapat kaitan antara nilai budaya suku-bangsa dengan nilai budaya nasional. Nilai-nilai yang terdapat pada suku-bangsa, terdapat pula pada sistem nilai budaya nasional. Namun, tidak semua nilai-nilai yang terdapat pada suku-bangsa tersebut menjadi satu sistem nilai budaya nasional. Hanya nilai-nilai yang dapat dijadikan kerangka acuan bagi seluruh bangsa Indonesia saja yang diangkat menjadi nilai-nilai budaya nasional karena pada dasarnya nilai budaya nasional adalah mencakup semua aspek kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan dalam hubungan antarsuku-bangsa yaitu antara suku-bangsa asal dengan suku-bangsa pendatang yang sangat multietnik menunjukkan adanya hubungan yang baik walaupun penduduknya relatif kecil. Hal ini dapat dikatakan kurang mendukung terwujudnya integrasi nasional karena walaupun nilai-nilai tersebut telah ada/dimiliki dan telah difahami sejak kecil, namun masih banyak responden yang kurang menyadari arti pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain (yang multietnik seperti yang ada di daerah penelitian ini).

## **2. Potensi Penunjang Persatuan dan Kesatuan**

Potensi penunjang persatuan dan kesatuan yang dimaksudkan adalah mengenai pengetahuan mereka tentang sistem nilai budaya yang mewujudkan berbagai tindakan dalam hubungan antar suku-bangsa yang mempunyai potensi meningkatkan kualitas kesatuan dan persatuan sebagai anggota masyarakat satu bangsa.

Menurut pengetahuan responden baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang, nilai-nilai yang dapat atau memiliki potensi yang menunjang persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilihat pada uraian berikut.

Nilai kebersamaan, dapat dilihat dalam hubungan antara suku-bangsa asal/suku Jawa dengan suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dalam pandangannya terhadap suku yang paling disenangi untuk tinggal bersama/berdampingan. Terdapat 11,4% dari suku bangsa asal/suku Jawa dan 20,3% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang mengatakan "semua suku sama saja". Jawaban sama saja dari kedua suku-bangsa ini menunjukkan kalau mereka dapat tinggal bersama atau berdampingan dengan siapa saja. Nilai tersebut perlu dipertahankan karena dapat menopang atau berpotensi menunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai kerja sama, dapat dilihat dari pandangan masing-masing suku-bangsa tentang suku-bangsa yang dipilih untuk kerja sama. Terdapat 17,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 21,7% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang memberikan jawaban "tidak memilih suku-bangsa yang mana yang diajak kerja sama, semua sama saja". Nilai tersebut perlu dipertahankan karena dapat atau memiliki potensi yang dapat menunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai rukun, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan tidak senang kelahi", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "bersatu tanpa konflik". Dari kedua pengertian tersebut tampak makna/fungsi hampir sama dari kedua suku-bangsa ini, dan nilai ini dapat menjadi potensi penunjang persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Nilai tersebut dalam perwujudannya sehari-hari dapat dilihat dari usaha orang Jawa untuk selalu menjaga hubungan baik sehingga jarang terjadi konflik (hanya 13,3% responden yang pernah mengalami konflik). Perwujudan dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa dapat dilihat dari usaha menjalin hubungan baik dengan suku lain.

Nilai musyawarah, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan rembug bareng", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "tindakan untuk kepentingan bersama". Terlihat adanya makna/fungsi yang hampir sama dari nilai musyawarah yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, pada dasarnya nilai tersebut dapat menjadi potensi penunjang kesatuan dan persatuan bangsa, dan oleh karenanya perlu dipertahankan.

Nilai Gotong Royong, menurut suku-bangsa asal/suku Jawa diartikan sebagai "tindakan senang membantu", sedang menurut suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa diartikan sebagai "tindakan mengembangkan rasa kesatuan dan

persatuan ". Terlihat adanya perbedaan makna/fungsi dari nilai gotong royong yang dianut oleh kedua suku-bangsa ini, namun pada dasarnya nilai tersebut dapat menjadi potensi penunjang kesatuan dan persatuan bangsa, oleh karena itu perlu dipertahankan.

Nilai harmoni, dapat dilihat dari usaha masing-masing suku-bangsa dalam menjaga hubungan baik dengan suku lain. Terdapat 22,7% dari suku bangsa asal/suku Jawa dan 49,0% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah berhasil menjaga hubungan baik dengan suku lain yang tinggal berdampingan. Tindakan dari kedua suku-bangsa ini menunjukkan adanya usaha untuk bersatu bersama semua bangsa di Indonesia. Nilai ini perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan karena nilai tersebut dapat menopang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai kesejajaran, dapat dilihat dari pandangan kedua suku bangsa tentang suku lain yang sama derajatnya, sejajar, dan sama haknya dengan mereka. Terdapat 51,0% dari suku bangsa-asal/suku Jawa dan 36,7% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang berpandangan tersebut. Nilai tersebut perlu dipertahankan karena dapat menopang atau memiliki potensi yang menunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai toleransi, dapat dilihat dari interaksi mereka yang selalu berusaha untuk rukun. Untuk mewujudkan kerukunan ini, dari kedua suku-bangsa tersebut berusaha dengan cara meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama suku-bangsa. terlihat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 14,6% dari suku-bangsa luar Jawa yang telah melakukan tindakan ini. Nilai ini perlu dipertahankan karena nilai tersebut dapat atau memiliki potensi penunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai tahan diri, dapat dilihat dari sikap responden dari kedua suku-bangsa yang berusaha agar selalu dapat rukun dengan suku lain. Terdapat 80,0% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 86,7% dari suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa yang telah bersikap tahan diri ini, dan ternyata dapat digunakan untuk mewujudkan kerukunan dalam hubungan antar mereka. Nilai tahan diri perlu dipertahankan karena nilai tersebut dapat digunakan atau berpotensi untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai saling menghormati, dapat dilihat dari sikap dari kedua suku-bangsa dalam melakukan hubungan dengan suku lain. Terdapat 1,3% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 2,5% dari suku-bangsa pendatang/suku luar yang merasa nilai ini dapat digunakan untuk mempersatukan suku-bangsa. Nilai ini perlu dipertahankan karena dapat menopang persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai saling menghargai, dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan oleh responden dari kedua suku-bangsa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 6,7% dari suku-bangsa asal/suku Jawa dan 2,5% dari suku bangsa pendatang/suku luar Jawa yang merasa nilai tersebut bermanfaat dalam hidupnya terutama dalam menjalin hubungan baik dengan sesama. Nilai tersebut perlu dipertahankan karena memiliki potensi yang menunjang persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, semua nilai-nilai ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang diketahui dan dapat digunakan atau berpotensi untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa. Dikatakan demikian karena di dalam nilai-nilai tersebut mengandung arti menyatukan bangsa dalam satu kesatuan. Jadi nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai wahana mengintegrasikan semua suku-bangsa yang multi-etnik, seperti yang ada di Desa Caturtunggal.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang berjudul: Integrasi Nasional: suatu pendekatan budaya, adalah sebagai berikut:

Desa Caturtunggal yang merupakan daerah penelitian adalah salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam menunjang integrasi nasional. Hampir semua suku-bangsa yang terdapat di wilayah nusantara ini ada di daerah tersebut, sehingga cocok kalau daerah ini disebut sebagai "tempat/wadah terjadinya hubungan antarsuku-bangsa".

Ada beberapa faktor yang mendukung Desa Caturtunggal ini menjadi wadah terjadinya hubungan antarsuku-bangsa, yaitu: faktor geografis, dan faktor infrastruktur. Faktor geografis dapat dilihat dari letak desa yang sangat strategis, dekat dengan berbagai macam tempat pendidikan terutama perguruan tinggi yang cukup terkenal, yakni Universitas Gadjah Mada, IKIP Karangmalang, dan beberapa universitas swasta. Sementara itu, faktor infrastruktur dapat dilihat dari prasarana dan sarana yang memadai.

Kedatangan suku-bangsa pendatang yang sebagian besar berasal dari luar Jawa yang berlatar budaya berbeda-beda, berpengaruh terhadap sikap dan tindakan suku bangsa asal/suku Jawa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk-bentuk tindakan dalam kegiatan kelompoknya.

Dilihat dari kelompok sosial yang terdapat di desa Caturtunggal ini, tidak menunjukkan adanya gejala disintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada, baik yang terbentuk berdasarkan: kekerabatan akibat pertalian darah dan akibat perkawinan, berdasarkan lingkungan dimana mereka tinggal, maupun berdasarkan umur dan jenis kelamin. Tidak ditemui bentuk kelompok sosial yang menunjuk ke etnosentrisme, sehingga kelompok sosial yang ada di daerah ini dapat dikatakan tidak berbahaya/ mengganggu integrasi.

Keberadaan semua jenis kelompok sosial oleh pendukungnya baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang, dianggap sebagai wadah/ ajang pertemuan yang sekaligus sebagai wahana komunikasi untuk memperkuat solidaritas bangsa dengan didasari oleh rasa kebersamaan, kerukunan, senasib sepenanggungan, dan rasa sebangsa, bukan sebagai alat untuk menonjolkan etnosentrismenya.

Dilihat dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh kedua suku-bangsa tersebut pada dasarnya terdapat kesamaan nilai, namun di dalam tindakan/perwujudan sehari-hari terdapat perbedaan jumlah pendukung/pelaku nilai tersebut. Nilai-nilai yang paling banyak didukung oleh suku-bangsa asal/suku-bangsa Jawa adalah gotong royong, rukun, nrimo, dan halus. Sementara itu, dari suku-bangsa pendatang/suku-bangsa luar Jawa paling banyak mendukung nilai-nilai taqwa, kebersamaan, pemberani, dan keras. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan konsep dari pendukung masing-masing nilai budaya tersebut, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap terwujudnya integrasi nasional.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang mengandung arti kesatuan dan persatuan, terutama yang mengacu pada konsep integrasi, dapat dilihat dari berbagai tindakan dan pendapat yang mendukung integrasi. Hal ini dapat dilihat dalam tindakan hubungan antarsuku-bangsa asal/suku-bangsa Jawa dengan suku-bangsa pendatang/suku luar Jawa.

Dari hasil penelitian, sebagian besar suku-bangsa asal/suku-bangsa Jawa dalam melakukan interaksi sosial dengan suku-bangsa lain banyak mengacu pada konsep: rukun, gotong royong, dan musyawarah. Sementara itu, suku-bangsa pendatang banyak yang mengacu pada konsep: kebersamaan, rukun, dan tenggang rasa. Semua konsep-konsep tersebut pada dasarnya telah ada dan dimiliki baik oleh suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Namun dalam perilaku atau hubungan sosial, konsep-konsep ini masih kurang dihayati. Hal ini dapat dilihat dari tindakan mereka yang masih mempertimbangkan unsur-unsur suku atau agama.

Dalam melakukan hubungan sosial dengan kelompok lain ternyata ada pandangan yang bersifat positif dan negatif yang dilakukan oleh suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Banyak suku-bangsa asal yang memandang positif atas sifat-sifat kebersamaan, dan taqwa serta memandang negatif atas sifat-sifat keras, kasar, dan suka kelahi, terhadap suku-bangsa lain. Hal ini berbeda dengan pandangan suku-bangsa pendatang yang banyak memberikan pandangan positif atas sifat-sifat kebersamaan dan rukun serta memandang negatif atas sifat kasar, keras, dan tidak mau mengalah terhadap suku bangsa lain.

Perbedaan sudut pandang terhadap sifat-sifat yang dianggap positif dan negatif terhadap kelompok lain ini sangat dipengaruhi oleh sikapnya yang senang atau tidak senang terhadap kelompok lain tersebut. Jika mereka menyenangkannya, pandangan mereka cenderung positif, demikian sebaliknya akan memandang negatif jika tidak menyenangkannya.

Pada masa kini (saat penelitian), pandangan tersebut mengalami perubahan. Perubahan sudut pandang ini erat kaitannya dengan ada tidaknya suku-bangsa yang paling dikenal, dan lamanya mengenal. Temyata setelah mereka (baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang) mengenal betul dan sudah lama mengenal, mereka merubah pandangannya tersebut. Terutama bagi mereka yang semula memandang negatif berubah menjadi positif.

Temyata stereotip masih ada, baik pada suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang. Namun, telah terdapat perubahan sudut pandang setelah lama bergaul dan banyak melakukan hubungan dengan kelompok lain. Mereka dalam saling berinteraksi banyak menunjuk ke nilai-nilai yang bersifat positif sehingga hubungan diantara mereka dapat dikatakan relatif baik.

Pengetahuan tentang sistem nilai budaya nasional tampak sangat membantu terwujudnya hubungan baik diantara mereka. Terlihat sebagian besar responden baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang banyak yang mengetahui tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 45, pembangunan terencana, dan sistem hukum nasional. Pada dasarnya semua pengetahuan yang menyangkut nilai-nilai ini berpengaruh terhadap sikap dan tindakan mereka dalam usaha mewujudkan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Temyata sistem nilai budaya suku-bangsa memiliki kaitan erat dengan sistem nilai budaya nasional. Responden baik suku-bangsa asal maupun suku-bangsa pendatang yang berbeda latar belakang budaya temyata dapat berinteraksi dengan baik dengan saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian, tenggang rasa, gotong royong, rukun, dan kebersamaan. Kesemuanya itu ditandai dengan sangat sedikitnya terjadi konflik antarsuku-bangsa dan adanya usaha-usaha untuk menyatukan.

Pemahaman terhadap nilai-nilai budaya nasional menunjukkan adanya potensi penunjang persatuan dan kesatuan. Hal ini tidak asing karena semua nilai-nilai yang diangkat sebagai sistem nilai budaya nasional berasal dari sistem nilai budaya suku-bangsa. Dengan dilandasi oleh pengetahuannya tentang sistem nilai budaya nasional, suku-bangsa pendukung nilai tersebut ada yang mampu dan yang tidak mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang multietnik ini. Bagi mereka yang mampu berarti mendukung integrasi nasional, sebaliknya akan terjadi disintegrasi bagi mereka yang tidak mampu mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.



## **B. SARAN-SARAN**

Dari apa yang telah disimpulkan diatas saran-saran yang sekiranya dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Perlu adanya pembinaan budaya terhadap semua suku-bangsa yang ada di Desa Caturtunggal ini, dengan melibatkan semua pejabat setempat yang bersangkutan. Pembinaan ini dapat dilakukan lewat seminar-seminar, kursus-kursus, atau penyuluhan-penyuluhan di tingkat dusun, RW atau RT.

Perlu adanya semacam rangsangan yang dapat memacu meningkatkan kesadaran berbudaya, dengan cara memperkenalkan berbagai identitas suku-bangsa lewat berbagai macam lomba tarian/kesenian daerah, pakaian daerah, dan makanan daerah/tradisional.

Perlu adanya keteladan dari pemerintah setempat terhadap masyarakatnya yang multietnik tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap semua anggota masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun kelompok tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfian.

- 1988 Masalah Pengembangan Pemikiran tentang Ideologi Pancasila. Dalam *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Bachtiar, H.W.

- 1976 Masalah integrasi nasional di Indonesia. Dalam *Prisma*, No.8 (Agustus). Jakarta: LP3ES.

- 
- 1985 Konsensus dan konflik dalam sistim budaya di Indonesia. Dalam *Budaya dan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: YP2LPM - Hanindita.

Castles, L.

- 1994 *Etnisitas dan keutuhan wilayah negara-negara: Pandangan Global*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: sumbangan Ilmu-ilmu Sosial terhadap Konsepsi ketahanan nasional. Diselenggarakan oleh Program Studi Ketahanan Nasional - UGM, 30 Nopember 1994.

Darmono.

- 1989 Budaya Masyarakat Jawa dan Peranannya Dalam Integrasi Etnik Di Sumatera Utara, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (ed.) : *Interaksi Antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta : Depdikbud.

Drake, Ch.

- 1989 *National Integration in Indonesia: patterns and policies*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Garang, J.

- 1976 Ambivalensi agama: Antara dominasi dan toleransi. Dalam *Prisma*, No.8 (Agustus). Jakarta: LP3ES.

Gerungan, WA.

- 1979 *Pshychologi Sosial*. Bandung: PT. Eresko.

Guilford, ZP.

1959 *Personality*. New York: McGraw Hill Book Company.

Hans Daeng, J.

1993 Adaptasi dan Integrasi Nilai Budaya Tradisional - Modern, dalam *Majalah Basis* Maret - 1993 - XLII - No.3, Yogyakarta.

Harahap, Nasrudin.

1986 *Integrasi Penduduk Di Daerah Transmigrasi Kendari: Studi Tentang Pengaruh Aspek-Aspek Kebijakan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Pasca Sarjana.

Hendropuspita, D.

1989 *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.

Hildred Geertz.

1982 *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

Kodiran.

1993 Kebudayaan Jawa, dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

Koentjaraningrat.

1974 *Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.

---

1976 Kecurigaan adalah hambatan bagi integrasi. Dalam *Prisma*, No.8 (Agustus). Jakarta: LP3ES.

---

1979 Aneka warna manusia dan kebudayaan dalam pembangunan. Dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: jambatan.

---

1980 *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Djambatan.

---

1982 Lima masalah integrasi nasional dalam masalah-masalah pembangunan. Dalam *Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.

---

1984 Masalah Integrasi Nasional. Dalam *Harian Kompas*, PT. Gramedia. p9p5

---

1987 Gotong royong dalam Kebudayaan Indonesia. Dalam *Harian Kompas*. PT. Gramedia.

---

1988 Penelitian Antropologi Terhadap Masalah Masyarakat Multietnik dan Kesatuan Nasional. Dalam *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan.

---

1993 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Edisi Ke empat belas. Jakarta: Djambatan.

Ki Suratman.

1993 "Puncak-Puncak Yang Menimbulkan Berbagai Persepsi Kebudayaan Nasional", *Tantangan Kemanusiaan Universal*, ed. G. Mudjanto - B. Rahmanto - J.Nat. Colleta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kompas (Tajuk Rencana).

1990 *Integrasi Masyarakat Harus Diupayakan Terus Menerus*. Jakarta: *Harian Kompas*.

Liliweri, A.

1994 Prasangka sosial dan komunikasi antar etnik: Kajian tentang orang Kupang, NTT. *Prisma*. Jakarta: LP3ES.

Magnis Suseno.

1984 *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafah tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.

Mangkubumi, KGPH.

- 1984 *Kerangka Konsepsi Politik Indonesia Sebuah Tinjauan Dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya.

Melalatoa, M. Junus.

- 1995 *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya, Bimbingan Teknis Penelitian*. Jakarta: Direktorat Jarahnitra, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud.

Murtijipto, dkk.

- 1994/1995 *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: P3NB, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Mulder, Z.

- 1981 *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Newcomb, Twiner dan Converst.

- 1978 *Pshycologi Sosial*. Bandung: CV. Diponegoro.

Pelly, Usman.

- 1989 *Hubungan Antara Kelompok Etnis: Beberapa Kerangka Teoritis Dalam Kasus Kota Medan Dalam Interaksi Antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud.

Poerwanto, Hari.

- 1994 *Integrasi Nasional, Kerjasama Antar Golongan dan Suku Bangsa Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi*. Makalah disampaikan dalam ceramah Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah. Diselenggarakan oleh Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, Tgl. 20 Juni 1994.

Saanin DT. Pariaman,

- 1984 "Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya". Dalam *Kepribadian dan Perubahannya*, Edt. Brouwer, dkk. Jakarta: PT. Gramedia.

Schweizer, M.

1979 Pendapat-Pendapat Antar Etnis. Dalam *Prisma*. Jakarta: LP3ES.

Siahaan, Tambun.

1982 "Prinsip Dalihan Na Tolu dan Gotong Royong Pada Masyarakat Batak Toba", *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Edt. Koentjaraningrat. Jakarta: LP3ES.

Sianipan, Godlif.

1993 Pantun Hangoluan Tois Hamagoan Etika Batak Toba. Dalam *Majalah Kebudayaan Umum BASIS* yang berjudul Adaptasi & Integrasi Nilai Budaya Tradisional - Modern, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri

1989 *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sjamsuddin, N.

1994 *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Diselenggarakan oleh Program Studi Ketahanan Nasional - UGM, 30 Nopember 1994.

Soekanto, Soerjono.

1983 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Sosrodihardjo, Soedjito.

1986/1987 *Pergeseran Nilai dalam Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Sudomo.

1976 "Tidak Dibenarkan Dominasi Mayoritas atau Minoritas", *Prisma*, Tahun V No.8. Jakarta: LP3ES.

Suparlan, Parsudi.

1984/1985 *Pola-Pola Interaksi Antar Etnik di Pontianak, Pekan Baru, dan Sumenep*. Jakarta: P2NB, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud.

Surahman.

1990 *Persepsi Masyarakat Setempat Terhadap Integrasi Masyarakat Pendatang Di Lingkungan Taman Purbakala Nasional Borobudur*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Pasca Sarjana.

Suroso.

1994 *Pola Migrasi dan Kemajemukan Kebudayaan Potensi Komplek dan Kerjasama Dalam Kehidupan Sosial Budaya*. Makalah Ceramah Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, Proyek P2NB, Depdikbud DIY, 9 Agustus 1994.

Suryaman, A.

1990 *Persepsi Masyarakat Setempat Terhadap Integrasi Masyarakat Pendatang di Lingkungan Taman Purbakala Borobudur*. Yogyakarta: Fakultas Sastra, Pasca Sarjana, UGM.

Suryo, Djoko.

1989 Kota dan Pembauran Sosio-Kultural Dalam Sejarah Indonesia. Dalam Depdikbud (Edt.). *Interaksi p9p5 Antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud.

Susanto, P.A.

1977 *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* Bandung : Binacipta.

Suseno, F.M.

1993 *Etika Jawa*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sutrisno, Lukman.

1985 *Pembangunan Nasional Atas Dasar Gotong Royong Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Suyono, Ariyono.

1985 *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Presindo, CV.

Syairin Safri

1993 *"Trah" Bermunculan dari Golongan Priyayi sampai Wong Cilik*, Republika, Maret 1993, Yogyakarta.

Tom Bruneau.

1993 *Dimensi Waktu Dalam Komunikasi Antarbudaya. Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rasdakarya.

Van Baal, J.

1988 *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Gramedia.

Van Peursen.

1976 *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Veeger, K.J.

1985 *Realita Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat*. Dalam *Cakrawala Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Widjaja, A.W.

1986 *Integrasi Nasional, Bangsa dan Nation Indonesia dalam Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Young Yun Kim.

1993 *Komunikasi Dan Akulturasi*. Dalam *Komunikasi Antar*, Penyunting Deddy Mulyono, dkk. Bandung: Penerbit PT Remaja Rasdakarya.

Yuwono, S.

1984 *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan: Persepsi Ketahanan Nasional Terhadap Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Budhisantoso,

1985 *"Integrasi Nasional dan Kebudayaan Nasional"*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Proyek Pengembangan Nilai Budaya



Tanggal 15 s/d 20 Januari 1985 di Ever Green Village Tugu, Jakarta.

- 
- 1993 *"Kebudayaan dan Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk"*. Makalah disampaikan pada Pengarahan Umum Seminar di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Colleta J. Nat dan Umar Kayam

- 1987 *"Kebudayaan dan Pembangunan : Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia"*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Daeng J, Hans

- 1993 *"Adaptasi dan Integrasi Nilai Budaya Tradisional Modern"* dalam Majalah Basis Maret - 1993 - XLII - No. 3, Yogyakarta.

Mattulada

- 1985 *"Integrasi Nasional dan Pemasalahannya"*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Proyek Pengembangan Nilai Budaya Tanggal 15 s/d 20 Januari 1985 di Ever Green Village Tugu, Jakarta.

Poerwanto, Hari

- 1996 *"Integrasi Nasional Indonesia Dalam Perspektif Kultural Di Era Globalisasi"*. Disertasi S3, UI, Jakarta

Profil Desa / Kelurahan Caturtunggal

1995-1996

Takahshi

- 1989 *"Madiniyah dan Madaniyah, Konsep Urbanisme dan Peradaban"*, Ulumul Qur'an No. 3, 1989.

**LAMPIRAN 1.**  
**DAFTAR INFORMAN DI DESA CATURTUNGAL, 1995**

No.	<i>N a m a</i>	<i>Umur</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>Pekerjaan</i>	<i>Alamat</i>
1.	Hadi Hartono	46	SLTA	Wiraswasta	Janti
2.	Sumadi	52	SLTA	Ketua RT	Janti
3.	Suparto	45	SLTA	Peg, P.U	Kledokan
4.	Sulastiyono	35	SLTA	Wirasawasta	Kledokan
5.	H. Aubarsono BA	45	Sarmud	P.N.S	Kodya
6.	Asrono	50	SLTA	Kaur Kesra	Nologaten
7.	Sukirman D.M	68	SLTA	Pensiuan	Santren

## LAMPIRAN 2. DAFTAR RESPONDEN

### A. PENDATANG

<i>NAMA</i>	<i>Umur</i>	<i>Pekerjaan</i>	<i>Alamat</i>
Weni	23	mahasiswa	Tambak Bayan
Margaretha Ida Omberep	19	mahasiswa	Sagan
Barbalina Osok	19	mahasiswa	Sagan
Lolly K Tethool	40	negri/swasta	Nologaten
Sisilia de Santa	18	-	Sagan
Hironimos Teneila	21	mahasiswa	-
Thomas Lake	21	mahasiswa	Santren
Imelda do	21	mahasiswa	-
Ace do	22	mahasiswa	-
Wilhelmina Robertildo D	18	mahasiswa	-
Wilibalda W A Wisang	19	mahasiswa	-
Asep	21	mahasiswa	-
Loti Fernandez Aikoli	18	mahasiswa	Prayak kulon
Syafarudin Puterawan A	19	mahasiswa	Tambak Bayan
Yohanes Donbosko Adja	24	mahasiswa	Karanggayam
Net Ga Darni	23	mahasiswa	Kocoran
Andris Evia	22	mahasiswa	Tempel
Cosmas S	34	mahasiswa	Ngentak
Wendy DN Tj	21	mahasiswa	Ngentak
Don WS Dacona	23	mahasiswa	Samirono
Ema	22	mahasiswa	Karangwuni
Kualisahadil Attal	21	mahasiswa	Manggunsari
Maria Dolorosa Tilulu	19	mahasiswa	Karangwuni
N Supriatna	25	mahasiswa	Papringan
Roberto Didoek	26	mahasiswa	Papringan
Pieter Sandu Betang	26	mahasiswa	Papringan
Jeremias Lemek	42	negri/swasta	Nologaten
Masykur Bimantara	24	mahasiswa	Sagan
Lalu Budiarta	23	mahasiswa	Karangmalang
Syaifullah	30	wiraswasta	Manggunsari
Virga Anantha	23	mahasiswa	Ambarukmo

Ny Husnul	29	negri/swasta	Gowok
Cya P	18	mahasiswa	Santren
A Subandi	30	mahasiswa	Sagan
Ressiani	18	mahasiswa	Sagan
Hidayat Mukmin	20	mahasiswa	-
Eva Fatma R	24	mahasiswa	Ngentak
Oke Riana	24	mahasiswa	Ngentak
Ismail	23	mahasiswa	Samirono
Muliani	22	mahasiswa	Ambarukmo
Gerson	36	negri/swasta	Ngentak
Takdir Ali Mahmud	17	mahasiswa	Karangwuni
Adeodatus Ray Ray	36	wiraswasta	Janti
Roszeni	26	mahasiswa	Janti
Wayan Murta	21	mahasiswa	Blimbingsari
Nyoman Winartha	25	mahasiswa	Blimbingsari
I Gusti Putud	25	mahasiswa	Tempel
Ni Wayan Suniani	19	mahasiswa	Karangwuni
Made Sudarsa	22	mahasiswa	Karangwuni
Noviyanti	20	mahasiswa	Karanggayam
Yob Benedicto B	20	mahasiswa	Condongcatur
Ita Kellen	19	mahasiswa	-
Yenny Susanto	18	mahasiswa	Depok
Agnesia	21	mahasiswa	Depok
MG Rita Santi	21	mahasiswa	-
R Tia Puspasari	18	mahasiswa	-
Suzy Q	20	mahasiswa	Depok
Alexandre	19	mahasiswa	-
Margareta Ida O	19	mahasiswa	Depok
Pauline	19	mahasiswa	-
Ester A Rettob	22	mahasiswa	-
Maria Katharina	18	mahasiswa	-
Barbalina Osok	19	mahasiswa	-
Sortha Dwiparita	19	mahasiswa	-
Nora Gaberia Pasaribu	18	mahasiswa	-
Paula Eristina	21	mahasiswa	-
Yulia Karmila	18	mahasiswa	-
Anay	20	mahasiswa	Condongcatur
Thomas	23	mahasiswa	Condongcatur
Nikolaus Honi	24	mahasiswa	-

Maria P Basmeri	-	-	-
Idi	25	mahasiswa	Mrican
Haris	25	mahasiswa	Santren
Endang Siswanto	28	negri/swasta	Mrican
Nuning S	24	mahasiswa	Tempel
Eko	23	mahasiswa	Blimbingsari
Supriatno Dian Listianto	25	lainnya	Kledokan
Alim Bahri	23	mahasiswa	Ambarukmo
Suparto	45	negri/swasta	Kledokan
Christo Joseph	23	mahasiswa	Janti
O Th Kristantoro	34	negri/swasta	Janti
Gamin	27	negri/swasta	-
Eko Hardjono	26	mahasiswa	-
Achsin Rosadi	24	mahasiswa	Kledokan
Edy Suyanto	26	mahasiswa	Kledokan
Bambang SO	23	mahasiswa	Tempel
Azianto	21	mahasiswa	Karanggayam
Alimin	32	buruh	Janti
Rudi Hendra	19	mahasiswa	Mrican
Ferry Suwami	23	mahasiswa	Tambak Bayan
Sonny	23	mahasiswa	Seturan
Syahrial Djohor	26	mahasiswa	Kocoran
Indra Kurnia	20	mahasiswa	Kocoran
Rudy Menning	25	wiraswasta	Santren
Zulfi Hendri	21	mahasiswa	Karangmalang
Apit S	18	mahasiswa	Santren
Niksono Nababan	23	mahasiswa	Janti
Ferdinan Tarigan	23	mahasiswa	-
Geradus Gemuruh Tarigan	24	mahasiswa	Janti
Mawar Christianus Sebayana	22	mahasiswa	Janti
Fernando S	21	mahasiswa	Tambak Bayan
Gregorius Sagala	24	mahasiswa	Papringan
Daniel P Hutagaol	30	mahasiswa	Papringan
Rasmi Oberlina Saragih	20	mahasiswa	Ambarukmo
Zonathan Ginting	21	mahasiswa	Seturan
Reynoldian Silalahi	20	mahasiswa	Seturan
Khairul M Harahap	22	mahasiswa	Seturan
Mitchel Aries Tampubolon	23	negri/swasta	Kocoran
Samuelson	21	mahasiswa	Ngentak

Yana	19	mahasiswa	-
Hairiah	20	mahasiswa	Condongcatur
Butet Rosita Hutagaol	19	mahasiswa	Kocoran
Zainurin	22	mahasiswa	Gowok
Ekonovitra	23	mahasiswa	Gowok
Paulina Pawitri Puji	19	mahasiswa	Sagan
Nona Vony Anggraini	20	mahasiswa	Ambarukmo
Emha	28	mahasiswa	Blimbingsari
Hafsatul Barokah	19	mahasiswa	Samirono
Retno Setya Rini	19	mahasiswa	Karangmalang
Mimis Sandriani	21	mahasiswa	Karangwuni
R Hendri Syahrizal	20	mahasiswa	-
Henni Subagiharty	32	-	-
Amiruddin	36	wiraswasta	Gowok
BL Genyoyktus Trisna	22	mahasiswa	Gowok
Yulius Zal	22	mahasiswa	Sagan
Supran Kenedy	21	mahasiswa	Kledokan
Elifati Hulu	28	mahasiswa	Ambarukmo
Firmansyah	23	mahasiswa	Janti
Farida	21	mahasiswa	Karanggayam
Yupiter Hosea	19	mahasiswa	-
Inga	21	mahasiswa	Tambak Bayan
Rony	25	mahasiswa	Nologaten
Riza Firmansyah	19	mahasiswa	Manggunsari
Mappamyauri	23	mahasiswa	Papringan
Tony Ariyansyah	23	mahasiswa	Papringan
Rohmatullah HA	23	mahasiswa	Ambarukmo
Nizamuddin	19	mahasiswa	Karangmalang
M Yosa	23	mahasiswa	Karangmalang
Elhum	23	mahasiswa	Karangmalang
Tri Raharjo	23	mahasiswa	Samirono
Matema E	21	mahasiswa	Samirono
Darlis	22	mahasiswa	Samirono
Faisal Aferoi	22	mahasiswa	Karanggayam
Elly Swarti	27	negri/swasta	Mrican
Herry Robby	22	mahasiswa	Nologaten
Ihsanudin	20	mahasiswa	Sagan
Ujang Suprianto	18	mahasiswa	Santren
Gusti Nourah S	22	mahasiswa	Blimbingsari

Ahmad Suhendar	28	wiraswasta	Gowok
Wenti	22	mahasiswa	Seturan
Elan	23	mahasiswa	-
Muaf Hamid	30	negri/swasta	Karangwuni
Riva Wailan	27	mahasiswa	Blimbingsari
Hasdi Nur	29	lainnya	Santren
Syarafuddin Ismail	40	wiraswasta	Nologaten
Mursanti	20	mahasiswa	Karanggayam
Rusman.	20	mahasiswa	Santren

## B. ASLI

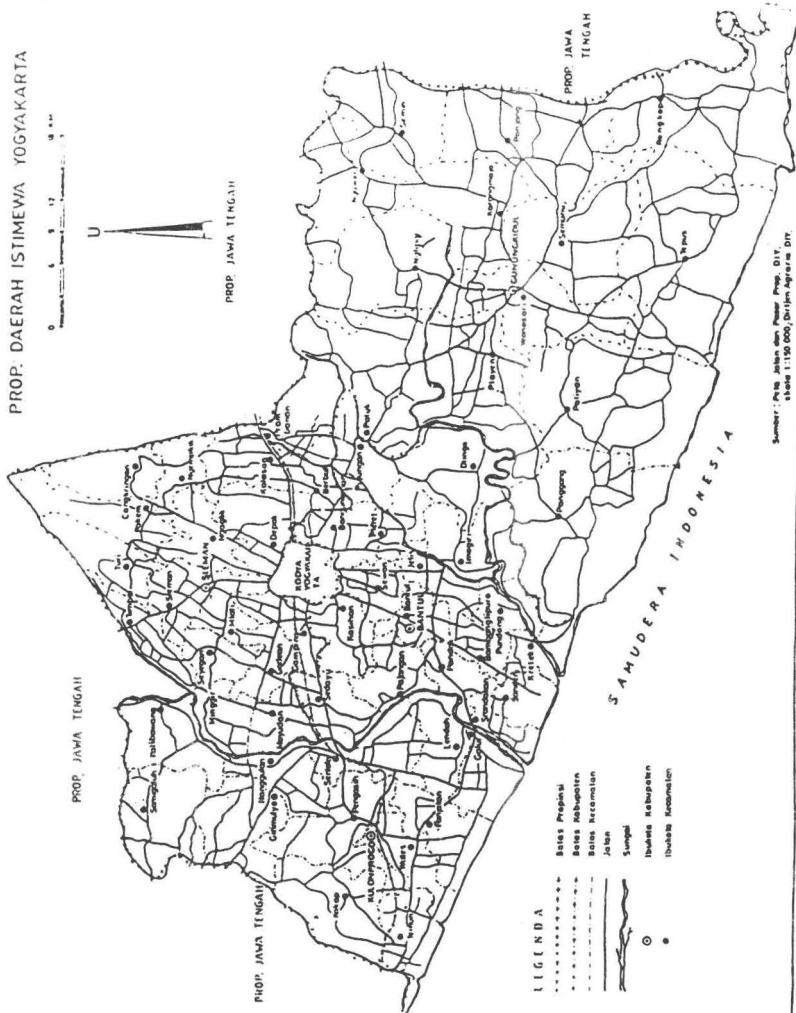
<i>Nama</i>	<i>Umur</i>	<i>Pekerjaan</i>	<i>Alamat</i>
Hadi Hartono Agung S	46	wiraswasta	Janti
Sadiman	43	negri/swasta	Karangwuni
Umilah	32	wiraswasta	Papringan
Hadiwiyono	52	negri/swasta	Karangwuni
Tri Supryanto	43	mahasiswa	Karangwuni
M Rahmat	63	pensiunan	Karangwuni
Sri Suratini S	40	ibu RT	Karangwuni
Soepardi	58	pamong desa	Karangwuni
Purwoko	42	wiraswasta	Karangwuni
Hartono	42	wiraswasta	Karangwuni
Susanto	46	guru	Santren
TH Rupiani	40	ibu RT	Santren
Daliman	47	wiraswasta	Santren
Untirahayu	45	wiraswasta	Santren
Qomariah	25	mahasiswa	Mrican
Mintarjo	54	wiraswasta	Santren
Jumeno	21	mahasiswa	Mrican
Mulyotaruno	74	pamong desa	Papringan
R Sudarmodjo	37	pamong desa	Ambarukmo
Goyono DS	50	pamong desa	Papringan
Suparjilah	56	wiraswasta	Ambarukmo
M Sunarti	41	wiraswasta	Ambarukmo
Haryani Yuliwati	45	ibu RT	Ambarukmo
Suhami	39	wiraswasta	Papringan
Sami	28	ibu RT	Seturan

Zumiran Priyoharjono	54	pensiunan	Seturan
Sujito	29	pamong desa	Seturan
Narto Raharjo	42	wiraswasta	Seturan
Ngatinem	38	ibu RT	Tambakbayan
Sukamto	40	negeri/swasta	Sagan
Suyadno	46	pamong desa	Mrican
Purwanto	38	pamong desa	Sagan
Suharto	47	negeri/swasta	Sagan
Sugeng	40	negeri/swasta	Sagan
Sastrowiharjo	60	buruh	Blimbingsari
Cipto Mulyono	77	pensiunan	Blimbingsari
Pudjono	54	negeri/swasta	Blimbingsari
Joyo Suparto	70	pensiunan	Sagan
Sumarno	45	wiraswasta	Kocoran
Hardiyanto	42	wiraswasta	Kocoran
Hadi Surata	61	pamong desa	Kocoran
Harjo Khampali	55	wiraswasta	Kocoran
Suwandi-Suradi	63	wiraswasta	Karanggayam
Sunardi	51	pamong desa	Karanggayam
Sri Suyani Lestari	20	wiraswasta	Karanggayam
Antonius Sardi	40	negeri/swasta	Karanggayam
Parinah SE	26	wiraswasta	Samirono
Tri Maryani	27	mahasiswa	Samirono
Ari Yudanto Setiawan	21	mahasiswa	Samirono
Partini	22	cari pekerjaan	Samirono
Sarjinem	45	wiraswasta	Karangmalang
Wagiman	53	negeri/swasta	Karangmalang
Sutarno	39	guru	Karangmalang
Suparman	44	negeri/swasta	Tempel
Suyano	44	negeri/swasta	Tempel
Sugimin	35	negeri/swasta	Tempel
Sugirin	55	pensiunan	Sleman
Rejo Sudarmo	75	wiraswasta	Sleman
Hardjo Wasito	66	pensiunan	Sleman
Sastro Amirdirdjo	65	pensiunan	Sleman
Iis Indrawati	20	mahasiswa	Janti
Suratman	40	wiraswasta	Janti
Eny Subekti	23	mahasiswa	Janti
Bambang Priyono	19	mahasiswa	Janti



ALB Aan Neris Edy S	22	mahasiswa	Gowok
Trianna Wahyu Utami	20	mahasiswa	Gondokusuman
Yani Lestari Ningsih	27	negeri/swasta	Gowok
Yulianto Gunawan	19	mahasiswa	Gowok
Djoko Santosa	40	wiraswasta	Nologaten
Prayitno	24	mahasiswa	Nologaten
Priyo Prayitno	60	pensiunan	Karangmalang
S Syamsoel Hadi	60	cari pekerjaan	Tempel
Sudiyoko	53	wiraswasta	Nologaten
Kristina Dwi Astuti	19	mahasiswa	Janti
Sunargito	51	negeri/swasta	Nologaten

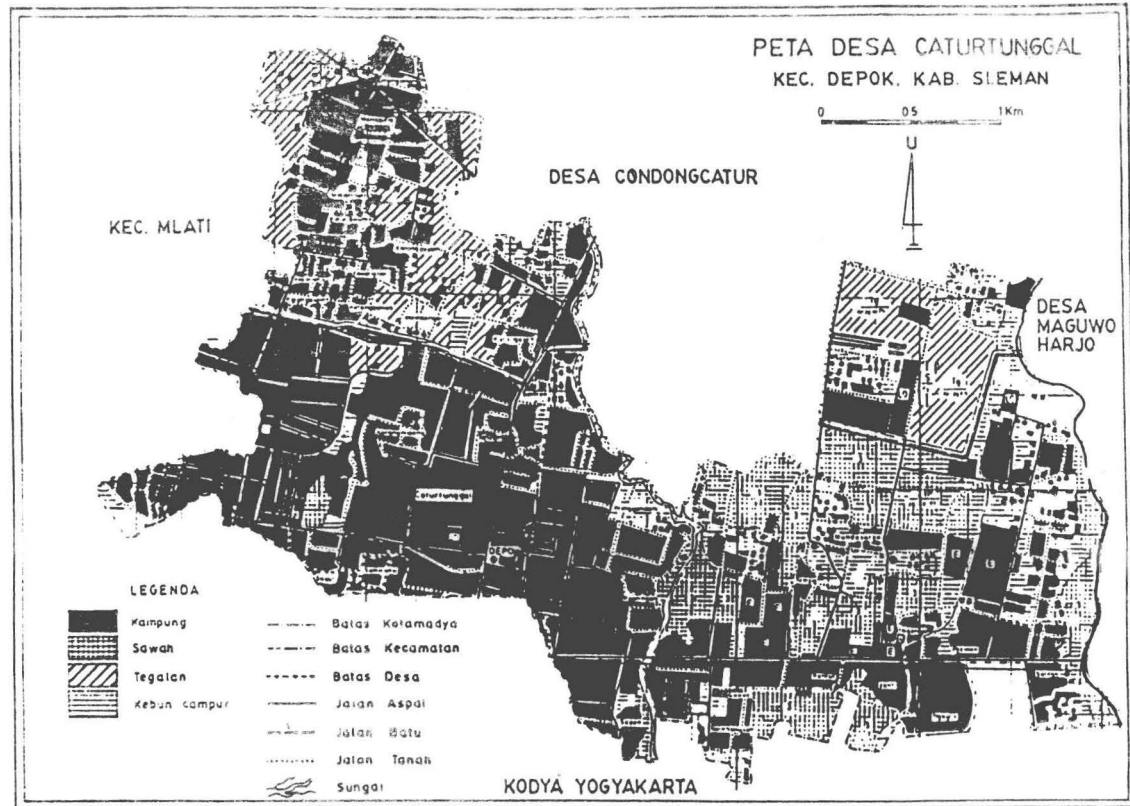
Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100											



**Budget :** Pk 10, Jalen dan Puser Prop. Div.  
 shela 1:150 000, Dirjen Agraria Div.

Diebstahl eines Bauspar-Kontos wegen der Nicht  
Friedenslegung! Yangvohor, 19

Peta 1



Peta 2



001484.3



Ke